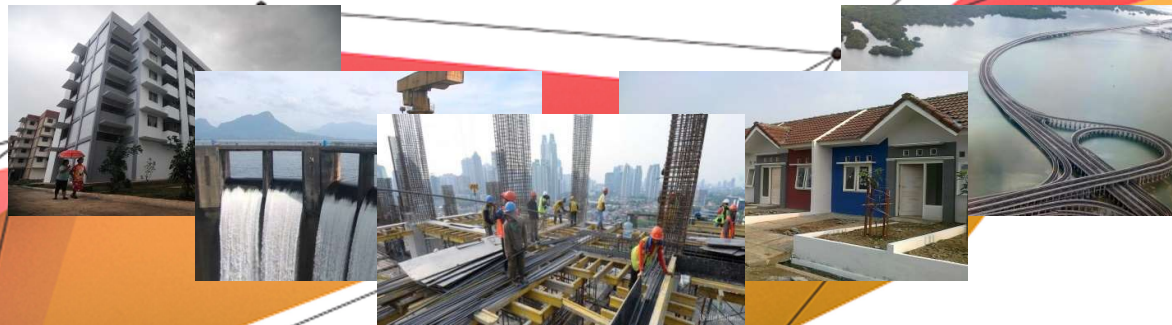




# Rencana Strategis 2015-2019

*Menjadi Pembina Konstruksi dan Investasi  
yang  
Berintegritas Tinggi, Andal, dan Kokoh*



**Direktorat Jenderal Bina Konstruksi**

**Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**

## Daftar Isi

Pengantar	1
1. Pendahuluan	2
2. Landasan Pengembangan	5
3. Garis Besar Rencana Strategis Ditjen Bina Konstruksi	27
4. Sasaran, Program, dan Indikator Kinerja	45
5. Penutup	50
LAMPIRAN	51
Lampiran I	52
Lampiran II	54
Lampiran III	60
Lampiran IV	61
Lampiran V	65
Lampiran VI	93

*“Renstra ini akan menjadi dasar penyusunan program pengembangan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dalam kurun waktu 2015 hingga 2019.”*

## Pengantar



Penyusunan Renstra Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (Ditjen Bina Konstruksi) 2015-2019 ini telah dilakukan dengan mengacu pada sejumlah produk kebijakan dan produk perencanaan jangka panjang ke-PUPR-an dan Pembinaan Jasa Konstruksi, khususnya Roadmap Pembina Jasa Konstruksi 2010-2024, dan didasarkan pada hasil analisis terhadap faktor internal dan eksternal Ditjen Bina Konstruksi.

Rencana Strategis Ditjen Bina Konstruksi 2015-2019 memuat program-program strategis yang perlu dilaksanakan Ditjen Bina Konstruksi dalam jangka waktu 5 tahun, dengan memperhatikan kondisi internal Ditjen Bina Konstruksi saat ini, dimana terdapat kekuatan dan kelemahan, serta kondisi eksternal Ditjen Bina Konstruksi yang ditandai berbagai isu penting yang dapat menjadi peluang maupun ancaman bagi Ditjen Bina Konstruksi untuk menjadi “pembina konstruksi dan investasi yang berintegritas tinggi, andal, dan kokoh” untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan konstruksi, menuju konstruksi Indonesia yang unggul dan mandiri demi terwujudnya kenyamanan lingkungan terbangun.

Dalam implementasinya melalui jabaran program-program strategis dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) Ditjen Bina Konstruksi, Renstra Ditjen Bina Konstruksi harus memiliki kemampuan untuk merespon pada perkembangan terkini yang terjadi, baik pada lingkungan internal dan lingkungan eksternal Ditjen Bina Konstruksi. Kemampuan tersebut dapat dibangun melalui sistem pemantauan, evaluasi, dan penyempurnaan Renstra Ditjen Bina Konstruksi yang dilakukan secara konsisten guna menjaga keefektifan program dan efisiensi pemanfaatan sumber daya Ditjen Bina Konstruksi dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan Ditjen Bina Konstruksi.

**Ir. Yusid Toyib, M.Eng.Sc**

Direktur Jenderal Bina Konstruksi

Mei, 2015

## 1. Pendahuluan

---

### Latar Belakang

Pada tahap pelaksanaan pembangunan jangka menengah ketiga (2015-2019), tatanan pembinaan konstruksi telah memiliki landasan hukum yang kuat dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Sesuai Undang-Undang tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum termasuk ke dalam kelompok kementerian dalam rangka menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perkembangannya memasuki periode Pemerintahan Kabinet Kerja 2015-2019, Kementerian Pekerjaan Umum digabung dengan Kementerian Perumahan Rakyat dan berubah nama menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sesuai Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja. Dalam rangka melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan di atas, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, telah dibentuk direktorat jenderal baru di lingkungan Kementerian PUPR dengan nama Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal setingkat Eselon I, dilengkapi dengan struktur organisasi yang terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Bina Investasi Infrastruktur, Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi, Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, dan Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan, serta dilengkapi dengan Balai-Balai sebagai unit pelaksana teknis.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Ditjen Bina Konstruksi menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 sebagai bagian tak terpisahkan dari Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

### Kedudukan Renstra Ditjen Bina Konstruksi 2015-2019

Ditjen Bina Konstruksi merupakan transformasi dari entitas Pembinaan Konstruksi yang sebelumnya pada periode 2010-2014 berupa Badan Pembinaan Konstruksi. Transformasi entitas tersebut mengakomodasi perubahan peran dari Unsur Pendukung (ketika menjadi Badan Pembinaan Konstruksi) menjadi Unsur Pelaksana (sebagai Direktorat Jenderal Bina Konstruksi). Pengembangan Renstra Ditjen Bina Konstruksi 2015-2019, secara historis

merupakan transformasi dari BP Konstruksi yang memiliki kesamaan obyek pembinaan yaitu Pembinaan Konstruksi, sehingga kondisi internal dan kondisi eksternal serta Renstra BP Konstruksi periode 2010-2014 dijadikan landasan pengembangan. Renstra Ditjen Bina Konstruksi 2015-2019, selain menjadi kelanjutan dari upaya yang telah dilakukan berdasarkan pada rencana strategis sebelumnya, juga memiliki peranan penting untuk mendukung pencapaian RPJM III.

## Metoda Pengembangan Renstra

Renstra Ditjen Bina Konstruksi 2015-2019 dikembangkan melalui pendekatan sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1. Pada awalnya, pencarian akan identitas organisasi Ditjen Bina Konstruksi dilakukan dengan melihat dasar hukum pembentukan, sejarah pengembangan, serta produk dan kinerja yang telah dicapai sejak pembentukan (dalam hal ini, diwakili oleh produk dan pencapaian kinerja organisasi sebelumnya yaitu BP Konstruksi). Sumber data berupa dokumen-dokumen terkait dengan identitas, produk, dan kinerja menjadi bagian penting dari tahapan ini. Selain itu, kajian akan lingkungan internal dan eksternal dari Ditjen Bina Konstruksi dilakukan secara komprehensif dengan pendekatan *bottom-up*, untuk mendapatkan sebanyak mungkin fakta, harapan, dan pendapat seluruh *stakeholder* yang selanjutnya diformulasikan menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi Ditjen Bina Konstruksi saat ini dan pada masa yang akan datang.



Gambar 1.1. Pendekatan Pengembangan Renstra Ditjen Bina Konstruksi 2015-2019

Dalam pengembangan rencana strategis selanjutnya, kondisi internal dan eksternal tersebut menjadi acuan dalam penetapan cita-cita dan tujuan Ditjen Bina Konstruksi 2015-2019.

Penilaian terhadap kondisi yang ada inioleh pimpinan Ditjen Bina Konstruksi dilakukan untuk memberikan gambaran posisi strategis dari Ditjen Bina Konstruksi saat ini. Dengan membandingkan cita-cita dan tujuan yang telah ditetapkan, maka teridentifikasi permasalahan kritis serta strategi yang harus dilakukan oleh Ditjen Bina Konstruksi untuk berkembang dan berupaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Beberapa permasalahan kritis yang teridentifikasi menjadi bagian penting dalam pengembangan rencana strategi yang digambarkan dalam bentuk peta strategi.

### **Fungsi Renstra 2015-2019**

Rencana Strategis Ditjen Bina Konstruksi 2015-2019 ini merupakan arahan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan dan pengembangan Ditjen Bina Konstruksi dalam jangka waktu 5 tahun mendatang dengan memperhatikan perkembangan Ditjen Bina Konstruksi dan lingkungan strategisnya. Renstra ini akan menjadi dasar penyusunan program pengembangan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Ditjen Bina Konstruksi dalam kurun waktu 2015 hingga 2019.

Arah pengembangan yang ditetapkan dalam Renstra Ditjen Bina Konstruksi 2015-2019 ini menjadi acuan bagi Unit Eselon II serta Balai-balai di lingkungan Ditjen Bina Konstruksi untuk penetapan program pengembangan pada masing-masing unit kerja dan menjadi alat koordinasi pengembangan bersama Ditjen Bina Konstruksi.

### **Sistematika Dokumen Renstra**

Dokumen Renstra Ditjen Bina Konstruksi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Landasan Pengembangan
- Rencana Strategis Ditjen Bina Konstruksi
- Program Strategis

## 2. Landasan Pengembangan

---

### Arah Pembinaan Jasa Konstruksi

Bidang jasa konstruksi saat ini masih menghadapi berbagai permasalahan dimulai dari rendahnya mutu konstruksi, terjadinya disharmoni antar pelaku jasa konstruksi, rendahnya daya saing kontraktor, rendahnya tenaga ahli dan tenaga kerja bersertifikat, semakin tingginya angka kecelakaan kerja, hingga terbatasnya informasi konstruksi. Berbagai permasalahan yang sering terjadi tersebut perlu dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap kebijakan pembinaan konstruksi yang telah dilakukan selama ini. Untuk menciptakan kebijakan pembinaan konstruksi yang lebih fokus dan terarah, telah dilakukan perubahan organisasi Badan Pembinaan Konstruksi yang sebelumnya hanya berkedudukan untuk penajaman dan pendukung, diperluas dalam organisasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Direktorat Jenderal memiliki cakupan urusan pembinaan jasa konstruksi lebih luas dan bersifat strategis serta lebih menuju ke arah perumusan kebijakan dan standarisasi teknis. Perubahan struktur organisasi ini, merupakan langkah awal dalam menyusun arah pembinaan konstruksi kedepannya.

Di sisi lain, seiring dengan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan infrastruktur dan untuk tercapainya ketersediaan infrastruktur yang andal, arah pembinaan konstruksi mulai difokuskan untuk mendukung tiga agenda prioritas sebagaimana yang telah tercantum pada NAWACITayang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan Trisakti. Dalam agenda ini, pembinaan konstruksi diharapkan mampu mendukung pembangunan infrastruktur yang mampu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, serta mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Selain mendukung agenda prioritas pada NAWACITA, arah pembinaan konstruksi pun harus sesuai dengan sebagaimana yang telah diamanatkan pada UU Nomor 18/1999 tentang pembinaan jasa konstruksi yaitu penciptaan iklim pengusahaan, tertib penyelenggaraan, partisipasi masyarakat. Selanjutnya, RPJMN 2015-2019 merupakan salah satu acuan arah pembinaan konstruksi dalam rangka menciptakan tertibnya penyelenggaraan konstruksi, peningkatan produktivitas badan usaha dan tenaga kerja, meningkatnya volume pengusahaan, berkontribusi pada penggunaan dan nilai tambah dalam negeri, serta penguasaan pasar. Sementara itu, kebutuhan pemangku kepentingan yang terkait dengan jasa konstruksi, isu regional & internasional dan daya saing, serta reformasi birokrasi menjadi faktor penting lainnya dalam dasar penentuan arah pembinaan konstruksi kedepannya.

Tujuan akhir dari penentuan arah pembinaan konstruksi ini adalah tercapainya nilai mandiri, daya saing dan nilai tambah bagi konstruksi Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan fokus pelaksanaan pembinaan konstruksi sebagai berikut:

**a. Pengembangan Konstruksi Nasional**

Pengembangan konstruksi nasional meliputi pengaturan usaha jasa konstruksi, pengaturan badan usaha, dukungan regulasi investasi, pengembangan usaha dan kemitraan, dukungan lembaga keuangan untuk akses memperoleh pendanaan, dukungan lembaga pertanggungan untuk akses dalam perolehan jaminan pertanggungan risiko. Semua fokus pembinaan ini ditujukan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing.

**b. Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi**

Pembinaan ini meliputi sistem pengadaan konstruksi, administrasi dan standar kontrak, alternatif penyelesaian sengketa, pengaturan kegagalan konstruksi dan bangunan, sistem manajemen konstruksi, konstruksi berkelanjutan. Semua fokus pembinaan ini ditujukan untuk menciptakan tertib penyelenggaraan konstruksi dan peningkatan kualitas konstruksi.

**c. Pembinaan Produktivitas Badan Usaha dan Sumber Daya Konstruksi**

Pembinaan ini meliputi ketersediaan rantai pasok material, peralatan dan teknologi Konstruksi secara terpadu, kesiapan dan kinerja badan usaha jasa konstruksi, kesiapan dan kinerja kelembagaan konstruksi, serta layanan informasi konstruksi. Semua fokus pembinaan ini ditujukan untuk menciptakan produk konstruksi unggulan.

**d. Pemberdayaan Tenaga Kerja Konstruksi dan Masyarakat**

Pembinaan ini meliputi rantai pasok SDM Konstruksi, standar kompetensi dan produktivitas SDM Konstruksi, kesetaraan tenaga konstruksi nasional di tingkat internasional, kesiapan penyelenggara pelatihan konstruksi, serta SDM Konstruksi yang kompeten. Semua fokus pembinaan ini ditujukan untuk menciptakan kompetensi dan kesadaran masyarakat.

## **Kebijakan Renstra**

Dalam penyusunan Renstra Ditjen Bina Konstruksi 2015-2019, digunakan beberapa perangkat kebijakan yang dapat digunakan sebagai acuan, batasan, dan pertimbangan dalam membuat program-program strategis Ditjen Bina Konstruksi untuk periode 2015-2019. Selain itu, masukan dan pertimbangan dari berbagai pihak terkait yang diperoleh melalui rangkaian FGD (*Focused Group Discussion*) yang dilakukan, terutama yang



menyangkut perundang-undangan dan regulasi baru, sangat penting untuk kelengkapan penyusunan Renstra Ditjen Bina Konstruksi 2015-2019.

Adapun landasan-landasan penting yang menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Ditjen Bina Konstruksi 2015-2019 mencakup peraturan perundang-undangan terkait Jasa Konstruksi, Ketenagakerjaan, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintah Daerah, Kementerian Negara, Kementerian PU, Kinerja Instansi Pemerintah, Renstra Kementerian Pekerjaan Umum 2010-2014, dan Renstra BP Konstruksi 2010-2014. Landasan-landasan penting tersebut, dijabarkan pada **Lampiran I**.

### **Sejarah dan Perkembangan Ditjen Bina Konstruksi**

Organisasi pelaksana pembinaan konstruksimemiliki sejarah yang cukup panjang. Bermula ketika dibentuknya Badan Pembinaan Konstruksi dan Investasi (BAPEKIN) serta Badan Pembinaan Sumber Daya Manusia (BPSDM) pada tahun 2001. Kemudian pada tahun 2005, BAPEKIN dan BPSDM melebur menjadi BPKSDM (Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia), sesuai dengan Perpres No. 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, dimana Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia merupakan 1 dari 9 komponen setingkat Eselon I di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum dan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan di bidang konstruksi dan sumber daya manusia. TUPOKSI terdapat pada Permen PU no 286/PRT/M/2005.

Selanjutnya pada tahun 2010, sesuai Perpres 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara telah dibentuk badan baru di lingkungan Kementerian PU menggantikan BPKSDM dengan nama Badan Pembinaan Konstruksi (BP Konstruksi) yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan setingkat Eselon I dan dilengkapi dengan struktur organisasi yang terdiri atas Sekretariat Badan, Pusat-pusat Pembinaan Konstruksi, serta dilengkapi dengan Balai-Balai sebagai unit pelaksana teknis.

Tujuan dari dibentuknya BP Konstruksi ini antara lain:

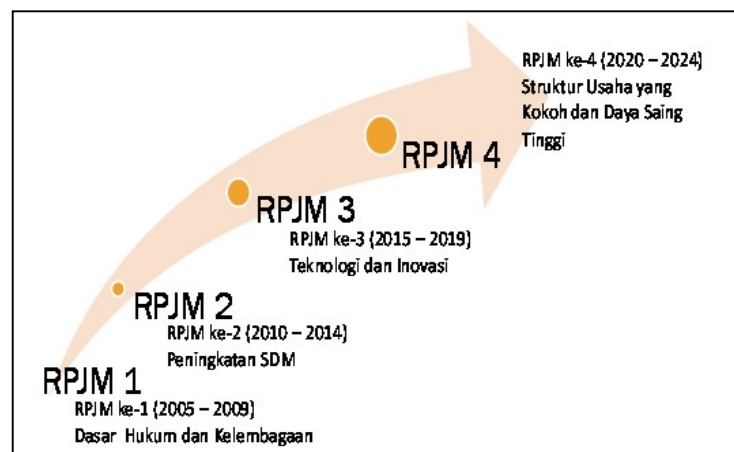
1. Meningkatkan peran serta masyarakat di bidang jasa konstruksi.
2. Meningkatkan Kepatuhan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha konstruksi yang kokoh, andal, dan berdaya saing tinggi.
4. Menjadikan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi tertib sehingga menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban.

5. Mewujudkan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas.

Berdasarkan Permen PU No. 08 Tahun 2010 Pasal 723 Bagian Kedua, susunan organisasi BP Konstruksi terdiri atas Sekretariat Badan; Pusat Pembinaan Usaha dan Kelembagaan; Pusat Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi; Pusat Pembinaan Sumber Daya Investasi; Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi; dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Kemudian dengan perubahan organisasi Kementerian Pekerjaan Umum menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), sebagaimana tertuang pada Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2015 mengenai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dibentuk beberapa Direktorat Jenderal baru di lingkungan Kementerian PUPR dan salah satu diantaranya adalah Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Tujuan dari pembentukan Ditjen Bina Konstruksi tidak berbeda dengan BP Konstruksi, namun yang berubah adalah peranannya menjadi lebih strategis yaitu yang semula sebagai unsur pendukung menjadi unsur pelaksana dalam Kementerian PUPR.

Renstra Ditjen Bina Konstruksi diharapkan dapat menyelaraskan diri dengan pencapaian strategis dari masing-masing Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) guna menjamin ketercapaian secara keseluruhan sasaran strategis rencana jangka panjang, yaitu Roadmap Pembina Jasa Konstruksi 2010-2024. Renstra BP Konstruksi 2010-2014 mendukung ketercapaian sasaran RPJM 2 yaitu melalui pencapaian peningkatan SDM. Sedangkan Renstra Ditjen Bina Konstruksi 2015-2019 berfungsi untuk mendukung pencapaian sasaran RPJM 3.



Gambar 2.1 Tahapan Strategi Nasional (Roadmap) Pembina Jasa Konstruksi 2010-2024

Tahapan pencapaian strategis pembinaan jasa konstruksi menurut Roadmap Pembina Jasa Konstruksi 2010-2024 terbagi atas tiga tahap lima-tahunan (RPJM 2 – RPJM 4), dimana masing-masing tahap memiliki tonggak dan tolak ukur yang perlu dicapai secara berkesinambungan untuk menjaga keberlangsungan pengembangan di masing-masing tahapan. Pada saat ini, entitas Pembina Konstruksi sebagai BP Konstruksi telah melewati RPJM 2 (2010-2014) dengan Renstra BP Konstruksi 2010-2014 dan entitas baru sebagai Ditjen Bina Konstruksi akan dimulai pada RPJM 3 (2015-2019) dengan Renstra Ditjen Bina Konstruksi 2015-2019. Oleh karena itu, sebelum memasuki tahap ketiga, capaian pada tahap kedua perlu dievaluasi kemajuannya untuk menyusun strategi pada RPJM 3.

Gambaran pencapaian RPJM 2 (2010-2014) dapat dilihat pada **Lampiran II**. Data tersebut menunjukkan bahwa target 2010-2014 secara umum telah tercapai sehingga kinerja BP Konstruksi cukup baik. Namun ada dua target outcome Eselon I yang tidak tercapai hingga akhir 2014 yaitu, jumlah SDM Jasa Konstruksi yang terlatih (realisasi 53%) dan persentase tingkat penguasaan pangsa pasar domestik oleh pelaku konstruksi nasional (realisasi 92%). Atas kondisi tersebut, dalam Rencana Strategis Ditjen Bina Konstruksi 2015-2019, target outcome dan output utama Pembinaan Jasa Konstruksi pada RPJM 2 yang belum tercapai, beserta pencapaian target outcome dan output utama RPJM 3 harus menjadi perhatian utama pada Pembinaan Jasa Konstruksi yang akan dilakukan dalam jangka waktu 5 tahun mendatang (2015-2019).

### Analisa Kondisi Internal

Kondisi internal yang mempengaruhi pengembangan organisasi Ditjen Bina Konstruksi, baik berupa kekuatan maupun kelemahan, dikelompokkan kedalam beberapa kelompok aspek, yaitu Aspek Manajemen; Aspek Sosialisasi Produk dan Layanan; Aspek Keuangan; Aspek Operasi dan Produksi serta Mutu Produk dan Layanan; Aspek Penelitian dan Pengembangan; serta Aspek Sistem Manajemen Informasi. Kondisi internal ini berdasarkan pada kondisi Ditjen Bina Konstruksi

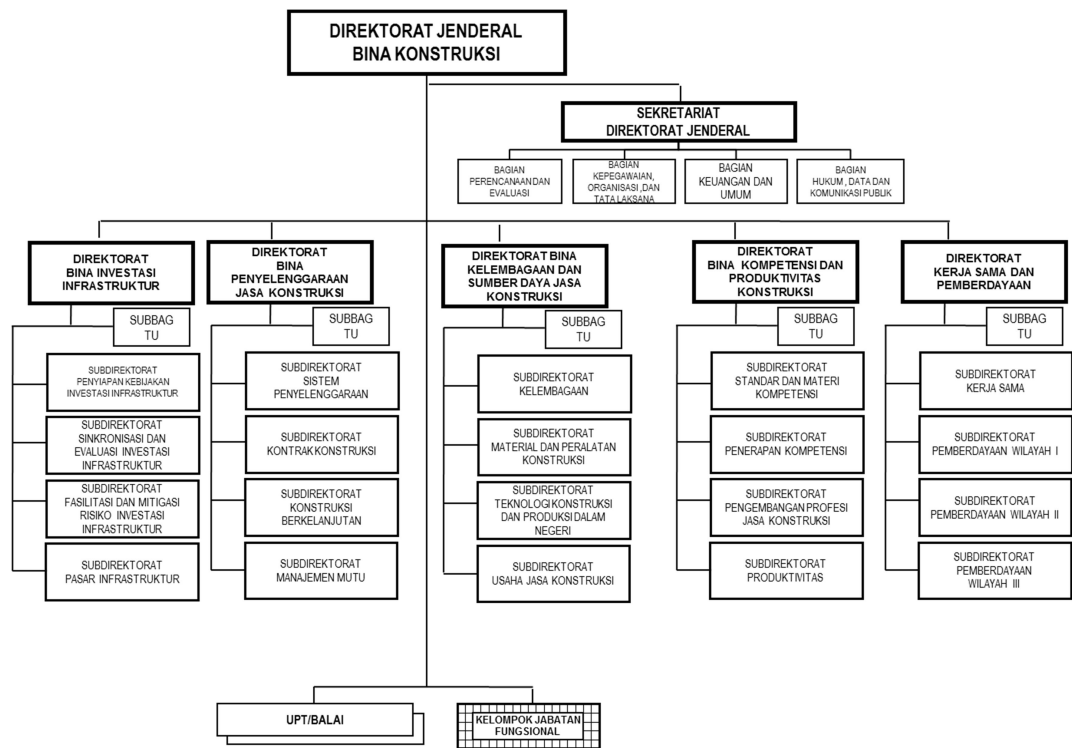
### Kekuatan Ditjen Bina Konstruksi

#### *Aspek Manajemen (Struktur lama tetap ada, disandingkan dengan struktur baru)*

- Disain baru struktur organisasi Ditjen Bina Konstruksi, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.2, memungkinkan tugas-tugas operasi yang sangat rutin dapat dicapai melalui bidang-bidang spesialisasi.
- Struktur organisasi tersebut melengkapi TUPOKSI Ditjen Bina Konstruksi dalam melakukan pembinaan konstruksi seperti yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No./PRT/M/201 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dalam

menjalankan tugasnya, Ditjen Bina Konstruksi memiliki TUPOKSI yang cukup jelas untuk setiap unit kerja-nya.

- Dalam rangka peningkatan kapasitas pembinaan, Ditjen Bina Konstruksi melaksanakan koordinasi secara birokratis sebagai bentuk perencanaan terpusat untuk merumuskan dan melaksanakan sejumlah program demi meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan TUPOKSI-nya.



Gambar 2.2. Struktur Organisasi Ditjen Bina Konstruksi

- Untuk menjalankan program-programnya, Ditjen Bina Konstruksi memberikan pelayanan secara terintegrasi, sinergis, dan terkendali, serta didukung oleh manajemen kepemimpinan yang sangat kuat dalam membangun hubungan kerja yang baik antar staf, hubungan atasan-bawahan serta hubungan eksternal seperti persaingan baik antar maupun inter organisasi, keadaan stabilitas politik, sosial serta politik. Hal tersebut tidak luput dari kinerja pimpinan birokrasi sehingga terciptanya lingkungan kerja yang nyaman dan baik, untuk menyelenggarakan produk dan memberikan pelayanan kepada masyarakat konstruksi.

- Dalam menjalankan TUPOKSI-nya, Ditjen Bina Konstruksi memiliki SDM yang mengalami peningkatan kualitas jika ditinjau dari peningkatan tingkat pendidikan pada periode 2009–2014. Namun dari segi kuantitas SDM mengalami penurunan pada periode yang sama, dikarenakan banyaknya pegawai yang purna bakti. Pada tahun 2014, pelaksanaan TUPOKSI Ditjen Bina Konstruksi dilaksanakan oleh 383 orang PNS yang tersebar di 5 (lima) unit eselon II di lingkungan BP Konstruksi, lebih kecil bila dibandingkan dengan tahun 2009 dimana TUPOKSI yang sama dilaksanakan oleh 479 orang PNS. Klasifikasi PNS di lingkungan BP Konstruksi Tahun 2009 – 2014 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Data SDM Badan Pembinaan Konstruksi 2009- 2014

Tahun	SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	S3	Total
2014	3	0	58	22	206	90	4	383
2013	2	2	60	24	201	80	5	374
2012	2	2	73	28	195	83	5	388
2011	4	2	100	33	197	79	5	420
2010	10	12	147	24	169	87	5	454
2009	19	17	201	52	111	76	3	479

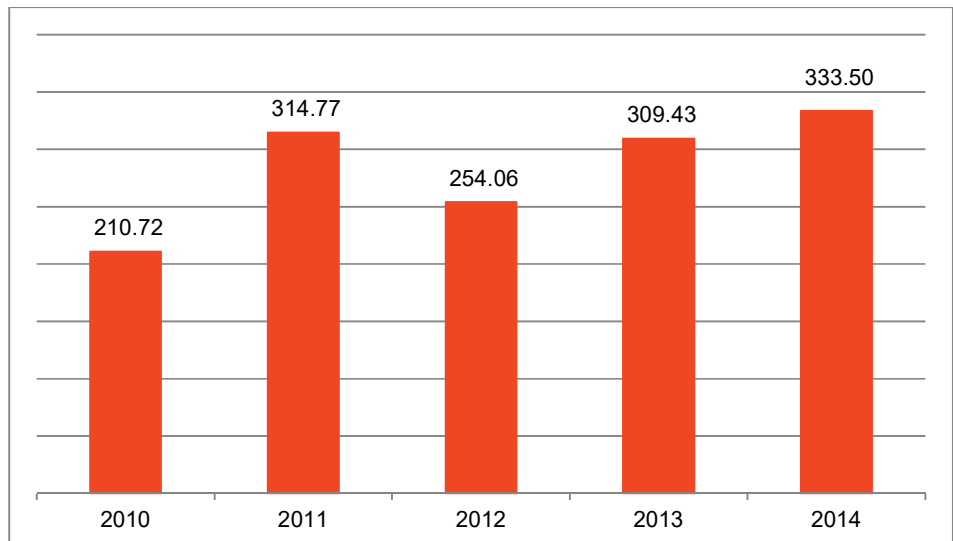
#### *Aspek Sosialisasi Produk dan Layanan*

- Regulasi-regulasi dan program-program yang ada, tidak lepas oleh dukungan berbagai kegiatan sosialisasi sehingga dapat disebarluaskan dan diterima oleh masyarakat konstruksi secara luas, dimana sosialisasi-sosialisasi tersebut sudah dilakukan oleh masing-masing pusat, dengan jaringan kerja yang dimilikinya.
- Kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan mencakup seminar, pelatihan, forum, bimbingan teknis, penilaian kinerja, monitoring dan evaluasi, dan sistem informasi yang ada. Salah satu bentuk sosialisasi dari produk Ditjen Bina Konstruksi, dilakukan dalam bentuk pemasaran melalui berbagai media (buletin termasuk event pameran konstruksi) dan kegiatan hasil kerja sama

dengan stakeholder konstruksi lainnya, Kegiatan sosialisasi yang telah dan rutin dilakukan, dijabarkan pada **Lampiran III**.

### *Aspek Keuangan*

- Kegiatan pembinaan Ditjen Bina Konstruksi didukung oleh kepastian anggaran baik APBN maupun APBD.
- Disamping kepastian anggaran, selama kurun waktu 5 tahun terakhir, anggaran BP Konstruksi mengalami kenaikan. Pada tahun 2010, jumlah anggaran BP Konstruksi mencapai Rp. 314,77Miliar dan kemudian meningkat menjadi Rp. 333,50Miliar pada tahun 2014. Pada tahun 2015, alokasi Ditjen Bina Konstruksi mencapai Rp. 722,90 Miliar.



Grafik2.1.Anggaran BP Konstruksi2009 – 2014 (dalam miliar rupiah)

### *Aspek Operasi dan Produksi serta Mutu Produk dan Layanan*

- Program kerja yang dibuat cukup memadai dan jelas, dimana program dan kegiatan Ditjen Bina Konstruksidisampaikan pada Tabel 2.2.
- Produk dan layanan Ditjen Bina Konstruksi mencakup penerbitan regulasi-regulasi yang memayungi dan menjadi landasan yuridis penyelenggaraan konstruksi serta program-program pembinaan, sebagaimana dimandatkan dalam Undang-Undang No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 30 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi.

*Aspek Penelitian dan Pengembangan*

- Kegiatan penelitian dan pengembangan sudah dilakukan untuk mendukung pengembangan regulasi.

*Aspek Sistem Manajemen Informasi (Disandingkan dengan produk-produk lama)*

- Sudah ada sistem manajemen informasi yang telah dikembangkan oleh masing-masing Direktorat dengan tujuannya masing-masing. Kemajuan di bidang teknologi dan informasi memberikan banyak kemudahan, namun juga menimbulkan banyak tuntutan dari para pemangku kepentingan, misalnya transparansi informasi, ketersediaan informasi, serta layanan informasi yang lengkap dan gampang diakses. Teknologi informasi di setiap organisasi perlu dikembangkan untuk menjamin ketersediaan data dan informasi yang berkelanjutan, berkualitas, terkini dan kemudahan diakses. Ditjen Bina Konstruksi dalam menjalankan fungsinya memiliki beberapa media informasi yang tersedia yang dapat diakses berupa Website BP Konstruksi, SISDI, SIPJAKI, yang dapat membantu dalam meningkatkan pelayanan publik, menyajikan data yang dimiliki, memantau efektivitas regulasi/kebijakan, serta membantu penerapan *good governance*.

Tabel 2.2. Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

NAMA UNITESELON II	KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
<b>PROGRAM PEMBINAAN KONSTRUKSI</b>			
Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Penyelenggaraan Pelayanan Teknis dan Administrasi Pembinaan Jasa Konstruksi		
Direktorat Bina Investasi Infrastruktur	Pembinaan Investasi Infrastruktur	Meningkatnya kapitalisasi konstruksi oleh investor nasional	Peningkatan rasio kapitalisasi konstruksi oleh investor nasional
Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi	Meningkatnya tertib penyelenggaraan konstruksi	Persentase kenaikan tingkat tertib penyelenggaraan konstruksi
Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi	Pembinaan Kelembagaan dan Sumberdaya Jasa Konstruksi	Meningkatnya persentase BUJK yang berkualifikasi besar	Persentase kenaikan BUJK menjadi berkualifikasi B2
		Meningkatnya utilitas produk unggulan	Persentase kenaikan tingkat utilitas produk unggulan

Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	Meningkatnya SDM penyedia jasa konstruksi yang kompeten	Persentase kenaikan SDM penyedia jasa konstruksi yang kompeten
Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan	Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi		



### Kelemahan Ditjen Bina Konstruksi

#### *Aspek Manajemen*

- Sistem pembinaan jasa konstruksi belum jelas keterkaitannya antara pusat dan daerah, disertai belum adanya penyamaan persepsi antara keduanya dalam pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi. Unit struktural pembina jasa konstruksi daerah yang telah terbentuk belum seluruhnya efektif. Hal ini terjadi di antaranya karena PP 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa pembinaan jasa konstruksi termasuk dalam rumpun urusan pekerjaan umum. Selain itu, petunjuk teknis mengenai pembentukan unit struktural pembina jasa konstruksi di daerah belum tersedia dan Tim Pembina jasa konstruksi di tingkat pusat sesuai PP 30/2000 yang bertugas untuk mengkoordinasikan pembinaan jasa konstruksi antar Kementerian dan Lembaga sudah terbentuk namun belum optimal hasilnya.
- Organisasi pembinaan jasa konstruksi di daerah belum memiliki otoritas yang memadai. Kenyataan yang terkait dengan otonomi daerah Pembina Jasa Konstruksi Provinsi belum sepenuhnya dapat melaksanakan tugas dari pusat serta belum optimal dalam melaksanakan pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini dikarenakan sebagian besar Pembina Jasa Konstruksi Provinsi masih memiliki keterbatasan dalam hal perangkat SDM yang memadai dan kompeten untuk melakukan pembinaan di daerah.
- Efektifitas perencanaan terpusat masih rendah karena ego masing-masing direktorat. Program kerja tidak dilaksanakan secara efektif dan tidak sepenuhnya mengacu pada roadmap, serta roadmap yang ada dirasakan belum efisien. Program hanya untuk mencapai hasil jangka pendek dan tidak sepenuhnya saling terkait/sinkron. Agenda dan program kerja tidak jelas dan implementasinya dinilai kurang baik. Hal ini dibuktikan dengan program kerja yang semestinya dicapai/direalisasikan di RPJM Tahap I dan II, dan sesuai dengan Roadmap namun belum terealisasi.
- Sistem monitoring dan evaluasi kinerja masing-masing eselon II masih terfokus pada administrasi disertai ketidakjelasan unit-unit pelaksana pengawasan.
- Siklus manajemen SDM masih lemah, terutama posisi-posisi menengah yang tidak diisi oleh SDM yang memiliki pengalaman lapangan yang memadai. SDM untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang ada, tidak memiliki kuantitas maupun kompetensi yang tepat. Status pada akhir tahun 2014, pegawai Ditjen Bina Konstruksi didominasi oleh dua kelompok besar yang masih masuk dalam usia produktif yaitu: usia 26-30 dan usia 31-35 sebanyak 46%. Pada kelompok kedua usia 46-50, 51-55 dan 56-60 (mendekati purna bhakti) total

sebanyak 37%. Dari data pegawai ini, terdapat potensi kekurangan SDM di masa mendatang.

### *Aspek Sosialisasi Produk dan Layanan*

- Belum ada upaya sosialisasi yang terintegrasi (pembentukan unit khusus sosialisasi) baik di Ditjen Bina Konstruksi dan di daerah.
- Media sosialisasi yang ada masih terbatas dan belum efektif.
- Kurang secara kualitas muatan atas produk regulasi, layanan, langkah-langkah pengembangan Jasa Konstruksi, data mengenai kondisi eksisting industri konstruksi dan daya saingnya, serta belum tepat sasaran.
- Terbatasnya jangkauan sosialisasi ke pemangku kepentingan (stakeholder) sehingga terjadi perbedaan persepsi atas pembinaan yang dilakukan masing-masing stakeholder.
- Kurang koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan sosialisasi produk dan layanan, termasuk dengan lembaga keuangan.

### *Aspek Keuangan*

- Belum optimalnya dukungan pembiayaan yang konsisten untuk mendukung administrasi keuangan yang tepat waktu dan penyerapan keuangan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Hal tersebut disebabkan masih belum disiplinnya antara perencanaan pelaksanaan, perencanaan penyerapan keuangan, dan dinamika perubahan lokasi yang menjadi kebijakan pimpinan.
- Belum optimalnya kapasitas dan kompetensi SDM keuangan dalam pelaksanaan anggaran untuk mengimbangi kemungkinan peningkatan alokasi anggaran Program Pembinaan Konstruksi setiap tahunnya.
- Anggaran pembinaan jasa konstruksi di daerah tidak memadai. Kebijakan penghematan anggaran APBN-P menyebabkan target kegiatan-kegiatan pembinaan konstruksi berkurang. Penghematan anggaran tersebut juga berdampak pada tidak memadainya pembinaan jasa konstruksi di daerah. Selain itu, terdapat keengganan dari pemerintah daerah sendiri dalam pengalokasian anggaran, misalnya dalam bidang pembinaan badan usaha dan tenaga kerja konstruksi. Badan usaha dan tenaga kerja bersifat dinamis dan mobile, sehingga dipandang jika sudah mencapai kemampuan tertentu biasanya mereka akan mencari peluang baru yang lebih menjanjikan di tempat lain. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten/kota relatif enggan untuk menginvestasikan dananya.
- Belum mampu memanfaatkan potensi kerja sama dengan pihak swasta yang lebih luas.

### *Aspek Operasi dan Produksi serta Mutu Produk dan Layanan*

- Implementasi SOP masih lemah. Belum lengkapnya Standar Operating Procedure (SOP) dalam pelaksanaan tugas masing-masing Bagian menyebabkan lemahnya organisasi. Proses pengembangan SOP penting untuk kesuksesan implementasi dari perencanaan baik Jangka Menengah (RPJM dan Renstra) maupun Jangka Panjang (Roadmap). Ini seharusnya menjadi proses yang tidak terpisahkan dengan mempertimbangkan masukan dari setiap pegawai internal maupun eksternal yang menentukan kesuksesan prosedur. Manajemen yang membuat prosedur tanpa masukan dari staf akan mengalami resiko berupa kerugian pekerja dan menghasilkan SOP yang buruk. Manajemen yang mencatat masukan dari staf dan penasehat teknis akan meningkatkan keuntungan dari kesempatan yang penting untuk membantu perkembangan kerja tim.
- Program kerja tidak terlaksana secara efektif karena persiapan yang tidak memadai dan tidak fokus pada sasaran program.
- Pemenuhan sarana dan prasarana masih belum responsif.
- Produk Regulasi masih diwarnai masalah. Banyaknya undang-undang yang terkait dengan undang-undang jasa konstruksi. Terdapat hampir 40 undang-undang dan undang-undang tersebut banyak yang tersebar lintas kementerian yang tidak bersinergi (Sulistijo, 2013).
- Kapasitas pembinaan di daerah belum sesuai dengan kebutuhan.
- Saat ini proses pengembangan regulasi masih bersifat *ad hoc*, dan belum ada mekanisme baku dan kebijakan nasional dalam pengembangan terkait jasa konstruksi.

### *Aspek Penelitian dan Pengembangan*

- Pelaksanaan litbang bermasalah, dalam hal ini terkait dengan ketersediaan SDM untuk litbang sehingga sering dilakukan alih daya.
- Fungsi dan peranan litbang belum dirasakan.
- Partisipasi dan kerja sama dengan pihak terkait belum memadai oleh litbang untuk melakukan riset terkait pembinaan konstruksi. Alasan yang mengemuka adalah minimnya pembiayaan R&D Litbang Pemerintah (0.066 % GDP), disamping partisipasi swasta dalam R&D yang diperkirakan sangat kecil. Dengan merujuk berbagai laporan riset (a.l. Global Competitiveness Report), ketidaksiapan Indonesia berinovasi, kemandirian dalam pengembangan teknologi, atau keengganan pelaku bisnis swasta berinvestasi dalam R&D juga dijadikan alasan yang lain.

### *Aspek Sistem Manajemen Informasi*

- Sistem informasi internal Pembinaan Konstruksi belum terintegrasi secara optimal, masih terfragmentasi dalam masing-masing unit eselon 2 baik dari sisi sistem informasi, pengelola, maupun databasenya.
- Data pembinaan konstruksi yang ada di dalam Sistem informasi masih terdapat duplikasi, tidak *update*, belum akurat, atau belum lengkap.
- Unit yang menangani Data dan Informasi masih setingkat Eselon 4 dan memiliki sumber daya manusia dengan latar belakang Teknik Informatika yang sangat terbatas.
- Belum tersedia tata kelola manajemen sistem informasi dalam aturan yang formal/baku misalnya Peraturan Kepala Badan/Direktur Jenderal.
- Belum tersedia sumber data yang besar (*Big Data*) yang tersedia secara terstruktur (*data warehouse*) yang menjadi rujukan data sektor jasa konstruksi nasional untuk disajikan dan diolah dalam sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi.
- Metode delivery data dan informasi masih belum disiapkan dengan memperhatikan tingkatan kepentingan pemakai (pemangku kebijakan, aparatur pelaksana, dunia usaha, tenaga kerja dan masyarakat umum), format/tampilan informasi yang *user friendly*, *analisis/statistic* yang dibutuhkan maupun media penyaluran/channel (*web, mobile*, dll).
- Tidak terintegrasinya sistem manajemen informasi eksternal misalnya dengan LPJK, BPS, dll. yang ada

### **Analisa Kondisi Eksternal**

Kondisi eksternal yang dapat mempengaruhi pengembangan organisasi Ditjen Bina Konstruksi, baik berupa peluang maupun ancaman, dikelompokkan kedalam beberapa kelompok aspek, yaitu Aspek Ekonomi; Aspek Sosial, Budaya, Demografi, dan Lingkungan; Aspek Politik, Hukum, dan Pemerintahan; Aspek Perkembangan Teknologi; Aspek Iklim Persaingan; serta Aspek Stakeholders.

### **Peluang untuk Pengembangan**

#### *Aspek Ekonomi*

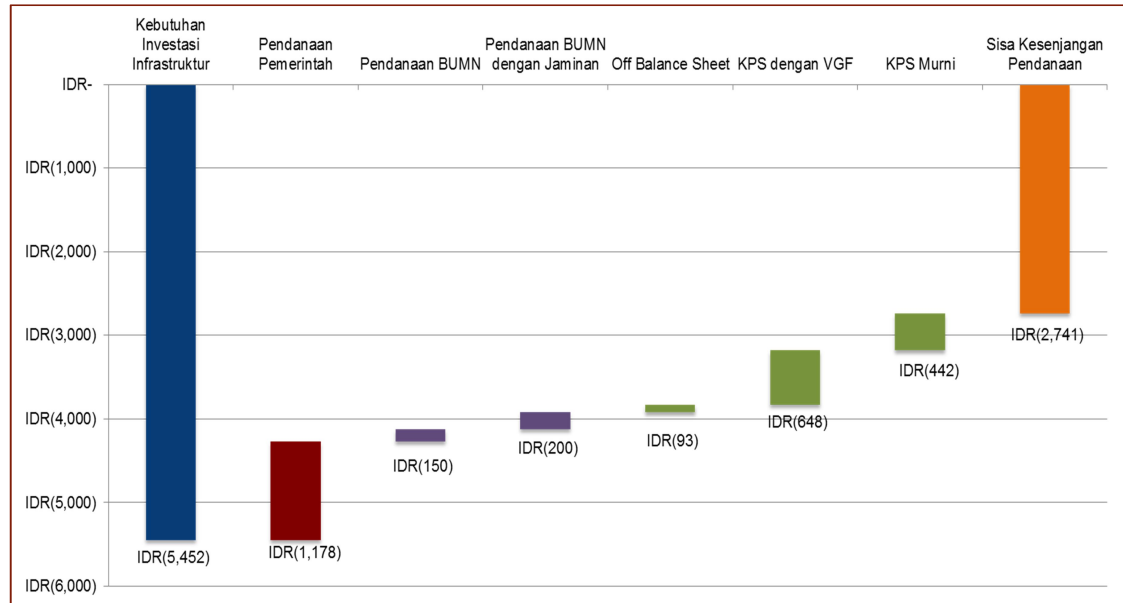
- Pada tahun 2015, pasar konstruksi Indonesia cukup besar yakni 70% dari pasar konstruksi ASEAN, terutama untuk infrastruktur sehingga menjadi daya tarik bagi investor asing. Selain itu, kebutuhan Investasi infrastruktur di Indonesia sangat besar, diperkirakan bahwa investasi infrastruktur di RPJMN

2015-2019 akan mencapai kurang lebih Rp5.452 Triliun, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.3 (data Bappenas, 2014).

Keperluan Investasi Infrastruktur RPJMN 2015-2019 (triliun rupiah)		
Sektor	Skenario Penuh (100%)	Skenario Parsial (75%)
Jalan Raya	1,274	851
Perkeretaapian	278	222
Transportasi Perkotaan	155	115
Transportasi Laut	563	424
Ferry dan ASDP	91	80
Transportasi Udara	182	165
Ketenagalistrikan	1,080	762
Energi dan Gas	535	420
Sumber Daya Air	1,091	845
Cipta Karya (Air Bersih dan Limbah)	666	450
Cipta Karya (Perumahan Rakyat)	384	247
Teknologi Komunikasi dan Informatika	242	200
<b>Jumlah Keperluan Investasi</b>	<b>6,541</b>	<b>4,781</b>
<b>Kebutuhan Investasi (prioritas)</b>	<b>5,452</b>	
<b>Kebutuhan Investasi bidang ke-PUPR-an (prioritas)</b>	<b>2,746</b>	

Tabel 2.3. Perkiraan Keperluan Investasi Infrastruktur RPJMN 2015-2019 (dalam triliun rupiah)

- Besarnya biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur tersebut, tentu menjadi permasalahan tersendiri terkait dengan sumber pendanaannya karena keterbatasan pendanaan pemerintah. Namun demikian, pemerintah perlu melibatkan dukungan pihak swasta dalam pembiayaan konstruksi diantaranya melalui skema pembiayaan proyek Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) atau Public Private Partnership (PPP), sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.3.



Gambar 2.3. Strategi Pembiayaan Infrastruktur 2015-2019

- Selain besarnya pasar dalam negeri, terbukanya MEA 2015 akan membuka pasar konstruksi lebih luas ke luar negeri sehingga berpotensi meningkatkan kontribusi atas PDB. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, bahwa sejarah kontribusi sektor konstruksi terhadap PDB terus meningkat dari hanya sebesar 3,9% di tahun 1973 hingga sebesar 9,90% dari PDB tahun 2014. Peningkatan tersebut disertai peningkatan jumlah perusahaan konstruksi dimana pada akhir tahun 2014 telah mencapai 110.426 perusahaan. Jumlah tenaga kerja yang diserap juga meningkat dari 5.44 Jt pada tahun 2009, menjadi 6.9 Jt pada tahun 2013.
- Stabilitas dan pertumbuhan makro ekonomi yang baik. Semua fakta tersebut di atas, juga didukung dengan pembangunan Infrastruktur struktur di Indonesia yang secara tidak langsung akan mendukung perbaikan ekonomi global, karena dengan adanya pembangunan maka akan ada daya beli yang cukup besar sehingga dapat mendorong membaiknya ekonomi global. Beberapa peluang yang dimiliki oleh Indonesia terkait dengan kondisi perekonomian global saat ini, antara lain perekonomian Indonesia masih mungkin untuk terus berkembang mengingat populasinya yang sangat besar, yakni mencapai 3.5 % dari populasi dunia. Selain itu pertumbuhan domestik yang kuat dari kelas menengah, sehingga lebih sedikit dipengaruhi oleh ekonomi global dibandingkan negara lain.

### *Aspek Sosial, Budaya, Demografi, dan Lingkungan*

- Meningkatnya jumlah penduduk kelas menengah yang menyebabkan meningkatnya nilai proyek konstruksi khususnya untuk properti.
- Meningkatnya concern masyarakat akan konstruksi yang ramah lingkungan (RAN MAPI, Green initiatives dll).

### *Aspek Politik, Hukum, dan Pemerintahan*

- Sudah ada affirmative action dari Kementerian ESDM yang dapat dijadikan sebagai model sehingga dimungkinkan BUJK untuk berkembang dan asosiasi berhak melaporkan jika ada pelanggaran dalam hal kontrak.
- Kondisi politik yang ada dirasakan kondusif untuk percepatan pembangunan
- Sistem demokrasi yang ada membuka kesempatan seluas-luasnya dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan konstruksi.
- Sudah adanya regulasi yang melindungi produsen dan konsumen dalam negeri (UUJK, UU Penanaman Modal dan UU Perlindungan Konsumen serta pengaturan pengadaan dan peraturan mengenai pengutamaan penggunaan produk produksi dalam negeri).

### *Aspek Perkembangan Teknologi*

- Perkembangan teknologi yang sangat pesat yang diimbangi oleh penguasaan teknologi nasional cukup baik sehingga pengembangan teknologi nasional cukup baik. Hal ini terlihat dari bangunan-bangunan landmark yang kolosal dan infrastruktur yang kokoh tersebar di wilayah Indonesia merupakan bukti penguasaan dan pengembangan teknologi nasional.
- Penelitian dalam hal teknologi konstruksi yang dilakukan oleh pakar/masyarakat intelektual, LPJK dan lainnya sangat sensitif terhadap perkembangan yang ada.

### *Aspek Iklim Persaingan*

- Dengan adanya MEA 2015, maka akan membuka kesempatan untuk masuk ke pasar ASEAN dengan tetap menjaga bagi penguasaan pasar konstruksi oleh penyedia jasa konstruksi lokal yang ditunjang oleh kualitas SDM-terampil dan ahli-Indonesia.

### *Aspek Stakeholders*

- Stakeholders semakin menyadari pentingnya dunia konstruksi.
- Pada 2016 akan dilakukan sensus ekonomi oleh BPS, diharapkan para BUJK dapat memberikan data yang riil.
- Kebutuhan sebagai tim penilai ahli oleh lembaga lain atau stakeholders cukup tinggi.

### Ancaman untuk Pengembangan

#### *Aspek Ekonomi*

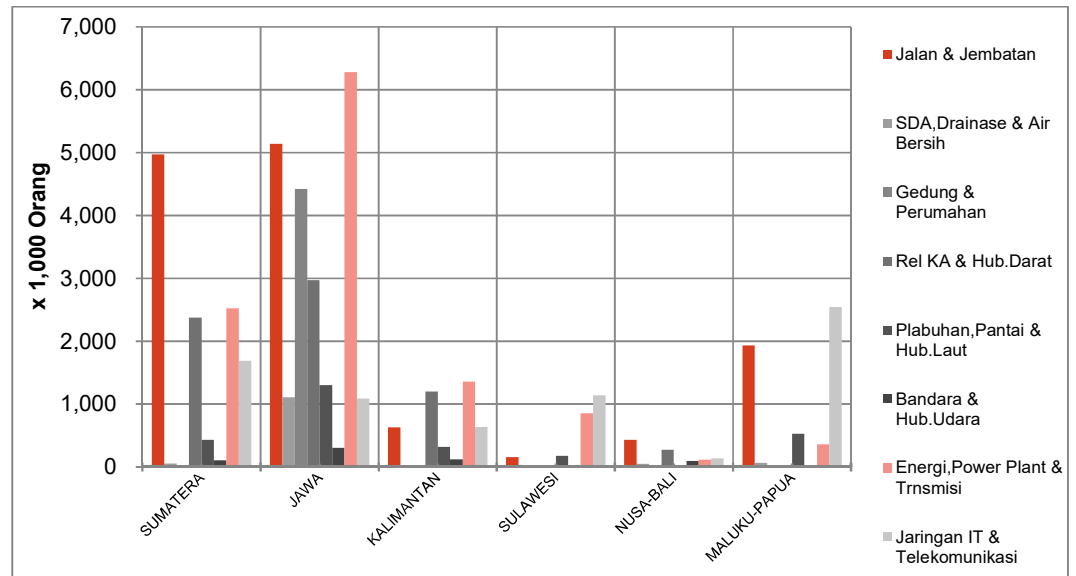
- Krisis ekonomi global, terutama karena nilai tukar rupiah yang rendah disamping Indonesia merupakan negara pengimpor baik bahan baku maupun siap pakai sehingga ketergantungan atas nilai tukar rupiah dan impor cukup tinggi.
- Keterbatasan pendanaan oleh negara terhadap besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur serta pembiayaan oleh publik untuk pembangunan infrastruktur masih rendah. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa adanya dukungan swasta terhadap pembiayaan konstruksi. Hal ini dikarenakan keterbatasan pendanaan oleh negara terhadap besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur, namun persentase pembiayaan oleh publik tersebut untuk pembangunan infrastruktur masih rendah.
- Kemampuan modal penyedia jasa konstruksi masih rendah/lemah, ditambah suku bunga bank dirasakan masih tinggi dan Pemerintah belum memfasilitasi pinjaman modal kredit untuk UKM. Hasil survei menunjukkan bahwa pengusaha di sektor konstruksi masih menganggap cukup sulit dalam menjalankan bisnisnya yang ditunjukkan dengan nilai indeks untuk akses kredit terus turun dari 70 hingga kurang dari 40, dan suku bunga terus turun dari 40 hingga 10 pada periode 2004-2010, (BPS, 2010). Berdasarkan hasil survei BPS tersebut, masalah utama yang dihadapi oleh para pengusaha di sektor konstruksi adalah tidak stabilnya harga bahan bangunan, penurunan permintaan, dan tingkat persaingan yang tinggi, serta kesulitan dalam mendapatkan dukungan modal dari perbankan terutama untuk kontraktor kecil. Tidak hanya itu, kontraktor juga harus menghadapi pembayaran yang sering molor sangat lama atau tidak sesuai perjanjian bahkan terkadang tidak dibayar, dan bagi kontraktor kecil juga sulit untuk mendapatkan kepercayaan dari kontraktor utama (Gendroyono, 2012).

#### *Aspek Sosial, Budaya, Demografi, dan Lingkungan*

- Indonesia merupakan negara yang luas yang menyebabkan tingginya nilai infrastruktur yang harus dibangun, dan harus disertai dengan sebaran kualitas dan kuantitas SDM daerah yang memadai. Oleh karenanya, muncul tantangan peningkatan kebutuhan SDM Konstruksi berbagai koridor ekonomiyang berkompeten untuk bekerja di bidang infrastruktur pekerjaan umum, permukiman, transportasi, energi dan telekomunikasi di berbagai daerah.



Grafik2.2 menunjukan permintaan terhadap SDM Konstruksi tersebut di berbagai daerah.



Grafik2.2. Permintaan SDM Kontruksi di Berbagai Daerah(Pusbin KPK BP Konstruksi, Konsep Consolidated Position Paper)

- Di daerah banyak terdapat permasalahan sosial dan budaya. Sebagai contoh, Indonesia saat ini masih ada 81 daerah yang berebut batas wilayah dengan banyak faktor yang melatarbelakangi konflik tersebut, diantaranya ingin menguasai sumber daya ekonomi serta penduduk daerah lain (Aviliani, 2013).

#### *Aspek Politik, Hukum, dan Pemerintahan*

- Untuk saat ini sektor konstruksi belum menjadi mainstream pembangunan ekonomi, sehingga prioritas terhadap sektor konstruksi nasional rendah, padahal sektor konstruksi merupakan salah satu sektor perekonomian yang penting di Indonesia karena berbagai kegiatan ekonomi masyarakat memerlukan bangunan sebagai infrastruktur dan prasarana yang menjadi pembentuk modal tetap (gross fixed capital formation). Di berbagai negara, sektor jasa konstruksi berkontribusi terhadap Gross Fixed Capital Formation sekitar 70%-80% (Agenda Konstruksi 2030). Sektor konstruksi berkontribusi cukup besar terhadap PDB nasional, antara 8 sampai 10 persen (Suraji et al, 2011) dan memberikan kesempatan kerja bagi lebih dari 5 juta tenaga kerja langsung dan lebih dari 10 juta harian (BPS, 2010) melalui badan usaha konstruksi baik sebagai konsultan, kontraktor, pemasok material dan peralatan

konstruksi maupun pemasok tenaga kerja. Selain sebagai penyumbang produk domestik bruto yang signifikan bagi negara, keluaran (output) sektor Konstruksi merupakan masukan (input) bagi sektor-sektor perekonomian lainnya sehingga perannya vital dalam penentu perkembangan dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi lainnya.

- Birokrasi yang menghambat dan budaya korupsi yang tinggi. Dari sektor konstruksi, proses pengadaan pekerjaan konstruksi oleh non-pemerintah mengindikasikan adanya perikatan kesepakatan para kontraktor secara terselubung dan juga cenderung berupaya untuk mempengaruhi/mengatur proses tender.
- Penegakan hukum terhadap tertib pelaksanaan dan pemanfaatan atas regulasi-regulasi tersebut masih belum tegas. Sebagai contoh, terkait dengan keterbatasan kesempatan usaha bagi kontraktor skala kecil dan subkontraktor dimana sebenarnya peraturan perundangan cukup melindungi subkontraktor, namun karena tidak adanya sanksi yang tegas terhadap pelaku, maka banyak timbul permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan subkontrak (Gendroyono, 2012).
- Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan terkait dengan konstruksi, namun secara keseluruhan peraturan tersebut tidak terlalu spesifik sehingga dirasakan masih lemah dan sering kali menimbulkan masalah.
- Belum adanya harmonisasi dan koordinasi antara kementerian PUPR dengan kementerian lain yang berkaitan dengan sektor konstruksi (Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, dan lain-lain) tidak memiliki suatu badan yang khusus mengatur, mengawasi, membina jasa konstruksi/ industri konstruksi).
- Rendahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
- Adanya otonomi daerah secara tidak langsung dapat menyebabkan program yang dilaksanakan tidak berkelanjutan. Dengan adanya pergantian kepala daerah, maka terkadang program yang sedang berjalan dari periode sebelumnya tidak dijalankan lagi pada periode pemerintahan yang baru dengan berbagai alasan, sehingga sering kali suatu kegiatan atau program terhenti ditengah jalan dan tidak ada hasilnya.

### *Aspek Perkembangan Teknologi*

- Pelaku jasa konstruksi juga masih lemah dalam mengadopsi perkembangan teknologi yang ada terutama pada kontraktor-kontraktor kecil yang jumlahnya mencapai 87% dari jumlah kontraktor yang ada di Indonesia.

Dapat dibayangkan bagaimana perkembangan teknologi hanya bisa disentuh oleh kontraktor-kontraktor besar saja.

#### *Aspek Iklim Persaingan*

- Pelaku jasa konstruksi nasional harus menghadapi persaingan yang cukup berat dengan pelaku jasa konstruksi asing yang akan mudah masuk ke pasar konstruksi nasional dengan adanya MEA 2015. Lemahnya kondisi pelaku pasar konstruksi di Indonesia, akan memudahkan pelaku jasa konstruksi asing untuk merebut pasar dalam negeri. Saat ini jumlah pelaku jasa konstruksi asing dari negara-negara Asia, Eropa dan USA yang beroperasi dan teregistrasi di Indonesia, baik konsultan maupun kontraktor terus bertambah sejak tahun 2004. Tabel 2.4 berikut ini menunjukkan peningkatan jumlah perusahaan konsultan dan kontraktor asing di Indonesia. Selanjutnya Tabel 1.5 menunjukkan peningkatan jumlah perusahaan konsultan dan kontraktor dari negara-negara Asia dari tahun 2005.

Tabel 2.4. Jumlah Perusahaan Konsultan dan Kontraktor Asing di Indonesia

Tahun	2004	2006	2008	2010	2012	2014
<b>BUJK ASEAN</b>	-	7	14	14	16	14
<b>BUJK NON-ASEAN</b>	103	160	181	193	239	276
<b>Total BUJKA</b>	<b>103</b>	<b>167</b>	<b>195</b>	<b>207</b>	<b>255</b>	<b>290</b>

Tabel 2.5. Jumlah Perusahaan Konsultan dan Kontraktor ASIA di Indonesia

Tahun	2006	2008	2010	2012	2014
<b>Total BUJK Jepang</b>	80	77	74	80	92
<b>Total BUJK Cina</b>	9	30	32	39	65
<b>Total BUJK Korea</b>	11	19	33	60	61
<b>Total BUJK India</b>	2	-	1	5	7

- Dari kedua tabel di atas, dapat dilihat peningkatan jumlah kontraktor asing yang ada di Indonesia, apalagi dengan adanya MEA 2015 tentu peningkatan tersebut akan semakin signifikan, bersaing dengan perusahaan konstruksi lokal dalam memperebutkan pasar konstruksi dalam negeri.

#### *Aspek Stakeholders*

- Belum adanya kolaborasi antara lembaga penelitian dan pengembangan Konstruksi Indonesia.

- Kondisi pelaku pasar konstruksi yang masih lemah. Hal ini terlihat dari ketimpangan struktur pasar dan industri konstruksi, dimana 85% nilai pasar konstruksi dikuasai oleh kontraktor besar, sedangkan 15% sisa dari nilai pasar konstruksi diperebutkan oleh kontraktor kecil. Padahal jumlah kontraktor besar hanya 13% sedangkan 87% nya adalah kontraktor kecil. Sehingga persaingan usaha di pasar konstruksi untuk nilai kontrak yang kecil menjadi tidak sehat dan terdistorsi (Tamin, 2012). Selain itu, kontraktor general atau umum masih mendominasi struktur industri konstruksi nasional. Spesialisasi usaha jasa konstruksi masih belum berkembang. Hal ini dikarenakan spesialisasi dipandang akan mempersempit peluang usaha (Konsep Consolidated Position Paper, 2012). Jumlah kontraktor kecil lebih banyak bersifat kontraktor general; jumlah kontraktor swasta dan daerah sedikit; dan jumlah kontraktor spesialis hampir tidak ada (Tamin, 2012).
- Koordinasi dan kerja sama oleh berbagai pihak stakeholders masih rendah.
- Lemahnya penyelenggaraan peran masyarakat jasa konstruksi dalam melaksanakan pengembangan jasa konstruksi melalui LPJK.
- Enforcement dan awareness terhadap pembinaan oleh stakeholders masih rendah (Kegiatan pembinaan hanya dianggap sebagai kegiatan pelengkap, bukan sebagai kegiatan pokok).
- Kondisi sektor konstruksi juga diperburuk dengan masih banyaknya tenaga kerja konstruksi lepas diluar binaan BUJK. Jumlah tenaga kerja lepas (outsourcing) yang sangat banyak, dimana pembinaan dan pengembangannya tidak jelas siapa penanggungjawabnya. Sebagai gambaran, pada tahun 2011 SDM Konstruksi yang terserap sebesar 6.339 Juta, dimana terdiri atas 10% ( $\pm$  633.9 ribu) Tenaga Ahli, 30% (1.901 Juta) Tenaga Terampil, dan 60% (3.803 Juta) semi dan non terampil, sedangkan pada tahun yang sama, jumlah tenaga tetap yang terdaftar pada BUJK adalah 116,031 Tenaga Ahli dan 301,332 Tenaga Terampil, sedangkan di luar angka tersebut merupakan tenaga outsourcing. Dari perbandingan angka SDM Konstruksi yang terserap dengan yang terdaftar sebagai pekerja tetap di BUJK, terdapat gap yang sangat besar yang berarti jumlah pekerja tidak tetap sangat besar ( $\pm$  2.118 Juta dengan 517.950 ribu Tenaga Ahli dan 1.6 Juta Tenaga Terampil) dan gap tersebut akan lebih besar lagi bilamana dikaitkan dengan supply (tidak diketahui potensinya namun secara kuantitas lebih besar dari yang terserap).
- Masih ada regulasi yang belum dikeluarkan.
- Kegiatan litbang masih terbatas dan belum mencakup isu-isu terkini.

### 3. Garis Besar Rencana Strategis Ditjen Bina Konstruksi

#### Sasaran Rencana Strategis (diawali sasaran strategis dari PU)

Memperhatikan analisis situasi baik internal dan eksternal, maka tujuan Ditjen Bina Konstruksi pada 2019 diwujudkan melalui pencapaian 5 sasaran program berikut:

1. Meningkatnya kapitalisasi konstruksi oleh investor nasional;
2. Meningkatnya persentase Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) yang berkualifikasi besar;
3. Meningkatnya tertib penyelenggaraan konstruksi;
4. Meningkatnya sumber daya manusia penyedia jasa konstruksi yang kompeten;
5. Meningkatnya utilitas produk unggulan.

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas dan sejalan dengan meningkatnya kompleksitas tantangan yang dihadapi, upaya yang harus dilakukan oleh Ditjen Bina Konstruksi dalam mencapai sasaran tersebut juga harus meningkat, baik dalam skala (kuantitas) maupun kualitasnya. Keberhasilan Ditjen Bina Konstruksi dalam menjawab tantangan yang dihadapi sangat tergantung dari keberhasilannya dalam menyiapkan organisasi dan tata kelola Ditjen Bina Konstruksi serta sumber daya yang diperlukan.

Peningkatan kinerja Ditjen Bina Konstruksi sebagai Pembina Konstruksi dan Pembina Investasi di bidang Infrastruktur akan tercermin dari kepemimpinan dalam pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi, peningkatan sistem dan sumber daya Ditjen Bina Konstruksi, sistem tata kelola institusi yang sehat dan akuntabel, tersedianya kuantitas dan kualitas sumber daya (manusia, sarana dan prasarana, infrastruktur), tata kelola dan kepemimpinan yang memberikan tantangan dan semangat untuk maju, Ditjen Bina Konstruksi yang bersinergi (secara internal dan eksternal), suasana dan kualitas penelitian dan pengembangan yang produktif, serta sistem penghargaan dan hukuman yang adil.

#### Strategi Pengembangan Ditjen Bina Konstruksi

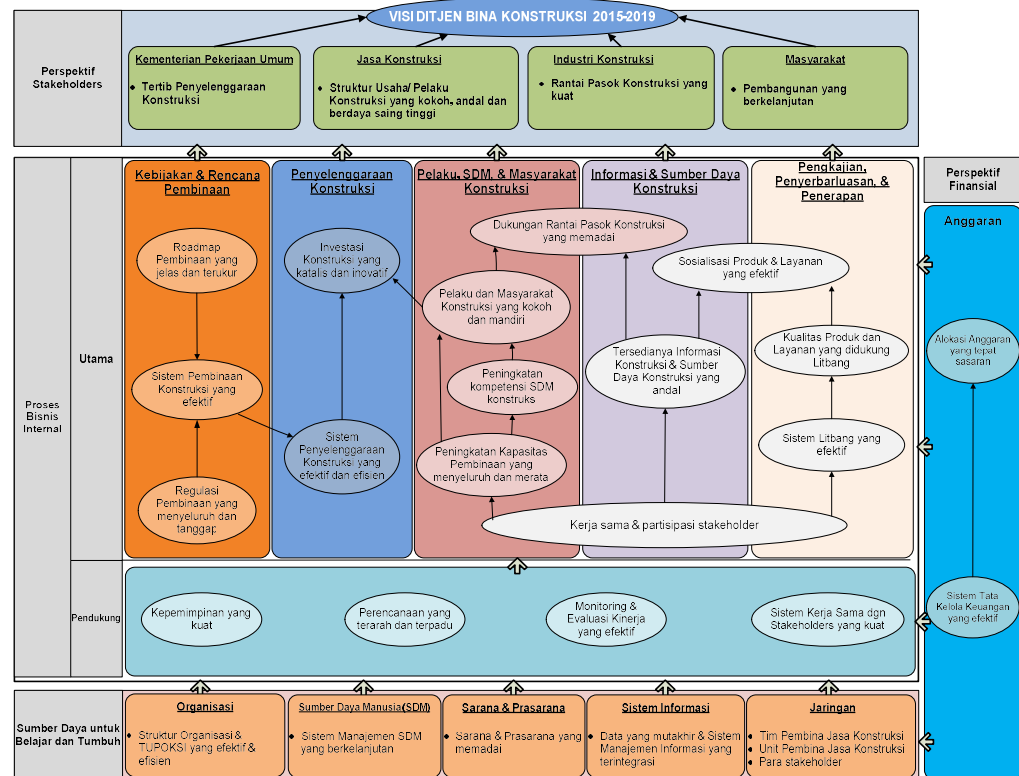
Rencana Strategis yang disusun, merupakan hasil penurunan dari arah dan tujuan Ditjen Bina Konstruksi lima tahun ke depan, dimana Ditjen Bina Konstruksi akan memposisikan diri sebagai “pembina konstruksi dan investasi yang berintegritas tinggi, andal, dan kokoh”.

Berdasarkan alur pengembangan yang telah dirumuskan sebelumnya, disusun rincian program strategis dan indikator serta target yang dicanangkan oleh Ditjen Bina Konstruksi 2015-2019. Program dan indikator tersebut dijabarkan berdasarkan masing-masing misi, proses bisnis internal (pendukung), sumber daya untuk belajar dan tumbuh, dan perspektif finansial (anggaran) yang merupakan komponen-komponen yang bila disatukan secara sinergis maka akan membentuk sebuah bangunan utuh, yaitu Ditjen Bina Konstruksi sebagai “Pembina konstruksi dan investasi yang berintegritas tinggi, andal, dan kokoh untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan konstruksi, menuju konstruksi Indonesia yang unggul dan mandiri demi terwujudnya kenyamanan lingkungan terbangun”.

#### Peta Strategi Pengembangan Ditjen Bina Konstruksi 2015-2019

Mengacu pada Balanced Scorecard, indikator dan program terkait pengembangan Ditjen Bina Konstruksi dapat dikelompokkan menjadi empat berdasarkan perspektif finansial (anggaran), perspektif stakeholders, perspektif proses bisnis internal Ditjen Bina Konstruksi, dan perspektif belajar dan tumbuh yang mencakup sumber daya strategis. Sebagai organisasi nir-laba, maka indikator kinerja finansial bukanlah tujuan akhir dari program pengembangan Ditjen Bina Konstruksi, melainkan kontribusi output Ditjen Bina Konstruksi terhadap kepentingan stakeholders-nya. Output yang akan dikontribusikan pada stakeholders, dihasilkan oleh proses bisnis internal Ditjen Bina Konstruksi yang memerlukan berbagai sumber daya untuk proses belajar (learning) dan tumbuh (growth) untuk maju dan berkembang. Kesemua itu pada akhirnya akan memerlukan dukungan kemampuan finansial Ditjen Bina Konstruksi untuk penggalangan dana. Keterkaitan antar indikator kinerja membangun peta strategi pengembangan Ditjen Bina Konstruksi 2015-2019 seperti ditampilkan pada Gambar 3.1. Untuk penyederhanaan Peta Strategi Ditjen Bina Konstruksi 2015-2019, maka indikator kinerja direpresentasikan oleh stakeholders yang dilayani (berdasarkan perspektif Stakeholders), misi serta proses bisnis internal pendukung (berdasarkan perspektif Proses Bisnis Internal), Sumber Daya (berdasarkan perspektif Belajar dan Tumbuh), dan Anggaran (berdasarkan perspektif Finansial).

### 3. Garis Besar Rencana Strategis Ditjen Bina Konstruksi



Gambar 3.1. Peta Strategi Pengembangan Ditjen Bina Konstruksi 2015-2019

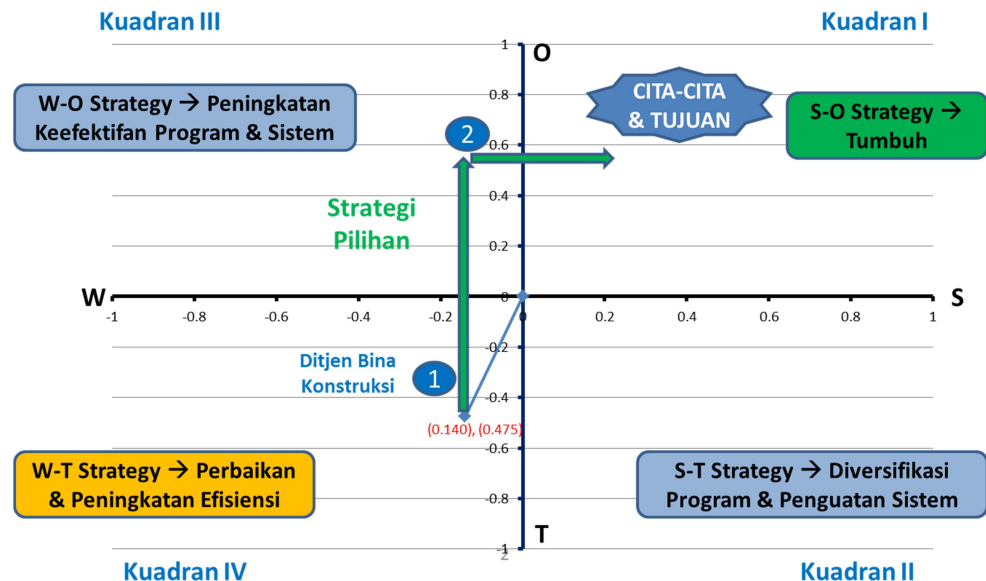
#### Formulasi Strategi Pengembangan 2015-2019

Disamping kekuatan yang dimiliki, yang terbangun selama 12 tahun perkembangannya, masih banyak kelemahan yang harus diperbaiki oleh Ditjen Bina Konstruksi untuk dapat mendukung perwujudan cita-cita Ditjen Bina Konstruksi sebagai Pembina Konstruksi dan Pembina Investasi di bidang Infrastruktur. Dari bahasan pada sub-bab terdahulu, dapat dilihat bahwa dalam menghadapi tantangan perkembangan ke depan, kelemahan internal Ditjen Bina Konstruksi berpotensi menghambat terwujudnya cita-cita pengembangan Ditjen Bina Konstruksi.

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan Ditjen Bina Konstruksi, dan perkembangan kondisi lingkungan eksternalnya, maka dalam upaya untuk terus berkembang dan mewujudkan Ditjen Bina Konstruksi sebagai Pembina Konstruksi dan Pembina Investasi di bidang Infrastruktur, Ditjen Bina Konstruksi harus mampu tumbuh

### 3. Garis Besar Rencana Strategis Ditjen Bina Konstruksi

melalui peran aktif dan komitmen komunitas Ditjen Bina Konstruksi untuk meningkatkan kapasitas sistem dan sumber daya Ditjen Bina Konstruksi, peningkatan keefektifan dan efisiensi organisasi dengan berlandaskan pada integritas yang tinggi, andal, dan kokoh.



Gambar 3.2. Posisi Strategis Ditjen Bina Konstruksi berdasarkan Hasil Analisis SWOT

Hasil analisis SWOT Ditjen Bina Konstruksi menunjukkan posisi strategis Ditjen Bina Konstruksi saat ini berada pada Kuadran IV dimana kelemahan (internal) dan ancaman (eksternal) dinilai lebih dominan, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.2. Berdasarkan kondisi eksisting tersebut, Ditjen Bina Konstruksi pada 2015-2019 secara bertahap akan berkembang dari Kuadran IV ke Kuadran III kemudian ke Kuadran I. Strategi pengembangan ini selanjutnya dijabarkan dalam tiga strategi, yaitu:

1. STRATEGI TUMBUH (Kuadran I): pemanfaatan kekuatan internal Ditjen Bina Konstruksi untuk meraih peluang yang ada.
2. STRATEGI PENINGKATAN KEFEKTIFAN PROGRAM DAN SISTEM (Kuadran III): upaya untuk mengatasi kelemahan Ditjen Bina Konstruksi agar dapat memanfaatkan peluang yang ada.
3. STRATEGI PERBAIKAN DAN PENINGKATAN EFISIENSI (Kuadran IV): meminimumkan dampak ancaman terhadap eksistensi Ditjen Bina Konstruksi dengan mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada.



Strategi-strategi tersebut diharapkan mampu membangun fondasi bagi upaya pengembangan Ditjen Bina Konstruksi pada periode-periode selanjutnya. Penjelasan ketiga strategi pengembangan tersebut sebagai berikut:

1. Strategi Tumbuh

Strategi Tumbuh didasarkan pada pemanfaatan kekuatan internal Ditjen Bina Konstruksi untuk meraih peluang yang ada.

2. Strategi Peningkatan Keefektifan Program dan Sistem

Strategi Peningkatan Keefektifan Program dan Sistem merupakan upaya untuk mengatasi kelemahan Ditjen Bina Konstruksi agar dapat memanfaatkan peluang yang ada. Mengacu pada cita-cita mewujudkan Pembina Konstruksi dan Pembina Investasi di bidang Infrastruktur, banyak kelemahan yang masih harus diatasi oleh Ditjen Bina Konstruksi secara intensif. Dengan banyaknya kelemahan yang masih harus diatasi oleh Ditjen Bina Konstruksi, maka strategi Peningkatan Keefektifan Program dan Sistem akan mendominasi strategi perkembangan Ditjen Bina Konstruksi dalam lima tahun mendatang.

Fokus strategi ini adalah pada peningkatan kinerja proses, sistem, dan prosedur tata kelola untuk meningkatkan keefektifan program dan sistem Ditjen Bina Konstruksi.

3. Strategi Perbaikan dan Peningkatan Efisiensi

Strategi ini ditujukan untuk meminimumkan dampak ancaman terhadap eksistensi Ditjen Bina Konstruksi dengan mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada. Hal ini dilakukan dalam bentuk kontraksi berupa penghentian program/kegiatan atau penutupan unit kerja yang tidak memberikan nilai tambah pada Ditjen Bina Konstruksi dan konsolidasi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya Ditjen Bina Konstruksi yang terbatas.

Fokus strategi ini adalah pada peningkatan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya Ditjen Bina Konstruksi yang terbatas melalui perbaikan program, proses, kegiatan atau fungsi unit kerja dan reduksi program, proses, kegiatan, atau unit kerja yang tidak menjalankan misi strategis dan tidak memberikan nilai bagi Ditjen Bina Konstruksi.

Ketiga strategi tersebut di atas, diarahkan untuk dapat mewujudkan tujuan Ditjen Bina Konstruksi. Tujuan Ditjen Bina Konstruksi merupakan rumusan kondisi yang hendak dituju di akhir periode perencanaan yang merupakan dukungan kepada pencapaian visi pembangunan nasional tahun 2015-2019 yaitu "Terwujudnya Indonesia yang berdaulat,

mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong". Adapun Tujuan Ditjen Bina Konstruksi lebih lanjut dijabarkan sebagai berikut:

1. Mengembangkan kebijakan dan rencana pembinaan konstruksi dan investasi yang efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan, akan dicapai melalui proses bisnis internal utama:
  - a. Roadmap Pembinaan yang jelas dan terukur.
  - b. Sistem Pembinaan Konstruksi yang efektif.
  - c. Regulasi Pembinaan yang menyeluruh dan tanggap.
2. Berperan aktif dalam mewujudkan penyelenggaraan konstruksi yang produktif, efisien dan efektif, serta berkelanjutan, akan dicapai melalui proses bisnis internal utama:
  - a. Investasi (Konstruksi) Infrastruktur yang katalis dan inovatif.
  - d. Sistem Penyelenggaraan Konstruksi.
3. Berperan aktif dalam menciptakan pelaku, SDM, dan masyarakat konstruksi yang unggul, mandiri, profesional, dan berdaya saing tinggi, akan dicapai melalui proses bisnis internal utama:
  - a. Dukungan Rantai Pasok Konstruksi yang Memadai.
  - b. Peningkatan Kapasitas Pembinaan yang menyeluruh dan merata.
  - c. Peningkatan kompetensi SDM Konstruksi.
  - e. Pelaku dan Masyarakat Konstruksi yang kokoh dan mandiri.
4. Memelopori penciptaan informasi konstruksi dan terpenuhinya sumber daya konstruksi, akan dicapai melalui proses bisnis internal utama:
  - a. Tersedianya Informasi konstruksi dan sumber daya konstruksi yang andal.
  - f. Kerjasama dan partisipasi stakeholders dalam menciptakan informasi konstruksi dan sumber daya konstruksi yang dibutuhkan.
5. Memelopori pengkajian, penyebarluasan, dan penerapan inovasi teknologi, investasi, dan ekonomi konstruksi yang berkelanjutan, akan dicapai melalui proses bisnis internal utama:
  - a. Peningkatan kualitas produk dan layanan dengan pemberdayaan litbang.
  - b. Kerjasama dan partisipasi stakeholders dalam litbang.
  - c. Peningkatan Sistem Litbang yang efektif.
  - d. Sosialisasi Produk dan Layanan yang efektif.

Pencapaian tujuan tersebut selain dilakukan melalui proses bisnis internal utama, namun juga harus didukung oleh proses bisnis internal pendukung, sumber daya untuk belajar dan tumbuh, serta perspektif finansial (anggaran). Lebih lanjut dijabarkan sebagai berikut:

1. Proses Bisnis Internal, dukungan yang diperlukan untuk pencapaian tujuan dalam bentuk:
  - a. Kepemimpinan yang kuat
  - b. Perencanaan yang terarah dan terpadu
  - c. Monitoring dan Evaluasi Kinerja yang efektif
  - d. Sistem Kerja Sama yang kuat dengan Stakeholders
2. Sumber Daya untuk Belajar dan Tumbuh, dukungan yang diperlukan untuk pencapaian tujuan dalam bentuk:
  - a. Struktur Organisasi yang efektif dan tepat sasaran
  - b. Sistem Manajemen SDM yang berkelanjutan
  - c. Sarana dan Prasarana yang memadai
  - d. Sistem Informasi Manajemen yang terintegrasi
  - e. Jaringan kerja sama yang efektif
3. Perspektif Finansial (Anggaran), dukungan yang diperlukan untuk pencapaian tujuan dalam bentuk:
  - a. Sistem Tata Kelola Keuangan yang efektif
  - b. Alokasi Anggaran yang tepat sasaran

Program-program yang mendukung ketiga strategi pengembangan tersebut dalam rangka pencapaian tujuan Ditjen Bina Konstruksi secara sistematis diuraikan pada tabel-tabel dalam sub bab berikut.

### Program Pengembangan Strategis Ditjen Bina Konstruksi

#### Strategi Tumbuh

Untuk mendukung strategi tumbuh, maka program pengembangan dalam mewujudkan tujuan, dukungan proses bisnis internal pendukung, sumber daya untuk belajar dan tumbuh, serta perspektif finansial (anggaran), sedikitnya mencakup program-program berikut.

#### A. Mengembangkan kebijakan dan rencana pembinaan konstruksi dan investasi yang efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan

1. Sistem Pembinaan Konstruksi yang efektif
  - 1.1 Sistem Pembinaan Konstruksi yang ada dan keterkaitannya antara pusat dan daerah
    - a. Pengembangan Sistem Pembinaan Konstruksi di pusat dan daerah.
  - 1.2 Kapasitas pembinaan di daerah
    - a. Program peningkatan kapasitas pembinaan di daerah dengan

#### B. Berperan aktif dalam mewujudkan penyelenggaraan konstruksi yang produktif, efisien dan efektif, serta berkelanjutan

- 
1. Investasi (Konstruksi) Infrastruktur yang katalis dan inovatif
    - a. Pengembangan regulasi terkait implementasi berbagai inovasi investasi
  2. Sistem Penyelenggaraan Konstruksi
    - 2.1 Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi yang efektif dan efisien
      - a. Pengembangan regulasi terkait implementasi sistem pengadaan yang efektif
    - 2.2 Administrasi Kontrak Konstruksi yang secara seimbang mengatur hak dan kewajiban pengguna dan penyedia jasa
      - a. Pengembangan regulasi terkait dengan implementasi administrasi kontrak investasi konstruksi
    - 2.3 Penyelesaian Sengketa Konstruksi yang efektif dan efisien
      - a. Pengembangan regulasi penyelesaian sengketa konstruksi yang efektif dan
    - 2.4 Pengelolaan Rantai Pasok untuk Penyelenggaraan Konstruksi
      - a. Pengembangan regulasi pengelolaan rantai pasok untuk penyelenggaraan
- C. Berperan aktif dalam menciptakan pelaku, SDM, dan masyarakat konstruksi yang unggul, mandiri, profesional, dan berdaya saing tinggi**
1. Dukungan Rantai Pasok Konstruksi yang Memadai
    - a. Pengembangan regulasi terkait rancangan rantai pasok konstruksi secara
  2. Peningkatan kompetensi SDM Konstruksi
    - 2.1 Standar Kompetensi Kerja
      - a. Pengembangan Kualitas dan Kuantitas Standar Kompetensi Kerja
  3. Pelaku dan Masyarakat Konstruksi yang kokoh dan mandiri
    - 3.1 Kelembagaan Jasa Konstruksi (LPJK) yang kokoh dan mandiri
      - a. Pengembangan regulasi implementasi LPJK yang profesional
    - 3.2 Pengembangan Struktur Usaha yang Efektif
      - a. Pengembangan regulasi untuk re-strukturisasi usaha konstruksi
    - 3.3 Penciptaan Pasar Konstruksi Indonesia yang Kondusif
      - a. Pengembangan kebijakan terkait dengan penciptaan pasar yang kondusif untuk pasar konstruksi yang harus ada campur tangan pemerintah
- D. Memelopori pengkajian, penyebarluasan, dan penerapan inovasi teknologi, investasi, dan ekonomi konstruksi yang berkelanjutan**
1. Sosialisasi Produk dan Layanan yang efektif
    - 1.1 Kerjasama dengan berbagai stakeholders dalam pelaksanaan sosialisasi produk
      - a. Menciptakan *champion-champion* baru dan melebarkan jaringan dengan stakeholders untuk sosialisasi
- E. Sumber Daya untuk Belajar dan Tumbuh**
1. Struktur Organisasi yang efektif dan tepat sasaran
    - 1.1 Memperkuat struktur organisasi
      - a. Kajian perkuatan organisasi Ditjen Bina Konstruksi yang lebih besar
-

### Strategi Peningkatan Keefektifan Program dan Sistem

Untuk mendukung strategi peningkatan keefektifan program dan sistem, maka program pengembangan dalam mewujudkan tujuan, dukungan proses bisnis internal pendukung, sumber daya untuk belajar dan tumbuh, serta perspektif finansial (anggaran), sedikitnya mencakup program-program berikut.

#### A. Mengembangkan kebijakan dan rencana pembinaan konstruksi dan investasi yang efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan

1. Roadmap Pembinaan yang jelas dan terukur
  - a. Perbaikan Roadmap Ditjen Bina Konstruksi dan Roadmap masing-masing
2. Sistem Pembinaan Konstruksi yang efektif
  - 2.1 Sistem Pembinaan Konstruksi yang ada dan keterkaitannya antara pusat dan daerah
    - a. Kajian untuk perbaikan Sistem Pembinaan Konstruksi baik di pusat dan daerah serta keterkaitan antara keduanya harus diperjelas melalui TUPOKSI dan wewenang yang memadai
  - 2.2 Persepsi dalam pelaksanaan pembinaan konstruksi baik di pusat maupun
    - a. Penyamaan persepsi dalam pelaksanaan pembinaan konstruksi baik di
  - 2.3 Persepsi atas bentuk pembinaan yang dilakukan masing-masing stakeholders
    - a. Penyamaan persepsi atas bentuk pembinaan yang dilakukan masing-
  - 2.4 Kapasitas pembinaan di daerah
    - a. Kajian untuk pengembangan upaya peningkatan kapasitas pembinaan di daerah dengan kebutuhannya
3. Regulasi Pembinaan yang menyeluruh dan tanggap
  - 3.1 Mekanisme baku dalam pengembangan regulasi
    - a. Pengembangan mekanisme baku dalam pengembangan regulasi
  - 3.2 Kualitas Regulasi
    - a. Perbaikan regulasi pembinaan yang menyeluruh dan tanggap

#### B. Berperan aktif dalam mewujudkan penyelenggaraan konstruksi yang produktif, efisien dan efektif, serta berkelanjutan

1. Investasi (Konstruksi) Infrastruktur yang katalis dan inovatif
  - a. Pengembangan berbagai inovasi investasi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur sesuai dengan jenis infrastruktur dan sistem
2. Sistem Penyelenggaraan Konstruksi
  - 2.1 Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi yang efektif dan efisien
    - a. Pengembangan sistem pengadaan yang efektif dan efisien
  - 2.2 Administrasi Kontrak Konstruksi yang secara seimbang mengatur hak dan kewajiban pengguna dan penyedia jasa
    - a. Kajian manajemen risiko berbagai investasi konstruksi serta alokasi
    - b. Pengembangan Dokumen Kontrak Standard sesuai dengan jenis investasi dan infrastrukturnya serta Administrasi Kontraknya
  - 2.3 Penyelesaian Sengketa Konstruksi yang efektif dan efisien
    - a. Pengembangan sistem penyelesaian sengketa konstruksi

#### 2.4 Standard dan Peraturan Teknis Penyelenggaraan Konstruksi

- a. Pengembangan standard dan peraturan teknis penyelenggaraan konstruksi

#### 2.5 Metoda Penyelenggaraan Proyek Konstruksi

- a. Pengembangan manual berbagai penyelenggaraan proyek konstruksi

#### 2.6 Pengelolaan Rantai Pasok untuk Penyelenggaraan Konstruksi

- a. Kajian Pengembangan Dokumen Standar untuk Sub-Kontrak Konstruksi
- b. Kajian Model Manajemen Rantai Pasok Konstruksi untuk Mendukung Penyelenggaraan Konstruksi

### C. Berperan aktif dalam menciptakan pelaku, SDM, dan masyarakat konstruksi yang unggul, mandiri, profesional, dan berdaya saing tinggi

#### 1. Dukungan Rantai Pasok Konstruksi yang Memadai

- a. Perancangan dukungan rantai pasok konstruksi pada tingkat makro (material, SDM, sub-kontraktor, peralatan, teknologi)

#### 2. Peningkatan Kapasitas Pembinaan yang menyeluruh dan merata

##### 2.1 Peningkatan kapasitas SDM Pembinaan

- a. Pengembangan standar kebutuhan dan kompetensi SDM Pembinaan di
- b. Program pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM Pembinaan di daerah bekerja sama dengan daerah
- c. Program dukungan pusat untuk peningkatan kapasitas SDM Pembinaan di

##### 2.2 Peningkatan Fasilitas Pendukung Pembinaan

- a. Pengembangan standar fasilitas yang dibutuhkan untuk mendukung
- b. Program dukungan pusat untuk peningkatan fasilitas pembinaan di daerah

#### 3. Peningkatan kompetensi SDM Konstruksi

##### 3.1 Standar Kompetensi Kerja

- a. Pembenahan Kualitas dan Kuantitas Standar Kompetensi Kerja

##### 3.2 Program Pelatihan berbasis kompetensi

- a. Pengembangan program pelatihan berbasis kompetensi
- b. Pelatihan TOT untuk pelatihan berbasis kompetensi
- c. Dukungan terhadap pusat pendidikan dan pelatihan dalam pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi

#### 4. Pelaku dan Masyarakat Konstruksi yang kokoh dan mandiri

##### 4.1 Kelembagaan Jasa Konstruksi (LPJK) yang kokoh dan mandiri

- a. Pengembangan LPJK yang profesional
- b. Dukungan bagi implementasi LPJK yang profesional

##### 4.2 Pengembangan Struktur Usaha yang Efektif

- a. Pengembangan struktur usaha yang efektif untuk pasar konstruksi di

##### 4.3 Peningkatan Peran Masyarakat Konstruksi yang Aktif

- a. Pengembangan program peningkatan peran aktif masyarakat konstruksi

### D. Memelopori penciptaan informasi konstruksi dan terpenuhinya sumber daya konstruksi

#### 1. Tersedianya Informasi konstruksi dan sumber daya konstruksi yang andal

##### 1.1 Tersedianya informasi konstruksi sebagai referensi pelaku konstruksi

- a. Pengembangan informasi konstruksi yang harus dikelola oleh Pemerintah

- b. Mendukung pengembangan informasi konstruksi yang dikelola bekerjasama dengan stakeholder lain
  - c. Melakukan integrasi informasi konstruksi dalam sistem informasi
- 1.2 Tersedianya sumber daya konstruksi
  - a. Koordinasi dengan pihak-pihak lain untuk mendukung ketersediaan sumber daya yang penting bagi konstruksi nasional
- 2. Kerja sama dan partisipasi stakeholders dalam menciptakan informasi konstruksi dan sumber daya konstruksi yang dibutuhkan
  - 2.1 Kerja sama dengan stakeholder lain dalam penyediaan informasi konstruksi dan ketersediaan sumber daya konstruksi
    - a. Inisiasi kerja sama untuk menyediakan informasi dan sumber daya konstruksi yang dibutuhkan

**E. Memelopori pengkajian, penyebarluasan, dan penerapan inovasi teknologi, investasi, dan ekonomi konstruksi yang berkelanjutan**

- 1. Peningkatan kualitas produk dan layanan dengan pemberdayaan litbang
  - 1.1 Peninjauan ulang kualitas produk dan layanan
    - a. Perencanaan kebutuhan litbang untuk mendukung peningkatan kualitas
    - b. Kegiatan litbang terkait dengan produk dan layanan
  - 1.2 Pelaksanaan litbang yang mendukung pengembangan produk dan layanan dengan target segmen baru yang saat ini belum dilakukan
    - a. Perencanaan kebutuhan litbang untuk mendukung pengembangan produk
    - b. Kegiatan litbang terkait dengan pengembangan produk dan layanan
- 2. Kerja sama dan partisipasi stakeholders dalam litbang
  - 2.1 Peningkatan kerja sama dalam litbang dengan stakeholders
    - a. Pengembangan program litbang bersama dengan stakeholder lain
    - b. Dukungan terhadap kegiatan program litbang yang diselenggarakan
- 3. Peningkatan Sistem Litbang yang efektif
  - 3.1 Fungsi dan peran strategis litbang
    - a. Pengembangan sistem litbang yang strategis dalam mendukung pengembangan produk dan layanan
  - 3.2 Sistem pengelolaan litbang yang efektif
    - a. Perbaikan sistem pengelolaan dan pengadaan jasa dalam litbang
- 4. Sosialisasi Produk dan Layanan yang efektif
  - 4.1 Kerja sama dengan berbagai stakeholders dalam pelaksanaan sosialisasi
    - a. Program kerja sama dalam sosialisasi produk dan layanan dengan semua pihak yang berpotensi membantu
  - 4.2 Penggunaan media sosialisasi yang beragam dan efektif
    - a. Pengembangan media sosialisasi yang lebih beragam dan efektif
    - b. Program sosialisasi di berbagai media
  - 4.3 Kualitas muatan sosialisasi
    - a. Pengembangan kualitas konten sosialisasi
  - 4.4 Integrasi program sosialisasi produk dan layanan

- a. Perancangan sistem sosialisasi BP Konstruksi
- b. Kegiatan sosialisasi terpadu

### F. Proses Bisnis Internal (Pendukung)

1. Kepemimpinan yang kuat
  - 1.1 Kepemimpinan Ditjen Bina Konstruksi
    - a. Perbaikan kepemimpinan Ditjen Bina Konstruksi internal serta soliditas
    - b. Perkuatan kepemimpinan Ditjen Bina Konstruksi di Kemen. PUPR
    - c. Perkuatan kepemimpinan Ditjen Bina Konstruksi di Jasa Konstruksi
    - d. Perkuatan kepemimpinan Ditjen Bina Konstruksi dengan daerah
    - e. Perkuatan kepemimpinan Ditjen Bina Konstruksi dengan kementerian lain
2. Perencanaan yang terarah dan terpadu
  - 2.1 Koordinasi dan sinkronisasi antar masing-masing pusat untuk meningkatkan efektifitas perencanaan terpusat
    - a. Perbaikan dalam koordinasi dan sinkronisasi antar masing-masing pusat untuk meningkatkan efektifitas perencanaan terpusat
3. Monitoring dan Evaluasi Kinerja yang efektif
  - 3.1 Sistem monitoring dan evaluasi kinerja pada masing-masing direktorat dan secara keseluruhan Ditjen Bina Konstruksi
    - a. Perbaikan sistem monev pada masing-masing direktorat dan secara keseluruhan Ditjen Bina Konstruksi
    - b. Kajian kebutuhan akan unit khusus untuk pengawasan
4. Sistem Kerja Sama yang kuat dengan Stakeholders
  - 4.1 Sistem kerja sama dengan stakeholder dalam pelaksanaan pembinaan baik di pusat dan di daerah
    - a. Pengembangan sistem kerja sama swasta
    - b. Pengembangan sistem kerja sama dengan daerah
    - c. Pengembangan sistem kerja sama dengan stakeholder lain

### G. Sumber Daya untuk Belajar dan Tumbuh

1. Struktur Organisasi yang efektif dan tepat sasaran
  - 1.1 Memperkuat struktur organisasi
    - a. Perbaikan struktur organisasi
  - 1.2 Perbaikan TUPOKSI antar pusat serta pemerataan kewenangan dan tanggung
    - a. Perbaikan TUPOKSI masing-masing direktorat
  - 1.3 SOP dan implementasinya
    - a. Pengembangan SOP dan implementasinya
2. Sistem Manajemen SDM yang berkelanjutan
  - 2.1 Sistem manajemen SDM Ditjen Bina Konstruksi dalam menjawab kebutuhan organisasi
    - a. Pembenahan sistem manajemen SDM dalam menjawab kebutuhan
  - 2.2 Kualitas SDM BP Konstruksi yang memiliki pengalaman lapangan yang memadai dan pengarah/pendamping dalam litbang



- a. Identikasi *job specification* dan pengembangan sistem manajemen SDM yang berpengalaman lapangan dan pendamping dalam litbang
  - b. Rekrutmen SDM yang berpengalaman
- 2.3 Sistem manajemen SDM untuk bidang keuangan
  - a. Pembenahan sistem manajemen SDM keuangan
  - b. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Keuangan melalui sistem rekrutmen yang disesuaikan dengan kebutuhan
- 3. Sarana dan Prasarana yang memadai
  - 3.1 Sarana dan prasarana pada Ditjen Bina Konstruksi
    - a. Strategi pengadaan sarana dan prasarana
    - b. Pengadaan sarana dan prasarana
  - 3.2 Kolaborasi antar pusat dalam pemanfaatan sumber daya
    - a. Pengembangan pengelolaan sumber daya secara bersama
    - b. Pemanfaatan sumber daya secara bersama
- 4. Sistem Informasi Manajemen yang terintegrasi
  - 4.1 Integrasi sistem manajemen informasi dengan eksternal seperti LPJK, BPS, dan stakeholders lainnya
    - a. Pengembangan sistem informasi terintegrasi dengan stakeholder eksternal
  - 4.2 Integrasi sistem informasi antar direktorat (internal)
    - a. Pengembangan sistem informasi terintegrasi antar pusat (internal)
  - 4.3 Akurasi dan update data melalui peningkatan kerja sama dan partisipasi dengan stakeholders dalam proses akuisisi data
    - a. Pengembangan kerja sama dan partisipasi dengan stakeholders dalam
- 5. Jaringan kerja sama yang efektif
  - 5.1 Kerja sama dengan Pembina Jasa Konstruksi nasional dan daerah
    - a. Pengembangan kerja sama antar tim Pembina jasa konstruksi nasional dan

#### H. Perspektif Finansial (Anggaran)

- 1. Sistem Tata Kelola Keuangan yang efektif
  - 1.1 Sistem tata kelola keuangan
    - a. Pembenahan kinerja sistem tata kelola keuangan
  - 1.2 Sistem kendali atas implementasi manajemen keuangan
    - a. Perbaikan SOP dan system kendali atas manajemen keuangan
- 2. Alokasi Anggaran yang tepat sasaran
  - 2.1 Sistem alokasi anggaran antar pusat dan antara pusat dan daerah dalam pembinaan jasa konstruksi
    - a. Pengembangan sistem alokasi anggaran antar pusat dan antara pusat dan daerah dalam pembinaan jasa konstruksi

#### Strategi Perbaikan dan Peningkatan Efisiensi

Untuk mendukung strategi perbaikan dan peningkatan efisiensi, maka program pengembangan dalam mewujudkan tujuan, proses bisnis internal pendukung, sumber daya

### 3. Garis Besar Rencana Strategis Ditjen Bina Konstruksi

untuk belajar dan tumbuh, serta perspektif finansial (anggaran), sedikitnya mencakup program-program berikut.

#### A. Mengembangkan kebijakan dan rencana pembinaan konstruksi dan investasi yang efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan

1. Roadmap Pembinaan yang jelas dan terukur
  - a. Identifikasi kebutuhan sinkronisasi Roadmap Ditjen Bina Konstruksi dengan Roadmap masing-masing direktorat (eselon II)
  - b. Evaluasi ketercapaian Roadmap
2. Sistem Pembinaan Konstruksi yang efektif
  - 2.1 Sistem Pembinaan Konstruksi yang ada dan keterkaitannya antara pusat dan
    - a. Evaluasi kinerja Sistem Pembinaan Konstruksi yang ada dan keterkaitannya antara pusat dan daerah
  - 2.2 Kapasitas pembinaan di daerah
    - a. Evaluasi kapasitas pembinaan di daerah dengan kebutuhannya.
3. Regulasi Pembinaan yang menyeluruh dan tanggap
  - 3.1 Mekanisme baku dalam pengembangan regulasi
    - a. Peninjauan ulang mekanisme baku dalam pengembangan regulasi
    - b. Evaluasi efektivitas mekanisme baku dalam pengembangan regulasi
  - 3.2 Kualitas Regulasi
    - a. Evaluasi antara kebutuhan dengan ketersediaan serta cakupan dari regulasi pembinaan yang ada
    - b. Kajian kualitas regulasi pembinaan yang ada

#### B. Berperan aktif dalam mewujudkan penyelenggaraan konstruksi yang produktif, efisien dan efektif, serta berkelanjutan

1. Investasi (Konstruksi) Infrastruktur yang katalis dan inovatif
  - a. Evaluasi terhadap skema investasi (Konstruksi) infrastruktur serta sistem
  - b. Evaluasi efektivitas regulasi dan berbagai inovasi investasi setelah
2. Sistem Penyelenggaraan Konstruksi
  - 2.1 Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi yang efektif dan efisien
    - a. Evaluasi terhadap sistem pengadaan yang ada serta isu-isu terkait dan
    - b. Evaluasi efektivitas regulasi dan implementasi sistem pengadaan
  - 2.2 Administrasi Kontrak Konstruksi yang secara seimbang mengatur hak dan kewajiban pengguna dan penyedia jasa
    - a. Evaluasi efektivitas regulasi dan implementasi administrasi kontrak
  - 2.3 Penyelesaian Sengketa Konstruksi yang efektif dan efisien
    - a. Identifikasi kebutuhan penyelesaian sengketa konstruksi yang efektif dan
    - b. Evaluasi efektivitas sistem penyelesaian sengketa konstruksi
  - 2.4 Standard dan Peraturan Teknis Penyelenggaraan Konstruksi
    - a. Identifikasi dan pemetaan standard dan peraturan teknis terkait
  - 2.5 Metoda Penyelenggaraan Proyek Konstruksi
    - a. Kajian kebutuhan akan berbagai metoda penyelenggaraan proyek

#### 2.6 Pengelolaan Rantai Pasok untuk Penyelenggaraan Konstruksi

- a. Evaluasi pengelolaan rantai pasok untuk penyelenggaraan konstruksi

#### C. Berperan aktif dalam menciptakan pelaku, SDM, dan masyarakat konstruksi yang unggul, mandiri, profesional, dan berdaya saing tinggi

##### 1. Dukungan Rantai Pasok Konstruksi yang Memadai

- a. Identifikasi kebutuhan (*demand*) dan pasokan (*supply*) sumber daya konstruksi (material, SDM, sub-kontraktor, peralatan, teknologi)
- b. Evaluasi efektivitas regulasi terkait rantai pasok konstruksi secara makro

##### 2. Peningkatan Kapasitas Pembinaan yang menyeluruh dan merata

###### 2.1 Peningkatan kapasitas SDM Pembinaan

- a. Identifikasi kebutuhan SDM Pembinaan di pusat dan daerah serta kondisi

###### 2.2 Peningkatan Fasilitas Pendukung Pembinaan

- a. Identifikasi kebutuhan Fasilitas Pendukung Pembinaan

##### 3. Peningkatan kompetensi SDM Konstruksi

###### 3.1 Standar Kompetensi Kerja

- a. Evaluasi Kualitas dan Kuantitas Standar Kompetensi Kerja

##### 4. Pelaku dan Masyarakat Konstruksi yang kokoh dan mandiri

###### 4.1 Kelembagaan Jasa Konstruksi (LPJK) yang kokoh dan mandiri

- a. Evaluasi kinerja LPJK secara keseluruhan (LPJKN dan LPJKP)

###### 4.2 Pengembangan Struktur Usaha yang Efektif

- a. Evaluasi kinerja struktur usaha yang ada serta permasalahannya
- b. Evaluasi efektivitas implementasi re-strukturisasi usaha konstruksi

###### 4.3 Penciptaan Pasar Konstruksi Indonesia yang Kondusif

- a. Evaluasi pasar konstruksi Indonesia berdasarkan jenis konstruksi dan klasifikasi usaha kontraktor
- b. Evaluasi efektivitas implementasi kebijakan pasar yang kondusif

###### 4.4 Peningkatan Peran Masyarakat Konstruksi yang Aktif

- a. Identifikasi komponen masyarakat konstruksi yang dapat menjadi penggerak dalam masyarakat untuk aktif

- b. Evaluasi efektivitas program peningkatan peran aktif masyarakat konstruksi

#### D. Memelopori penciptaan informasi konstruksi dan terpenuhinya sumber daya konstruksi

##### 1. Tersedianya Informasi konstruksi dan sumber daya konstruksi yang andal

###### 1.1 Tersedianya informasi konstruksi sebagai referensi pelaku konstruksi

- a. Identifikasi informasi konstruksi yang dibutuhkan oleh seluruh stakeholder konstruksi beserta keberadaannya

###### 1.2 Tersedianya sumber daya konstruksi

- a. Identifikasi sumber daya konstruksi yang dibutuhkan oleh konstruksi
- b. Evaluasi ketersediaan sumber daya konstruksi secara nasional

##### 2. Kerja sama dan partisipasi stakeholders dalam menciptakan informasi konstruksi dan sumber daya konstruksi yang dibutuhkan

- 2.1 Kerja sama dengan stakeholder lain dalam penyediaan informasi konstruksi dan ketersediaan sumber daya konstruksi

- a. Identifikasi pihak-pihak yang dapat menyediakan data dan informasi konstruksi serta sumber daya konstruksi yang dibutuhkan
- b. Evaluasi efektivitas kerja sama

#### E. Memelopori pengkajian, penyebarluasan, dan penerapan inovasi teknologi, investasi, dan ekonomi konstruksi yang berkelanjutan

1. Peningkatan kualitas produk dan layanan dengan pemberdayaan litbang
  - 1.1 Peninjauan ulang kualitas produk dan layanan
    - a. Evaluasi kualitas produk dan layanan
  - 1.2 Pelaksanaan litbang yang mendukung pengembangan produk dan layanan dengan target segmen baru yang saat ini belum dilakukan
    - a. Identifikasi produk dan layanan yang perlu dikembangkan
2. Kerja sama dan partisipasi stakeholders dalam litbang
  - 2.1 Peningkatan kerja sama dalam litbang dengan stakeholders
    - a. Identifikasi stakeholder yang mampu mendukung litbang
    - b. Evaluasi efektivitas kerja sama
3. Peningkatan Sistem Litbang yang efektif
  - 3.1 Fungsi dan peran strategis litbang
    - a. Evaluasi fungsi dan peranan litbang dalam mendukung pengembangan
    - b. Evaluasi efektivitas sistem litbang
  - 3.2 Sistem pengelolaan litbang yang efektif
    - a. Evaluasi sistem pengelolaan dan pengadaan jasa dalam litbang
    - b. Evaluasi efektivitas sistem pengelolaan dan pengadaan jasa dalam litbang
4. Sosialisasi Produk dan Layanan yang efektif
  - 4.1 Kerja sama dengan berbagai stakeholders dalam pelaksanaan sosialisasi
    - a. Identifikasi pihak-pihak yang berpotensi dalam sosialisasi produk dan
    - b. Evaluasi efektivitas kerja sama
  - 4.2 Penggunaan media sosialisasi yang beragam dan efektif
    - a. Evaluasi media sosialisasi yang telah digunakan
    - b. Evaluasi efektivitas media sosialisasi
  - 4.3 Kualitas muatan sosialisasi
    - a. Evaluasi kualitas konten sosialisasi
    - b. Pengukuran efektivitas konten sosialisasi
  - 4.4 Integrasi program sosialisasi produk dan layanan
    - a. Evaluasi program sosialisasi semua eselon II
    - b. Evaluasi efektivitas program sosialisasi terpadu

#### F. Proses Bisnis Internal (Pendukung)

1. Kepemimpinan yang kuat
  - 1.1 Kepemimpinan Ditjen Bina Konstruksi
    - a. Evaluasi atas kepemimpinan Ditjen Bina Konstruksi secara internal dan
    - b. Evaluasi kepemimpinan Ditjen Bina Konstruksi
2. Perencanaan yang terarah dan terpadu

- 2.1 Koordinasi dan sinkronisasi antar masing-masing pusat untuk meningkatkan efektifitas perencanaan terpusat
  - a. Evaluasi kinerja sistem perencanaan terpusat yang ada
  - b. Evaluasi efektifitas perencanaan terpusat
- 3. Monitoring dan Evaluasi Kinerja yang efektif
  - 3.1 Sistem monitoring dan evaluasi kinerja pada masing-masing pusat dan secara keseluruhan Ditjen Bina Konstruksi
    - a. Evaluasi sistem monev yang ada beserta unit pengawasannya
    - b. Evaluasi efektivitas sistem monev
  - 3.2 Sistem monev atas keterlaksanaan program kerja dan roadmap
    - a. Evaluasi hasil sistem monitoring dan evaluasi atas keterlaksanaan program kerja dan roadmap
- 4. Sistem Kerja Sama yang kuat dengan Stakeholders
  - 4.1 Sistem kerja sama dengan stakeholder dalam pelaksanaan pembinaan baik di pusat dan di daerah
    - a. Evaluasi kerja sama dengan stakeholder lain untuk mendukung kegiatan Ditjen Bina Konstruksi
    - b. Identifikasi stakeholder yang potensial untuk kerja sama
    - c. Evaluasi efektivitas kerja sama

#### G. Sumber Daya untuk Belajar dan Tumbuh

- 1. Struktur Organisasi yang efektif dan tepat sasaran
  - 1.1 Memperkuat struktur organisasi
    - a. Evaluasi struktur organisasi sesuai dengan misi
    - b. Evaluasi implementasi struktur organisasi
  - 1.2 Perbaikan TUPOKSI antar direktorat serta pemerataan kewenangan dan
    - a. Evaluasi tumpang tindih TUPOKSI antar direktorat, kewenangan dan
    - b. Evaluasi efektivitas TUPOKSI
  - 1.3 SOP dan implementasinya
    - a. Evaluasi SOP dan implementasinya untuk mendukung Organisasi dan
    - b. Evaluasi efektivitas implementasi SOP
- 2. Sistem Manajemen SDM yang berkelanjutan
  - 2.1 Sistem manajemen SDM Ditjen Bina Konstruksi dalam menjawab kebutuhan organisasi
    - a. Evaluasi kinerja sistem manajemen SDM dalam menjawab kebutuhan
    - b. Evaluasi efektivitas sistem manajemen SDM dalam menjawab kebutuhan
  - 2.2 Kualitas SDM BP Konstruksi yang memiliki pengalaman lapangan yang memadai dan pengarah/pendamping dalam litbang
    - a. Evaluasi sistem rekrutmen dan kapasitas SDM
    - b. Identifikasi *job specification* dan pengembangan sistem manajemen SDM yang berpengalaman lapangan dan pendamping dalam litbang
    - c. Evaluasi efektivitas sistem SDM terkait kualitas SDM yang dibutuhkan
  - 2.3 Sistem manajemen SDM untuk bidang keuangan
    - a. Evaluasi sistem manajemen SDM keuangan

- 3. Sarana dan Prasarana yang memadai
  - 3.1 Sarana dan prasarana pada BP Konstruksi
    - a. Evaluasi ketersediaan sarana dan prasarana Ditjen Bina Konstruksi
    - b. Pengembangan kebutuhan sarana dan prasarana
  - 3.2 Kolaborasi antar pusat dalam pemanfaatan sumber daya
    - a. Evaluasi sumber daya yang dapat digunakan bersama
- 4. Sistem Informasi Manajemen yang terintegrasi
  - 4.1 Integrasi sistem manajemen informasi dengan eksternal seperti LPJK, BPS, dan stakeholders lainnya
    - a. Evaluasi dan identifikasi kebutuhan integrasi sistem informasi dengan
    - b. Evaluasi efektivitas sistem informasi terintegrasi dengan eksternal
  - 4.2 Integrasi sistem informasi antar direktorat (internal)
    - a. Evaluasi dan identifikasi kebutuhan integrasi sistem informasi antar
    - b. Evaluasi efektivitas sistem informasi terintegrasi antar direktorat (internal)
  - 4.3 Akurasi dan update data melalui peningkatan kerja sama dan partisipasi dengan stakeholders dalam proses akuisisi data
    - a. Identifikasi kebutuhan informasi yang akurat dan update melalui kerja sama dan partisipasi dengan stakeholders dalam proses akuisisi data
    - b. Evaluasi efektivitas kerja sama dan data
- 5. Jaringan kerja sama yang efektif
  - 5.1 Kerja sama dengan Pembina Jasa Konstruksi nasional dan daerah
    - a. Evaluasi kerja sama antar tim Pembina jasa konstruksi nasional dan daerah
    - b. Evaluasi efektivitas kerja sama

#### H. Perspektif Finansial (Anggaran)

- 1. Sistem Tata Kelola Keuangan yang efektif
  - 1.1 Sistem tata kelola keuangan
    - a. Evaluasi kinerja sistem tata kelola keuangan
    - b. Evaluasi efektivitas sistem tata kelola keuangan
  - 1.2 Sistem kendali atas implementasi manajemen keuangan
    - a. Peninjauan ulang atas SOP dan sistem kendali atas implementasi
    - b. Evaluasi efektivitas sistem kendali keuangan
- 2. Alokasi Anggaran yang tepat sasaran
  - 2.1 Sistem alokasi anggaran antar pusat dan antara pusat dan daerah dalam pembinaan jasa konstruksi
    - a. Peninjauan ulang atas sistem alokasi anggaran antar pusat dan antara pusat dan daerah dalam pembinaan jasa konstruksi
    - b. Evaluasi efektivitas sistem alokasi anggaran

## **4. Sasaran, Program, dan Indikator Kinerja**

---

Secara sistematis, sasaran, program, dan indikator kinerja dalam rangka pencapaian cita-cita dan tujuan Ditjen Bina Konstruksi, dipaparkan pada bagian berikut.

*Pada Rencana Strategis Ditjen Bina Konstruksi 2015-2019, Ditjen Bina Konstruksidalam pelaksanaanprogram Pembinaan Konstruksi didasarkan pada pencapaian5 Tujuan yang dicanangkan pada periode 2015-2019 serta Pendukung Proses Bisnis Internal, Sumber Daya untuk Belajar dan Tumbuh, dan Perspektif Finansial (Anggaran). Untuk pencapaian masing-masing tujuan, ditetapkan beberapa sasaran umum sebagaimana dijelaskan dibawah ini.*

### **Tujuan I: Mengembangkan Kebijakan Rencana Pembinaan - Konstruksi dan Investasi**

Dalam rangka mewujudkan TujuanI tersebut di atas, sasaran umum ditetapkan sebagai berikut:

1. Terwujudnya Roadmap Pembinaan yang sesuai dengan perkembangan yang ada
2. Peningkatan penyelenggaraanpembinaan baik di pusat maupun di daerah
3. Peningkatan fungsi dan peran pembinaan melalui regulasi

### **Tujuan II: Berperan Aktif dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Konstruksi yang Produktif, Efisien, Efektif, serta Berkelanjutan.**

Dalam rangka mewujudkan TujuanII tersebut di atas, sasaran umum ditetapkan sebagai berikut:

1. Peningkatan investasi (konstruksi) infrastruktur yang katalis dan inovatif.
2. Peningkatan kinerja sistem penyelenggaraankonstruksiyang efisien dan efektif.

**TujuanIII: Berperan Aktif dalam Menciptakan Pelaku, SDM, dan Masyarakat Konstruksi yang Unggul, Mandiri, Profesional, dan Berdaya Saing Tinggi**

Dalam rangka mewujudkan TujuanIII tersebut di atas, sasaran umum ditetapkan sebagai berikut:

1. Dukungan rantai pasok konstruksi yang memadai
2. Peningkatan kapasitas LPJK yang kokoh dan mandiri
3. Peningkatan kompetensi SDM Konstruksi
4. Peningkatan kapasitas pembinaan yang menyeluruh dan merata

**Tujuan IV: Memelopori Penciptaan Informasi Konstruksi dan Terpenuhiya Sumber Daya Konstruksi**

Dalam rangka mewujudkan TujuanIV tersebut di atas, sasaran umum ditetapkan sebagai berikut:

1. Dukungan rantai pasok konstruksi yang memadai
2. Tersedianya informasi konstruksi dan sumber daya konstruksi
3. Peningkatan kerjasama dan partisipasi stakeholder konstruksi untuk mendukung ketersediaan informasi konstruksi dan sumber daya konstruksi
4. Terbuka akses informasi konstruksi dan sumber daya konstruksi bagi seluruh stakeholder

**Tujuan V: Memelopori Pengkajian, Penyebarluasan, dan Penerapan Inovasi Teknologi, Investasi, dan Ekonomi Konstruksi yang Berkelanjutan**

Dalam rangka mewujudkan TujuanV tersebut di atas, sasaran umum ditetapkan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas Produk dan Layanan dengan pemberdayaan Litbang
2. Peningkatan kinerja Litbang melalui peningkatan fungsi dan peranan, kerjasama dan partisipasi stakeholder, dan sistem pengelolaan beserta pengadaan dalam menjalankan Litbang
3. Peningkatan kerjasama dan partisipasi stakeholder konstruksi untuk mendukung kegiatan litbang konstruksi
4. Tersebar nya informasi produk dan layanan



## Pendukung Proses Bisnis Internal

Dalam rangka mewujudkan proses bisnis internal (pendukung) yang menunjang terwujudnya tujuan tersebut di atas, sasaran umum ditetapkan sebagai berikut:

- Peningkatan kinerja dari kepemimpinan, perencanaan, monitoring dan evaluasi, dan sistem kerja sama dengan stakeholder

## Sumber Daya untuk Belajar dan Tumbuh

Dalam rangka mewujudkan sumber daya untuk belajar dan tumbuh sebagai landasan yang kokoh, sasaran umum ditetapkan sebagai berikut:

1. Organisasi yang efektif dan efisien
2. Sistem manajemen SDM yang berkelanjutan
3. Peningkatan sarana dan prasarana serta sistem pengelolaannya
4. Terintegrasinya sistem informasi
5. Dukungan jaringan dalam pembinaan konstruksi

## Perspektif Finansial (Anggaran)

Dalam rangka mewujudkan anggaran yang dapat mendukung proses bisnis internal dan sumber daya untuk belajar dan tumbuh, sasaran umum ditetapkan sebagai berikut:

- Peningkatan sistem tata kelola keuangan dan alokasi anggaran

*Pada tahapan implementasi, kelima tujuan beserta Pendukung Proses Bisnis Internal, Sumber Daya untuk Belajar dan Tumbuh, dan Perspektif Finansial (Anggaran), diterjemahkan ke dalam 1 Sasaran Strategis sebagai berikut:*

## Meningkatnya Kapasitas dan Pengendalian Kualitas Konstruksi Nasional (dipindah ke atas)

Dalam rangka terwujudnya sasaran strategis ini, ditetapkan 5sasaran program (outcome)sebagai berikut:

1. Meningkatnya kapitalisasi konstruksi oleh investor nasional  
Sasaran program ini didukung oleh 2 sasaran kegiatan (output), yaitu:
  - i. Kebijakan dan Strategi kapitalisasi konstruksi dan perusahaan infrastruktur oleh badan usaha nasional  
Sub-output:
    - a. Kebijakan dan Strategi Pola Investasi dan Pola Pembiayaan Infrastruktur
    - b. NSPK Penyelenggaraan Investasi Infrastruktur

- ii. Fasilitasi kapitalisasi dan pengusaha infrastruktur oleh badan usaha nasional

Sub-Output:

- a. Fasilitasi investasi infrastruktur dan pengelolaan resiko
- b. Profil Pasar Konstruksi Nasional dan Internasional

### 2. Meningkatnya BUJK yang berkualifikasi besar

Sasaran program ini didukung oleh 1sasaran kegiatan (output), yaitu:

- i. Kelembagaan pembinaan jasa konstruksi

Sub-Output:

- a. Standar dan Pedoman Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat
- b. Profil Kinerja Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat
- c. Standar dan Pedoman bidang Usaha Jasa Konstruksi
- d. Profil Kinerja bidang Usaha Jasa Konstruksi

### 3. Meningkatnya tertib penyelenggaraan konstruksi

Sasaran program ini didukung oleh 1 sasaran kegiatan (output), yaitu:

- i. Pembinaan manajemen mutu dan tertib penyelenggaraan konstruksi

Sub-output:

- a. Standar dan Pedoman bidang Sistem Penyelenggaraan Konstruksi
- b. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Penyelenggaraan Konstruksi
- c. Standar dan Pedoman bidang Kontrak Konstruksi
- d. Profil Pelaksanaan Kontrak Konstruksi
- e. Standar dan Pedoman bidang Konstruksi Berkelanjutan
- f. Profil Pelaksanaan Konstruksi Berkelanjutan
- g. Standar dan Pedoman bidang Manajemen Mutu
- h. Profil Pelaksanaan Manajemen Mutu

### 4. Meningkatnya SDM penyedia jasa konstruksi yang kompeten

Sasaran program ini didukung oleh 2sasaran kegiatan (output), yaitu:

- i. Standar dan Pedoman peningkatan kompetensi SDM konstruksi

Sub-output:

- a. Standar Kompetensi Kerja Konstruksi
- b. Modul Peningkatan Kompetensi
- c. Standar dan Pedoman Penyelenggaraan Peningkatan Kompetensi Kerja Konstruksi
- d. Profil Fasilitator/ Instruktur/ Asesor/ Manajer Pemberdayaan
- e. Standar dan Pedoman pengembangan profesi jasa konstruksi

- f. Penyetaraan kompetensi
    - g. Standar dan Pedoman Produktivitas Kerja Konstruksi
    - h. Profil Kinerja Peningkatan Produktivitas Kerja Konstruksi
  - ii. Kerjasama dan pemberdayaan peningkatan kompetensi SDM konstruksi  
Sub-output:
    - a. Standar dan pedoman kerjasama dan pemberdayaan
    - b. Pengembangan kompetensi dan produktivitas konstruksi bersama lembaga pemerintah dan/atau masyarakat
    - c. Profil kinerja pelaksanaan pemberdayaan
    - d. Fasilitasi pemberdayaan pengguna dan penyedia jasa konstruksi
    - e. Penyiapan penerapan kompetensi konstruksi
    - f. Pemberdayaan tenaga kerja konstruksi mandiri
- 5. Meningkatnya utilitas produk unggulan  
Sasaran program ini didukung oleh 2sasaran kegiatan (output), yaitu:
  - i. Pembinaan penerapan teknologi inovatif  
Sub-output:
    - a. Standar dan Pedoman bidang Teknologi dan Produk Dalam Negeri
    - b. Profil Kinerja bidang Teknologi dan Produk Dalam Negeri
  - ii. Informasi rantai pasok konstruksi  
Sub-output:
    - a. Standar dan Pedoman bidang Material dan Peralatan Konstruksi
    - b. Profil Kinerja bidang Material dan Peralatan Konstruksi

Matriks sasaran dan indikator kinerja dijabarkan pada **Lampiran IV** Matriks Suboutput dijabarkan pada **Lampiran VI**

---

## 5. Penutup

---

Rencana strategis (Renstra) ini disusun untuk memberikan arah pengembangan Ditjen Bina Konstruksi dalam jangka waktu 5 tahun mendatang, yaitu tahun 2015 - 2019. Selanjutnya, Renstra Ditjen Bina Konstruksi 2015 - 2019 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Ditjen Bina Konstruksi dalam kurun waktu antara tahun 2015 sampai dengan 2019. Dengan demikian diharapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Ditjen Bina Konstruksi dapat disusun secara koheren.

Strategi Pengembangan Ditjen Bina Konstruksi selama lima tahun ke depan secara umum didominasi oleh Strategi Perbaikan dan Peningkatan Efisiensi serta Strategi Peningkatan Keefektifan Program dan Sistem. Strategi tersebut ditekankan pada proses konsolidasi (mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada) berbagai elemen Ditjen Bina Konstruksi untuk meminimumkan ancaman dan memanfaatkan peluang yang ada.

Indonesia merupakan negara dengan wilayah yang luas sehingga dibutuhkan peran serta para pemangku kepentingan jasa konstruksi dari berbagai tingkatan demi efektif dan efisiennya pelaksanaan pembinaan konstruksi. Dengan demikian, strategi pelaksanaan Program Pembinaan Konstruksi Ditjen Bina Konstruksi selama lima tahun ke depan diarahkan lebih banyak melalui sistem kerja sama dengan para pemangku kepentingan dan pemberdayaan masyarakat jasa konstruksi. Kerja bersama tersebut diperlukan terutama dalam hal kegiatan-kegiatan pembinaan jasa konstruksi Pusat yang dirasakan kurang efektif bila Pusat sendiri yang menangani.

Program-program strategis yang dimuat dalam Renstra ini mencakup juga program-program rinci beserta pentahapannya yang diharapkan mampu menjawab cita-cita Ditjen Bina Konstruksi menjadi "pembina konstruksi dan investasi yang berintegritas tinggi, andal, dan kokoh" untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan konstruksi, menuju konstruksi Indonesia yang unggul dan mandiri demi terwujudnya kenyamanan lingkungan terbangun. Program strategis beserta program rinci ini perlu dijadikan acuan bagi Sekretariat Direktorat Jenderal dan setiap Direktorat dan di lingkungan Ditjen Bina Konstruksi, sehingga setiap upaya pengembangan tersebut dapat memberikan kontribusi nyata bagi tercapainya cita-cita dan tujuan Ditjen Bina Konstruksi 2019 yang diharapkan.

---

## LAMPIRAN

---

- Lampiran I : Peraturan Perundangan yang Menjadi Acuan  
Penyusunan Renstra Ditjen Bina Konstruksi 2015-2019
- Lampiran II : Pencapaian Kinerja Utama BP Konstruksi Berdasarkan Lakip  
BP Konstruksi 2012 terhadap Renstra BP Konstruksi 2010-  
2014 dan Roadmap Pembina Jasa Konstruksi 2010-2024
- Lampiran III : Kegiatan-Kegiatan  
Sosialisasi/Diseminasi/Seminar/Workshop/Pelatihan Yang  
Telah Dan Rutin Dilakukan Oleh BP Konstruksi
- Lampiran IV : Sasaran Strategis, Outcome, Output, beserta Indikator Kinerja
- Lampiran V : Komponen dan Sub-komponen Strategis pada masing-masing  
Tujuan
- Lampiran VI : Struktur Sub-Output per Unit Kerja dan Indikator
- Lampiran VII : Peta Aliran Pencapaian Sasaran
- Lampiran VIII : Baseline dan Cara Pengukuran Pencapaian Sasaran
- Lampiran IX : Kebutuhan Pendanaan Program Pembinaan Konstruksi 2015-  
2019

## Lampiran I

---

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENJADI ACUAN PENYUSUNAN RENSTRA DITJEN BINA KONSTRUKSI 2015-2019

Berikut ini adalah landasan-landasan penting yang menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Ditjen Bina Konstruksi 2015-2019:

1. UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
2. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
6. UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
7. PP No. 28 Tahun 2000 dan perubahannya PP No. 04 Tahun 2010 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi;
8. PP No. 29 Tahun 2000 dan perubahannya PP No. 59 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
9. PP No. 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;
10. PP No. 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
11. PP No. 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
12. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Perpres No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
14. Perpres No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
15. Perpres No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
16. Perpres No. 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
17. Perpres No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara.

18. Perpres Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 24 Tahun 2010;
19. Keppres No. 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014;
20. Keppres No. 100/M Tahun 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;
21. Peraturan Menteri PU No. 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PU;
22. Permen PU No. 10/PRT/M/2010 dan perubahannya No. 24/PRT/M/2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa konstruksi;
23. Permen PU No. 22/PRT/M/2010 tentang Perubahan Permen PU No. 03/PRT/M/2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian PU;
24. Permen PU No. 23/PRT/M/2010 tentang Perubahan Permen PU No. 02/PRT/M/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2010 – 2014;
25. Permen PU No. 04/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa konstruksi Nasional;
26. Permen PU No. 05/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing;
27. Permen PU No. 08/PRT/M/2011 Tentang Pembagian Sub Klasifikasi dan Sub Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi;
28. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
29. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Konstruksi No. 249/PRT/KK/2010 Tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum 2010–2014.

## Lampiran II

PENCAPAIAN KINERJA OUTPUT UTAMA BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI

BERDASARKAN LAKIP BP KONSTRUKSI 2014 TERHADAP RENSTRA

BPKONSTRUKSI 2010-2014 DAN ROADMAP PEMBINA JASA KONSTRUKSI 2010-2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra s/d 2014	Realisasi s/d 2014	%
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya kapasitas dan kinerja pembina jasa konstruksi di pusat dan daerah	1. Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang terbina sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Provinsi Kabupaten/Kota	18 280	33 486	183% 174%
	2. Tingkat daya saing industri konstruksi nasional dalam skala global	Poin Infrastructure GCI	5	5	100%
	3. Jumlah SDM jasa konstruksi yang terlatih	Orang	75.000	39.752	53%
	Outcome Penting Lainnya:				
	1. Persentase peningkatan efektifitas pelaksanaan perundang-undangan bidang jasa konstruksi melalui diseminasi/sosialisasi, revisi/ penyempurnaan peraturan perundang-undangan	% NSPK	20 2	20 16	100% 800%
	2. Jumlah produk regulasi di bidang usaha jasa konstruksi	NSPK	16	20	125%
	3. Meningkatnya kabupaten/kota yang memiliki Perda IUJK	%	10	12	120%
	4. Terbentuknya kepengurusan LPJK sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Provinsi Nasional	33 1	33 1	100% 100%
	5. Persentase tingkat penguasaan pangsa pasar domestik oleh pelaku konstruksi nasional	%	20	18,4	92%
	6. Jumlah dukungan kebijakan dalam membangun iklim investasi bidang infrastruktur	NSPK	5	13	260%
	7. Persentase tingkat akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat atas pengadaan barang/ jasa konstruksi	%	20	23	115%
	8. Rasio pemerintah daerah provinsi yang mampu menyelenggarakan pelatihan konstruksi berbasis kompetensi	Provinsi	5	20	400%



No.	Kegiatan / Output Utama	Satuan	RPJM 2010-2014	Renstra 2010-2014 (Revisi)	Total Capaian		
					2010-2014	% terhadap RPJM	% terhadap Renstra
1	2	3	4	5	9	10	11
<b>SEKRETARIAT BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI</b>							
1	Jumlah Pembinaan pembina jasa konstruksi daerah	laporan	N/A	39	39	N/A	100
2	Jumlah Kerjasama pembinaan konstruksi dalam dan luar negeri	laporan	N/A	23	23	N/A	100
3	Jumlah Pemantauan dan evaluasi pembinaan jasa konstruksi	laporan	N/A	23	23	N/A	100
4	Jumlah Kajian pembinaan jasa konstruksi	rekomen -dasi	N/A	25	21	N/A	84
5	Jumlah Diseminasi UU & PP tentang Jasa Konstruksi dalam rangka Dekonsentrasi	laporan	N/A	39	39	N/A	100,00
6	Jumlah Konsultasi/Bimbingan Teknis Pelaksanaan pembinaan Jasa Konstruksi Provinsi dalam rangka Dekonsentrasi	laporan	N/A	66	66	N/A	100
7	Jumlah Pengembangan Kelembagaan dan Koordinasi pembinaan Jasa Konstruksi di Daerah dalam rangka Dekonsentrasi	laporan	N/A	39	39	N/A	100,00
8	Jumlah Pengawasan Teknis penyelenggaraan pembinaan Jasa Konstruksi dalam rangka Dekonsentrasi	laporan	N/A	65	65	N/A	100
9	Jumlah NSPK pembinaan jasa konstruksi	NSPK	N/A	10	10	N/A	100
10	Jumlah Promosi Konstruksi Indonesia (KI)	laporan	N/A	8	8	N/A	100
11	Jumlah Dokumen program dan anggaran;	laporan	N/A	18	18	N/A	100
12	Jumlah Dokumen administrasi keuangan (SAK)	laporan	N/A	16	16	N/A	100
13	Jumlah Dokumen IBKMN (SABMN)	laporan	N/A	6	6	N/A	100
14	Jumlah Dokumen kepegawaian/ ortala	laporan	N/A	32	32	N/A	100
15	Jumlah Pembinaan kapasitas aparatur	laporan	N/A	66	66	N/A	100
16	Jumlah Sistem informasi manajemen jasa konstruksi	sistem informasi	N/A	7	7	N/A	100
17	Jumlah Peliputan dan pemberitaan di media massa	berita	N/A	10	10	N/A	100
<b>PUSAT PEMBINAAN USAHA DAN KELEMBAGAAN</b>							
1	Jumlah Pembinaan manajemen usaha	laporan	N/A	50	50	N/A	100
2	Jumlah Pembinaan sarana pendukung usaha	laporan	N/A	28	28	N/A	100
3	Jumlah Pembinaan regulasi usaha dan kelembagaan	laporan	N/A	34	34	N/A	100

No.	Kegiatan / Output Utama	Satuan	RPJM 2010-2014	Renstra 2010-2014 (Revisi)	Total Capaian		
					2010-2014	% terhadap RPJM	% terhadap Renstra
1	2	3	4	5	9	10	11
4	Jumlah Pembinaan perizinan usaha	laporan	N/A	42	42	N/A	100
5	Jumlah Pembinaan lembaga dan asosiasi jasa konstruksi Pusat	laporan	N/A	5	5	N/A	100
6	Jumlah Pembinaan lembaga dan asosiasi jasa konstruksi daerah	laporan	N/A	134	134	N/A	100
7	Jumlah Pembinaan tatalaksana kelembagaan	laporan	N/A	23	23	N/A	100
8	Jumlah Pembinaan kinerja kelembagaan	laporan	N/A	28	28	N/A	100
9	Jumlah Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembinaan usaha dan kelembagaan	laporan	N/A	13	13	N/A	100
10	Jumlah NSPK pembinaan dan pengembangan usaha dan kelembagaan	NSPK	N/A	18	21	N/A	100
11	Jumlah Produk kajian, pembinaan usaha dan kelembagaan	rekomen -dasi	N/A	32	32	N/A	100
<b>PUSAT PEMBINAAN SUMBER DAYA INVESTASI</b>							
1	Jumlah Norma, standar pedoman dan kriteria pembinaan investasi infrastruktur, material dan peralatan, serta pasar dan peningkatan daya saing	NSPK	N/A	12	12	N/A	100
2	Jumlah Sosialisasi dan diseminasi kebijakan, strategi dan pola-pola investasi	laporan	N/A	28	29	N/A	103,57
3	Jumlah Penyelenggaraan fasilitasi investasi di bidang infrastruktur	laporan	N/A	28	30	N/A	107,14
4	Jumlah Pembinaan kebijakan dan strategi pembinaan sumber daya material dan peralatan dalam mendukung investasi infrastruktur	laporan	N/A	28	30	N/A	107,14
5	Jumlah Sosialisasi dan diseminasi kebijakan, strategi pembinaan dan pengembangan sumber daya material dan peralatan konstruksi	laporan	N/A	28	28	N/A	100
6	Jumlah Pembinaan produktivitas dan daya saing industri konstruksi	laporan	N/A	28	28	N/A	100
7	Jumlah Pembinaan pasar konstruksi dalam negeri	laporan	N/A	28	28	N/A	100
8	Jumlah Pengembangan pasar konstruksi luar negeri	laporan	N/A	16	16	N/A	100
9	Jumlah Pembinaan	laporan	N/A	28	28	N/A	100

No.	Kegiatan / Output Utama	Satuan	RPJM 2010-2014	Renstra 2010-2014 (Revisi)	Total Capaian		
					2010-2014	% terhadap RPJM	% terhadap Renstra
1	2	3	4	5	9	10	11
	liberalisasi jasa konstruksi						
10	Jumlah Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pembinaan sumber daya investasi konstruksi	laporan	N/A	27	32	N/A	118,52
11	Jumlah Produk kajian pembinaan sumber daya investasi konstruksi	rekomen -dasi	N/A	28	28	N/A	100
<b>PUSAT PEMBINAAN PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI</b>							
1	Jumlah Pembinaan kebijakan pengadaan barang/jasa konstruksi	laporan	N/A	79	79	N/A	100
2	Jumlah Penyusunan rekomendasi proses pengadaan dan tanggapan atas sanggahan banding	laporan	N/A	14	14	N/A	100
3	Jumlah Pembinaan Sistem Manajemen Mutu Konstruksi (SMMK)	laporan	N/A	41	41	N/A	100
4	Jumlah Pembinaan administrasi kontrak konstruksi.	laporan	N/A	48	48	N/A	100
5	Jumlah Pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi	laporan	N/A	54	54	N/A	100
6	Jumlah Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembinaan penyelenggaraan konstruksi	laporan	N/A	24	24	N/A	100
7	Jumlah Produk pengaturan pembinaan penyelenggaraan konstruksi	NSPK	N/A	14	14	N/A	100
8	Jumlah Pembinaan teknologi konstruksi	laporan	N/A	14	14	N/A	100
9	Jumlah Penerapan dan pemberdayaan teknologi konstruksi	laporan	N/A	28	28	N/A	100
10	Jumlah Pembinaan standardisasi teknik konstruksi	laporan	N/A	9	9	N/A	100
11	Jumlah Produk kajian pembinaan penyelenggaraan jasa konstruksi	rekomen -dasi	N/A	26	24	N/A	92,31
<b>PEMBINAAN KOMPETENSI DAN PELATIHAN KONSTRUKSI</b>							
1	Jumlah bakuan kompetensi konstruksi (SKK, KPBK, MUK) yang dikembangkan untuk jabatan kerja bidang keahlian	laporan	50	68	68	136	100
2	Jumlah Penyelenggaraan pelatihan keahlian konstruksi	angka n	5800 orang atau 232 angkatan <sup>*)</sup>	215	242	104,31	112,56

No.	Kegiatan / Output Utama	Satuan	RPJM 2010-2014	Renstra 2010-2014 (Revisi)	Total Capaian		
					2010-2014	% terhadap RPJM	% terhadap Renstra
1	2	3	4	5	9	10	11
3	Jumlah Penyusunan program pelatihan dan kerjasama keahlian konstruksi (MRA)	laporan	N/A	10	11	N/A	110
4	Jumlah Penyusunan modul pelatihan keahlian konstruksi	paket modul	40	36	58	145	161,11
5	Jumlah Penyelenggaraan pelatihan untuk calon pelatih (TOT) dan asesor tenaga ahli konstruksi	angkatan	1250 orang atau 50 angkatan <sup>1)</sup>	62	84	168	135,48
6	Jumlah Produk pengaturan pembinaan kompetensi dan pelatihan konstruksi	NSPK	N/A	18	18	N/A	100
7	Jumlah baku kompetensi konstruksi (SKK, KPBK, MUK) yang dikembangkan untuk jabatan kerja bidang keterampilan	paket	150	86	86	57,33	100
8	Jumlah Kegiatan pelatihan keterampilan tukang, teknisi peralatan dan perbengkelan jasa konstruksi	angkatan	31500 orang atau 1260 angkatan <sup>1)</sup>	650	1.127	89,44	173,38
9	Jumlah Penyusunan program pelatihan manajemen teknik (teknisi) konstruksi, peralatan dan perbengkelan, serta program pelatihan keterampilan konstruksi	laporan	N/A	21	21	N/A	100
10	Jumlah Penyusunan kurikulum dan silabus pelatihan manajemen teknik (teknisi) konstruksi dan pelatihan keterampilan konstruksi	paket modul	80	58	62	77,5	106,89
11	Jumlah Pembinaan kapasitas lembaga diklat daerah/provinsi	laporan	N/A	57	57	N/A	100
12	Jumlah Kerjasama pelatihan/sertifikasi keterampilan konstruksi dengan SMK dan institusi pendidikan vokasional (diploma)	laporan	N/A	150	187	N/A	124,67
13	Jumlah Kerjasama pelatihan/sertifikasi keterampilan konstruksi dengan institusi diklat swasta/masyarakat jasa konstruksi	laporan	N/A	55	72	N/A	130,91
14	Jumlah Revitalisasi balai peningkatan kemampuan dan kompetensi konstruksi	balai	10	47	46	460	97,87

No.	Kegiatan / Output Utama	Satuan	RPJM 2010-2014	Renstra 2010-2014 (Revisi)	Total Capaian		
					2010-2014	% terhadap RPJM	% terhadap Renstra
1	2	3	4	5	9	10	11
15	Jumlah pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembinaan kompetensi dan pelatihan konstruksi	laporan	N/A	50	51	N/A	102
16	Jumlah Produk kajian pembinaan kompetensi dan pelatihan konstruksi	rekomendasi	N/A	20	21	N/A	105
	Jumlah Penyelenggaraan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk program pemagangan dan pendidikan ahli konstruksi	laporan	Output ini dihapus seiring dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum. Berdasarkan peraturan ini terjadi perubahan struktur organisasi pada Badan Pembinaan Konstruksi yang menghapus unit kerja Pusat Pembinaan Keahlian dan Teknik Konstruksi, sehingga output ini tidak lagi menjadi tugas fungsi dari Badan Pembinaan Konstruksi				
	Jumlah Penyelenggaraan pelatihan untuk calon pelatih (TOT) dan asesor teknis dan keterampilan konstruksi	angkatan	dihapus				

## Lampiran III

---

### KEGIATAN-KEGIATAN

#### SOSIALISASI/DISEMINASI/SEMINAR/WORKSHOP/PELATIHAN YANG TELAH DAN RUTIN DILAKUKAN OLEH BP KONSTRUKSI

Kegiatan-kegiatan sosialisasi yang telah dan rutin dilakukan oleh BP Konstruksi, antara lain sebagai berikut:

1. Kegiatan Seminar Internasional Quantity Surveyor
2. Kegiatan Pelatihan Project Cycle
3. Kegiatan Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah
4. Kegiatan Promosi Konstruksi Indonesia
5. Kegiatan Pemberdayaan dan TOT Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha Jasa Konstruksi Kualifikasi Kecil serta kegiatan Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha Jasa Konstruksi Kualifikasi Non Kecil
6. Kegiatan Kinerja Proyek Konstruksi
7. Kegiatan Penyelenggaraan Forum Jasa Konstruksi Nasional
8. Kegiatan Forum Pendukung Usaha Jasa Konstruksi.
9. Kegiatan Bimbingan Teknis Percepatan Penerbitan Perda IUJK
10. Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan BUJK Asing
11. Kegiatan SIPJAKI
12. Kegiatan pelatihan asesor badan usaha
13. Kegiatan Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria pembinaan investasi infrastruktur, material dan peralatan, serta pasar dan peningkatan daya
14. Bantek Pola Pembiayaan Investasi Infrastruktur dan Pelatihan Investasi terkait Infrastruktur
15. Sosialisasi dan Diseminasi Produk-Produk Peraturan terkait Investasi Infrastruktur
16. Sistem Informasi Sumber Daya Investasi (SISDI)
17. Pelatihan keahlian konstruksi, keterampilan tukang, teknisi peralatan dan perbengkelan jasa konstruksi serta pelatihan untuk calon pelatih (TOT) dan asesor tenaga ahli konstruksi

### SASARAN STRATEGIS, OUTCOME, OUTPUT, BESERTA INDIKATOR KINERJA

[illegible]

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN/ INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET					
				2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
1	2		3	5	6	7	8	9	10
	<b>SASARAN KEGIATAN</b>								
	1	<b>Tersedianya Pengaturan pembinaan investasi infrastruktur</b>							
	(1)	Jumlah Draft NSPK Pembinaan Investasi Infrastruktur	Draft NSPK	4	4	4	4	4	20
	2	<b>Terlaksananya pemantauan dan evaluasi investasi infrastruktur dan Pengelolaan Risiko</b>							
	(1)	Jumlah profil pembinaan investasi infrastruktur dan pengelolaan risiko	Profil	4	4	4	4	4	20
	3	<b>Pengelolaan administrasi perkantoran</b>							
	(1)	Jumlah Layanan Perkantoran	Laporan Bulan Layanan	13	13	13	13	13	65
	<b>SASARAN KEGIATAN</b>								
	1	<b>Tersedianya pengaturan pembinaan penyelenggaraan konstruksi</b>							
	(1)	Jumlah draft NSPK pembinaan penyelenggaraan konstruksi	Draft NSPK	7	7	7	7	7	35
	2	<b>Terlaksananya pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan konstruksi</b>							
	(1)	Jumlah profil pembinaan penyelenggaraan konstruksi	Profil	5	5	5	5	5	25
	2	<b>Pengelolaan administrasi perkantoran</b>							
	(1)	Jumlah Layanan Perkantoran	Laporan Bulan Layanan	13	13	13	13	13	65
	<b>SASARAN KEGIATAN</b>								
	1	<b>Tersedianya pengaturan pembinaan kelembagaan dan sumber daya jasa konstruksi</b>							



PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN/ INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET					
				2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
1	2		3	5	6	7	8	9	10
	(1)	Jumlah draft NSPK pembinaan kelembagaan dan sumber daya jasa konstruksi	Draft NSPK	8	8	8	8	8	40
	2	<b>Terlaksananya pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sumber daya jasa konstruksi</b>							
	(1)	Jumlah profil pembinaan kelembagaan dan sumber daya jasa konstruksi	Profil	8	8	8	8	8	40
	3	<b>Pengelolaan administrasi perkantoran</b>							
	(1)	Jumlah Layanan Perkantoran	Laporan Bulan Layanan	13	13	13	13	13	65
<b>SASARAN KEGIATAN</b>									
1	<b>Tersedianya pengaturan pembinaan kompetensi dan produktivitas kerja konstruksi</b>								
	(1)	Jumlah draft NSPK kompetensi dan produktivitas kerja konstruksi	Draft NSPK	26	30	36	36	27	155
2	<b>Terlaksananya pemantauan dan evaluasi kompetensi dan produktivitas kerja konstruksi</b>								
	(1)	Jumlah profil kompetensi dan produktivitas kerja konstruksi	Profil	3	3	3	3	3	15
3	<b>Pengelolaan administrasi perkantoran</b>								
	(1)	Jumlah Layanan Perkantoran	Laporan Bulan Layanan	13	13	13	13	13	65
<b>SASARAN KEGIATAN</b>									
1	<b>Terlaksananya Kerjasama dan pemberdayaan peningkatan kompetensi SDM konstruksi</b>								
	(1)	Jumlah profil kerjasama dan pemberdayaan peningkatan kompetensi SDM konstruksi	Profil	1	1	1	1	1	5
2	<b>Pengelolaan administrasi perkantoran</b>								

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN/ INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET					
				2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
1	2		3	5	6	7	8	9	10
	(1)	Jumlah Layanan Perkantoran	Laporan Bulan Layanan	13	13	13	13	13	65
	<b>SASARAN KEGIATAN</b>								
	1	<b>Layanan teknis dan administrasi pembinaan jasa konstruksi</b>							
	1	Jumlah layanan teknis dan administrasi pembinaan jasa konstruksi	Dokumen/ Laporan	5	5	5	5	5	25
	2	<b>Pengelolaan administrasi perkantoran</b>							
		Jumlah Layanan Perkantoran	Laporan Bulan Layanan	13	13	13	13	13	65

## STRATEGI PENCAPAIAN PADATUJUANI

No.	Penjabaran Strategi Pencapaian	Unit Kerja yang Relevan						Koordinator
		KSDJ K	PJK	II	KPK	KSP	SDJ	
1	Roadmap Pembinaan yang jelas dan terukur							
	1.1 Identifikasi kebutuhan sinkronisasi Roadmap Ditjen Bina Konstruksi dengan Roadmap masing-masing direktorat (eselon II).	.	.	.	.	.	.	SDJ (Sekretariat Direktorat Jenderal)
	1.2 Perbaikan Roadmap Ditjen Bina Konstruksi dan Roadmap masing-masing direktorat.	.	.	.	.	.	.	
	1.3 Evaluasi ketercapaian Roadmap.	.	.	.	.	.	.	
2	Sistem Pembinaan Konstruksi yang efektif							
	2.1 Sistem Pembinaan Konstruksi yang ada dan keterkaitannya antara pusat dan daerah.							Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan (KSP)
	2.1.1 Evaluasi kinerja Sistem Pembinaan Konstruksi yang ada dan keterkaitannya antara pusat dan daerah.	.	.	.	.	.	.	
	2.1.2 Kajian untuk perbaikan Sistem Pembinaan Konstruksi baik di pusat dan daerah serta keterkaitan antara keduanya harus diperjelas melalui TUPOKSI dan wewenang yang memadai.	.	.	.	.	.	.	

No.	Penjabaran Strategi Pencapaian	Unit Kerja yang Relevan						Koordinator
		KSDJ K	PJK	II	KPK	KSP	SDJ	
	2.1.3 Pengembangan Sistem Pembinaan Konstruksi di pusat dan daerah.	•	•	•	•	•	•	
	2.2 Persepsi dalam pelaksanaan pembinaan konstruksi baik di pusat maupun daerah							
	2.2.1 Penyamaan persepsi dalam pelaksanaan pembinaan konstruksi baik di pusat maupun daerah.	•	•	•	•	•	•	KSP
	2.3 Persepsi atas bentuk pembinaan yang dilakukan masing-masing stakeholders.							
	2.3.1 Penyamaan persepsi atas bentuk pembinaan yang dilakukan masing-masing stakeholders.	•	•	•	•	•	•	KSP
	2.4 Kapasitas pembinaan di daerah							
	2.4.1 Evaluasi kapasitas pembinaan di daerah dengan kebutuhannya.	•	•	•	•	•	•	KSP
	2.4.2 Kajian untuk pengembangan upaya peningkatan kapasitas pembinaan di daerah dengan kebutuhannya.	•	•	•	•	•	•	
	2.4.3 Program peningkatan kapasitas pembinaan di daerah dengan kebutuhannya.	•	•	•	•	•	•	
3	Regulasi Pembinaan yang menyeluruh dan tanggap							
	3.1 Mekanisme baku dalam pengembangan regulasi.							

No.	Penjabaran Strategi Pencapaian	Unit Kerja yang Relevan						Koordinator
		KSDJ K	PJK	II	KPK	KSP	SDJ	
	3.1.1 Peninjauan ulang mekanisme baku dalam pengembangan regulasi.	•	•	•	•	•	•	SDJ
	3.1.2 Pengembangan mekanisme baku dalam pengembangan regulasi.	•	•	•	•	•	•	
	3.1.3 Evaluasi efektivitas mekanisme baku dalam pengembangan regulasi.	•	•	•	•	•	•	
	<b>3.2 Kualitas Regulasi</b>							
	3.2.1 Evaluasi antara kebutuhan dengan ketersediaan serta cakupan dari regulasi pembinaan yang ada	•	•	•	•	•	•	SDJ
	3.2.2 Kajian kualitas regulasi pembinaan yang ada	•	•	•	•	•	•	
	3.2.3 Perbaiki regulasi pembinaan yang menyeluruh dan tanggap	•	•	•	•	•	•	

## STRATEGI PENCAPAIAN PADA TUJUAN II

No.	Penjabaran Strategi Pencapaian	Bagian Ditjen Bina Konstruksi yang Relevan						Koordinator
		KSDJK	PJK	II	KPK	KSP	SDJ	
1	<b>Investasi (Konstruksi) Infrastruktur yang katalis dan inovatif</b>							
	1.1 Evaluasi terhadap skema investasi (Konstruksi) infrastruktur serta sistem pendukungnya	•	•	•				Direktorat Bina Investasi Infrastruktur (II)
	1.2 Pengembangan berbagai inovasi investasi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur sesuai dengan jenis infrastruktur dan sistem pendukungnya	•	•	•				
	1.3 Pengembangan regulasi terkait implementasi berbagai inovasi investasi	•	•	•				
	1.4 Evaluasi efektivitas regulasi dan berbagai inovasi investasi setelah diterapkan	•	•	•				
2	<b>Sistem Penyelenggaraan Konstruksi</b>							
	2.1 Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi yang efektif dan efisien							
	2.1.1 Evaluasi terhadap sistem pengadaan yang ada serta isu-isu terkait dan pengelolaannya	•	•	•	•			Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (PJK)
	2.1.2 Pengembangan sistem pengadaan yang efektif dan efisien	•	•	•	•			
	2.1.3 Pengembangan regulasi terkait implementasi sistem	•	•	•	•			

No.	Penjabaran Strategi Pencapaian	Bagian Ditjen Bina Konstruksi yang Relevan						Koordinator
		KSDJK	PJK	II	KPK	KSP	SDJ	
	pengadaan yang efektif dan efisien							
	2.1.4 Evaluasi efektivitas regulasi dan implementasi sistem pengadaan	•	•	•	•			
	2.2 Administrasi Kontrak Konstruksi yang secara seimbang mengatur hak dan kewajiban pengguna dan penyedia jasa							
	2.2.1 Kajian manajemen risiko berbagai investasi konstruksi serta alokasi risikonya	•	•	•	•			PJK
	2.2.2 Pengembangan Dokumen Kontrak Standard sesuai dengan jenis investasi dan infrastrukturnya serta Administrasi Kontraknya	•	•	•	•			
	2.2.3 Pengembangan regulasi terkait dengan implementasi administrasi kontrak investasi konstruksi	•	•	•	•			
	2.2.4 Evaluasi efektivitas regulasi dan implementasi administrasi kontrak investasi konstruksi	•	•	•	•			
	2.3 Penyelesaian Sengketa Konstruksi yang efektif dan efisien							
	2.3.1 Identifikasi kebutuhan penyelesaian sengketa konstruksi yang efektif dan efisien	•	•	•	•			PJK
	2.3.2 Pengembangan sistem penyelesaian sengketa konstruksi	•	•	•	•			

No.	Penjabaran Strategi Pencapaian	Bagian Ditjen Bina Konstruksi yang Relevan						Koordinator
		KSDJK	PJK	II	KPK	KSP	SDJ	
	2.3.3 Pengembangan regulasi penyelesaian sengketa konstruksi yang efektif dan efisien	•	•	•	•			
	2.3.4 Evaluasi efektivitas sistem penyelesaian sengketa konstruksi	•	•	•	•			
	2.4 Standard dan Peraturan Teknis Penyelenggaraan Konstruksi							
	2.4.1 Identifikasi dan pemetaan standard dan peraturan teknis terkait penyelenggaraan konstruksi	•	•	•	•			PJK
	2.4.2 Pengembangan standard dan peraturan teknis penyelenggaraan konstruksi	•	•	•	•			
	2.5 Metoda Penyelenggaraan Proyek Konstruksi							
	2.5.1 Kajian kebutuhan akan berbagai metoda penyelenggaraan proyek konstruksi	•	•	•	•			PJK
	2.5.2 Pengembangan manual berbagai penyelenggaraan proyek konstruksi	•	•	•	•			
	2.6 Pengelolaan Rantai Pasok untuk Penyelenggaraan Konstruksi							
	2.6.1 Kajian Pengembangan Dokumen Standar untuk Sub-Kontrak Konstruksi	•	•	•				PJK
	2.6.2 Kajian Model Manajemen Rantai Pasok Konstruksi untuk Mendukung Penyelenggaraan Konstruksi	•	•	•	•			



No.	Penjabaran Strategi Pencapaian	Bagian Ditjen Bina Konstruksi yang Relevan						Koordinator
		KSDJK	PJK	II	KPK	KSP	SDJ	
	2.6.3 Pengembangan regulasi pengelolaan rantai pasok untuk penyelenggaraan konstruksi	.	.	.	.			
	2.6.4 Evaluasi pengelolaan rantai pasok untuk penyelenggaraan konstruksi	.	.	.	.			

## STRATEGI PENCAPAIAN PADATUJUANIII

No.	Penjabaran Strategi Pencapaian	Bagian Ditjen Bina Konstruksi yang Relevan						Koordinator
		KSDJK	PJK	II	KPK	KSP	SDJ	
1	Dukungan Rantai Pasok Konstruksi yang Memadai							
	1.1 Identifikasi kebutuhan ( <i>demand</i> ) dan pasokan ( <i>supply</i> ) sumber daya konstruksi (material, SDM, sub-kontraktor, peralatan, teknologi)	•	•	•	•			Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi (KSDJK)
	1.2 Perancangan dukungan rantai pasok konstruksi pada tingkat makro (material, SDM, sub-kontraktor, peralatan, teknologi)	•	•	•	•			
	1.3 Pengembangan regulasi terkait rancangan rantai pasok konstruksi secara makro	•	•	•	•			
	1.4 Evaluasi efektivitas regulasi terkait rantai pasok konstruksi secara makro	•	•	•	•			
2	Peningkatan Kapasitas Pembinaan yang menyeluruh dan merata							
	2.1 Peningkatan kapasitas SDM Pembinaan							
	2.1.1 Identifikasi kebutuhan SDM Pembinaan di pusat dan daerah serta kondisi yang ada	•	•	•	•		•	SDJ
	2.1.2 Pengembangan standar kebutuhan dan kompetensi SDM Pembinaan di pusat dan daerah	•	•	•	•		•	
	2.1.3 Program pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM Pembinaan di daerah bekerja sama dengan daerah	•	•	•	•		•	

No.	Penjabaran Strategi Pencapaian	Bagian Ditjen Bina Konstruksi yang Relevan						Koordinator
		KSDJK	PJK	II	KPK	KSP	SDJ	
	2.1.4 Program dukungan pusat untuk peningkatan kapasitas SDM Pembinaan di daerah	•	•	•	•		•	
	2.2 Peningkatan Fasilitas Pendukung Pembinaan							
	2.2.1 Identifikasi kebutuhan Fasilitas Pendukung Pembinaan	•	•	•	•		•	SDJ
	2.2.2 Pengembangan standar fasilitas yang dibutuhkan untuk mendukung pembinaan	•	•	•	•		•	
	2.2.3 Program dukungan pusat untuk peningkatan fasilitas pembinaan di daerah	•	•	•	•		•	
<b>3</b>	<b>Peningkatan kompetensiSDM Konstruksi</b>							
	3.1 Standar Kompetensi Kerja							
	3.1.1 Evaluasi Kualitas dan Kuantitas Standar Kompetensi Kerja	•	•	•	•			Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi (KPK)
	3.1.2 Pembenahan Kualitas dan Kuantitas Standar Kompetensi Kerja	•	•	•	•			
	3.1.3 Pengembangan Kualitas dan Kuantitas Standar Kompetensi Kerja	•	•	•	•			
	3.2 Program Pelatihan berbasis kompetensi							
	3.2.1 Pengembangan program pelatihan berbasis kompetensi	•	•	•	•			KPK
	3.2.2 Pelatihan TOT untuk pelatihan berbasis kompetensi	•	•	•	•			

No.	Penjabaran Strategi Pencapaian	Bagian Ditjen Bina Konstruksi yang Relevan						Koordinator
		KSDJK	PJK	II	KPK	KSP	SDJ	
	3.2.3 Dukungan terhadap pusat pendidikan dan pelatihan dalam pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi	•	•	•	•			
<b>4</b>	<b>Pelaku dan Masyarakat Konstruksi yang kokoh dan mandiri</b>							
	4.1 Kelembagaan Jasa Konstruksi (LPJK) yang kokoh dan mandiri							
	4.1.1 Evaluasi kinerja LPJK secara keseluruhan (LPJKN dan LPJKP)	•						KSDJK
	4.1.2 Pengembangan LPJK yang profesional	•						
	4.1.3 Pengembangan regulasi implementasi LPJK yang profesional	•						
	4.1.4 Dukungan bagi implementasi LPJK yang profesional	•						
	4.2 Pengembangan Struktur Usaha yang Efektif							
	4.2.1 Evaluasi kinerja struktur usaha yang ada serta permasalahannya	•	•	•	•			KSDJK
	4.2.2 Pengembangan struktur usaha yang efektif untuk pasar konstruksi di Indonesia	•	•	•	•			
	4.2.3 Pengembangan regulasi untuk re-strukturisasi usaha konstruksi	•	•	•	•			
	4.2.4 Evaluasi efektivitas implementasi re-strukturisasi usaha konstruksi	•	•	•	•			

No.	Penjabaran Strategi Pencapaian	Bagian Ditjen Bina Konstruksi yang Relevan						Koordinator
		KSDJK	PJK	II	KPK	KSP	SDJ	
	4.3 Penciptaan Pasar Konstruksi Indonesia yang Kondusif							
	4.3.1 Evaluasi pasar konstruksi Indonesia berdasarkan jenis konstruksi dan klasifikasi usaha kontraktor	•	•	•	•			II
	4.3.2 Pengembangan kebijakan terkait dengan penciptaan pasar yang kondusif untuk pasar konstruksi yang harus ada campur tangan pemerintah	•	•	•	•			
	4.3.3 Evaluasi efektivitas implementasi kebijakan pasar yang kondusif	•	•	•	•			
	4.4 Peningkatan Peran Masyarakat Konstruksi yang Aktif							
	4.4.1 Identifikasi komponen masyarakat konstruksi yang dapat menjadi penggerak dalam masyarakat untuk aktif	•	•	•	•	•		KSP
	4.4.2 Pengembangan program peningkatan peran aktif masyarakat konstruksi	•	•	•	•	•		
	4.4.3 Evaluasi efektivitas program peningkatan peran aktif masyarakat konstruksi	•	•	•	•	•		

## STRATEGI PENCAPAIAN PADATUJUANIV

No.	Penjabaran Strategi Pencapaian	Bagian Ditjen Bina Konstruksi yang Relevan						Koordinator
		KSDJK	PJK	II	KPK	KSP	SDJ	
1	Tersedianya Informasi konstruksi dan sumber daya konstruksi yang andal							
	1.1 Tersedianya informasi konstruksi sebagai referensi pelaku konstruksi							
	1.1.1 Identifikasi informasi konstruksi yang dibutuhkan oleh seluruh stakeholder konstruksi beserta keberadaannya	•	•	•	•			SDJ
	1.1.2 Pengembangan informasi konstruksi yang harus dikelola oleh Pemerintah	•	•	•	•			
	1.1.3 Mendukung pengembangan informasi konstruksi yang dikelola bekerjasama dengan stakeholder lain	•	•	•	•			
	1.1.4 Melakukan integrasi informasi konstruksi dalam sistem informasi	•	•	•	•		•	
	1.2 Tersedianya sumber daya konstruksi							
	1.2.1 Identifikasi sumber daya konstruksi yang dibutuhkan oleh konstruksi nasional	•	•	•	•			KSDJK
	1.2.2 Koordinasi dengan pihak-pihak lain untuk mendukung ketersediaan sumber daya yang penting bagi konstruksi nasional	•	•	•	•	•		
	1.2.3 Evaluasi ketersediaan sumber daya konstruksi secara nasional	•	•	•	•			

No.	Penjabaran Strategi Pencapaian	Bagian Ditjen Bina Konstruksi yang Relevan						Koordinator
		KSDJK	PJK	II	KPK	KSP	SDJ	
2	Kerja sama dan partisipasi stakeholders dalam menciptakan informasi konstruksi dan sumber daya konstruksi yang dibutuhkan							
	2.1 Kerja sama dengan stakeholder lain dalam penyediaan informasi konstruksi dan ketersediaan sumber daya konstruksi							
	2.1.1 Identifikasi pihak-pihak yang dapat menyediakan data dan informasi konstruksi serta sumber daya konstruksi yang dibutuhkan.	•	•	•	•	•	•	SDJ
	2.1.2 Inisiasi kerja sama untuk menyediakan informasi dan sumber daya konstruksi yang dibutuhkan.	•	•	•	•	•	•	
	2.1.3 Evaluasi efektivitas kerja sama.	•	•	•	•	•	•	

## STRATEGI PENCAPAIAN PADATUJUANV

No.	Penjabaran Strategi Pencapaian	Bagian Ditjen Bina Konstruksi yang Relevan						Koordinator
		KSDJK	PJK	II	KPK	KSP	SDJ	
1	Peningkatan kualitas produk dan layanan dengan pemberdayaan litbang.							
	1.1 Peninjauan ulang kualitas produk dan layanan.							
	1.1.1 Evaluasi kualitas produk dan layanan.	•	•	•	•	•	•	SDJ
	1.1.2 Perencanaan kebutuhan litbang untuk mendukung peningkatan kualitas produk dan layanan.	•	•	•	•	•	•	
	1.1.3 Kegiatan litbang terkait dengan produk dan layanan.	•	•	•	•	•	•	
	1.2 Pelaksanaan litbang yang mendukung pengembangan produk dan layanan dengan target segmen baru yang saat ini belum dilakukan.							
	1.2.1 Identifikasi produk dan layanan yang perlu dikembangkan.	•	•	•	•			SDJ
	1.2.2 Perencanaan kebutuhan litbang untuk mendukung pengembangan produk dan layanan.	•	•	•	•			
	1.2.3 Kegiatan litbang terkait dengan pengembangan produk dan layanan.	•	•	•	•			
2	Kerja sama dan partisipasi stakeholders dalam litbang.							
	2.1 Peningkatan kerja sama dalam litbang dengan stakeholders							



No.	Penjabaran Strategi Pencapaian	Bagian Ditjen Bina Konstruksi yang Relevan						Koordinator
		KSDJK	PJK	II	KPK	KSP	SDJ	
	2.1.1 Identifikasi stakeholder yang mampu mendukung litbang.	•	•	•	•	•	•	KSP
	2.1.2 Pengembangan program litbang bersama dengan stakeholder lain.	•	•	•	•	•	•	
	2.1.3 Dukungan terhadap kegiatan program litbang yang diselenggarakan stakeholder lain.	•	•	•	•	•	•	
	2.1.4 Evaluasi efektivitas kerja sama.	•	•	•	•	•	•	
<b>3</b>	<b>Peningkatan Sistem Litbang yang efektif</b>							
	3.1 Fungsi dan peran strategis litbang							
	3.1.1 Evaluasi fungsi dan peranan litbang dalam mendukung pengembangan produk dan layanan	•	•	•	•		•	SDJ
	3.1.2 Pengembangan sistem litbang yang strategis dalam mendukung pengembangan produk dan layanan	•	•	•	•		•	
	3.1.3 Evaluasi efektivitas sistem litbang.	•	•	•	•		•	
	3.2 Sistem pengelolaan litbang yang efektif							
	3.2.1 Evaluasi sistem pengelolaan dan pengadaan jasa dalam litbang.	•	•	•	•		•	SDJ
	3.2.2 Perbaikan sistem pengelolaan dan pengadaan jasa dalam litbang	•	•	•	•		•	
	3.2.3 Evaluasi efektivitas sistem pengelolaan dan pengadaan jasa dalam	•	•	•	•		•	

No.	Penjabaran Strategi Pencapaian	Bagian Ditjen Bina Konstruksi yang Relevan						Koordinator
		KSDJK	PJK	II	KPK	KSP	SDJ	
	litbang							
4	Sosialisasi Produk dan Layanan yang efektif							
	4.1 Kerja sama dengan berbagai stakeholders dalam pelaksanaan sosialisasi produk dan layanan							
	4.1.1 Identifikasi pihak-pihak yang berpotensi dalam sosialisasi produk dan layanan	•	•	•	•	•	•	KSP
	4.1.2 Program kerja sama dalam sosialisasi produk dan layanan dengan semua pihak yang berpotensi membantu	•	•	•	•	•	•	
	4.1.3 Menciptakan <i>champion-champion</i> baru dan melebarkan jaringan dengan stakeholders untuk sosialisasi.	•	•	•	•	•	•	
	4.1.4 Evaluasi efektivitas kerja sama.	•	•	•	•	•	•	
	4.2 Penggunaan media sosialisasi yang beragam dan efektif.							
	4.2.1 Evaluasi media sosialisasi yang telah digunakan.	•	•	•	•	•	•	KSP
	4.2.2 Pengembangan media sosialisasi yang lebih beragam dan efektif.	•	•	•	•	•	•	
	4.2.3 Program sosialisasi di berbagai media	•	•	•	•	•	•	
	4.2.4 Evaluasi efektivitas media sosialisasi	•	•	•	•	•	•	

No.	Penjabaran Strategi Pencapaian	Bagian Ditjen Bina Konstruksi yang Relevan						Koordinator
		KSDJK	PJK	II	KPK	KSP	SDJ	
	4.3 Kualitas muatan sosialisasi							
	4.3.1 Evaluasi kualitas konten sosialisasi	•	•	•	•	•	•	KSP
	4.3.2 Pengembangan kualitas konten sosialisasi.	•	•	•	•	•	•	
	4.3.3 Pengukuran efektivitas konten sosialisasi.	•	•	•	•	•	•	
	4.4 Integrasi program sosialisasi produk dan layanan.							
	4.4.1 Evaluasi program sosialisasi semua eselon II	•	•	•	•	•	•	KSP
	4.4.2 Perancangan sistem sosialisasi BP Konstruksi.	•	•	•	•	•	•	
	4.4.3 Kegiatan sosialisasi terpadu.	•	•	•	•	•	•	
	4.4.4 Evaluasi efektivitas program sosialisasi terpadu.	•	•	•	•	•	•	

## STRATEGI PENCAPAIAN PADA PROSES BISNIS INTERNAL (PENDUKUNG)

No.	Penjabaran Strategi Pencapaian	Bagian Ditjen Bina Konstruksi yang Relevan						Koordinator
		KSDJK	PJK	II	KPK	KSP	SDJ	
1	Kepemimpinan yang kuat							
	1.1 Kepemimpinan Ditjen Bina Konstruksi.							
	1.1.1 Evaluasi atas kepemimpinan Ditjen Bina Konstruksisecara internal dan eksternal.	•	•	•	•	•	•	SDJ
	1.1.2 Perbaikan kepemimpinan Ditjen Bina Konstruksiinternal serta soliditas antar eselon II.	•	•	•	•	•	•	
	1.1.3 Perkuatan kepemimpinan Ditjen Bina Konstruksidi Kemen PU.	•	•	•	•	•	•	
	1.1.4 Perkuatan kepemimpinan Ditjen Bina Konstruksidi Jasa Konstruksi.	•	•	•	•	•	•	
	1.1.5 Perkuatan kepemimpinan Ditjen Bina Konstruksidengan daerah.	•	•	•	•	•	•	
	1.1.6 Perkuatan kepemimpinan Ditjen Bina Konstruksi dengan kementrian lain.	•	•	•	•	•	•	
	1.1.7 Evaluasi kepemimpinan Ditjen Bina Konstruksi	•	•	•	•	•	•	
2	Perencanaan yang terarah dan terpadu							
	2.1 Koordinasi dan sinkronisasi antar masing-masing direktorat untuk meningkatkan efektifitas perencanaan terpusat							

No.	Penjabaran Strategi Pencapaian	Bagian Ditjen Bina Konstruksi yang Relevan						Koordinator
		KSDJK	PJK	II	KPK	KSP	SDJ	
	2.1.1 Evaluasi kinerja sistem perencanaan terpusat yang ada.	•	•	•	•	•	•	SDJ
	2.1.2 Perbaikan dalam koordinasi dan sinkronisasi antar masing-masing direktorat untuk meningkatkan efektifitas perencanaan terpusat.	•	•	•	•	•	•	
	2.1.3 Evaluasi efektifitas perencanaan terpusat.	•	•	•	•	•	•	
<b>3</b>	<b>Monitoring dan Evaluasi Kinerja yang efektif</b>							
	3.1 Sistem monitoring dan evaluasi kinerja pada masing-masing direktorat dan secara keseluruhan Ditjen Bina Konstruksi							
	3.1.1 Evaluasi sistem money yang ada beserta unit pengawasannya.	•	•	•	•	•	•	SDJ
	3.1.2 Perbaikan sistem money pada masing-masing direktorat dan secara keseluruhan Ditjen Bina Konstruksi	•	•	•	•	•	•	
	3.1.3 Kajian kebutuhan akan unit khusus untuk pengawasan							
	3.1.4 Evaluasi efektivitas sistem money.	•	•	•	•	•	•	
	3.2 Sistem money atas keterlaksanaan program kerja dan roadmap							
	3.2.1 Evaluasi hasil sistem monitoring dan evaluasi atas keterlaksanaan program kerja dan roadmap.	•	•	•	•	•	•	SDJ



No.	Penjabaran Strategi Pencapaian	Bagian Ditjen Bina Konstruksi yang Relevan						Koordinator
		KSDJK	PJK	II	KPK	KSP	SDJ	
1	Struktur Organisasi yang efektif dan tepat sasaran							
	1.1 Memperkuat struktur organisasi							
	1.1.1 Evaluasi struktur organisasi sesuai dengan misi.	•	•	•	•	•	•	SDJ
	1.1.2 Perbaikan struktur organisasi.	•	•	•	•	•	•	
	1.1.3 Kajian perkuatan organisasi Ditjen Bina Konstruksi yang lebih besar.	•	•	•	•	•	•	
	1.1.4 Evaluasi implementasi struktur organisasi.	•	•	•	•	•	•	
	1.2 Perbaikan TUPOKSI antar direktorat serta pemerataan kewenangan dan tanggung jawabnya.							
	1.2.1 Evaluasi tumpang tindih TUPOKSI antar direktorat, kewenangan dan tanggung jawabnya.	•	•	•	•	•	•	SDJ
	1.2.2 Perbaikan TUPOKSI masing-masing direktorat.	•	•	•	•	•	•	
	1.2.3 Evaluasi efektivitas TUPOKSI.	•	•	•	•	•	•	

No.	Penjabaran Strategi Pencapaian	Bagian Ditjen Bina Konstruksi yang Relevan						Koordinator
		KSDJK	PJK	II	KPK	KSP	SDJ	
	<b>1.3 SOP dan implementasinya</b>							
	1.3.1 Evaluasi SOP dan implementasinya untuk mendukung Organisasi dan TUPOKSI.	•	•	•	•	•	•	SDJ
	1.3.2 Pengembangan SOP dan implementasinya	•	•	•	•	•	•	
	1.3.3 Evaluasi efektivitas implementasi SOP	•	•	•	•	•	•	
<b>2</b>	<b>Sistem Manajemen SDM yang berkelanjutan</b>							
	2.1 Sistem manajemen SDM Ditjen Bina Konstruksi dalam menjawab kebutuhan organisasi.							
	2.1.1 Evaluasi kinerja sistem manajemen SDM dalam menjawab kebutuhan organisasi.	•	•	•	•	•	•	SDJ
	2.1.2 Pembenahan sistem manajemen SDM dalam menjawab kebutuhan organisasi.	•	•	•	•	•	•	
	2.1.3 Evaluasi efektivitas sistem manajemen SDM dalam menjawab kebutuhan organisasi.	•	•	•	•	•	•	
	2.2 Kualitas SDM Ditjen Bina Konstruksi yang memiliki pengalaman lapangan yang memadai dan pengarah/pendamping dalam litbang							
	2.2.1 Evaluasi sistem rekrutmen dan kapasitas SDM	•	•	•	•	•	•	SDJ



No.	Penjabaran Strategi Pencapaian	Bagian Ditjen Bina Konstruksi yang Relevan						Koordinator
		KSDJK	PJK	II	KPK	KSP	SDJ	
	2.2.2 Identikasi job specification dan pengembangan sistem manajemen SDM yang berpengalaman lapangan dan pendamping dalam litbang	•	•	•	•	•	•	
	2.2.3 Rekrutmen SDM yang berpengalaman.	•	•	•	•	•	•	
	2.2.4 Evaluasi efektivitas sistem SDM terkait kualitas SDM yang dibutuhkan							
	2.3 Sistem manajemen SDM untuk bidang keuangan.							
	2.3.1 Evaluasi sistem manajemen SDM keuangan.	•	•	•	•	•	•	SDJ
	2.3.2 Pembenahan sistem manajemen SDM keuangan.	•	•	•	•	•	•	
	2.3.3 Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Keuangan melalui sistem rekrutmen yang disesuaikan dengan kebutuhan.	•	•	•	•	•	•	
3	Sarana dan Prasarana yang memadai							
	3.1 Sarana dan prasarana pada Ditjen Bina Konstruksi							
	3.1.1 Evaluasi ketersediaan sarana dan prasaranaDitjen Bina Konstruksi	•	•	•	•	•	•	SDJ
	3.1.2 Pengembangan kebutuhan sarana dan prasarana.	•	•	•	•	•	•	

No.	Penjabaran Strategi Pencapaian	Bagian Ditjen Bina Konstruksi yang Relevan						Koordinator
		KSDJK	PJK	II	KPK	KSP	SDJ	
	3.1.3 Strategi pengadaan sarana dan prasarana.	•	•	•	•	•	•	
	3.1.4 Pengadaan sarana dan prasarana.	•	•	•	•	•	•	
	3.2 Kolaborasi antar pusat dalam pemanfaatan sumber daya.							
	3.2.1 Evaluasi sumber daya yang dapat digunakan bersama.	•	•	•	•	•	•	SDJ
	3.2.2 Pengembangan pengelolaan sumber daya secara bersama.	•	•	•	•	•	•	
	3.2.3 Pemanfaatan sumber daya secara bersama.	•	•	•	•	•	•	
4	<b>Sistem Informasi Manajemen yang terintegrasi</b>							
	4.1 Integrasi sistem manajemen informasi dengan eksternal seperti LPJK, BPS, dan stakeholders lainnya.							
	4.1.1 Evaluasi dan identifikasi kebutuhan integrasi sistem informasi dengan stakeholder eksternal.	•	•	•	•	•	•	KSP
	4.1.2 Pengembangan sistem informasi terintegrasi dengan stakeholder eksternal.	•	•	•	•	•	•	KSP
	4.1.3 Evaluasi efektivitas sistem informasi terintegrasi dengan eksternal stakeholder.	•	•	•	•	•	•	

No.	Penjabaran Strategi Pencapaian	Bagian Ditjen Bina Konstruksi yang Relevan						Koordinator
		KSDJK	PJK	II	KPK	KSP	SDJ	
	4.2 Integrasi sistem informasi antar pusat (internal).							
	4.2.1 Evaluasi dan identifikasi kebutuhan integrasi sistem informasi antar pusat (internal).	•	•	•	•	•	•	SB
	4.2.2 Pengembangan sistem informasi terintegrasi antar pusat (internal).	•	•	•	•	•	•	
	4.2.3 Evaluasi efektivitas sistem informasi terintegrasi antar pusat (internal).	•	•	•	•	•	•	
	4.3 Akurasi dan update data melalui peningkatan kerja sama dan partisipasi dengan stakeholders dalam proses akuisisi data.							
	4.3.1 Identifikasi kebutuhan informasi yang akurat dan update melalui kerja sama dan partisipasi dengan stakeholders dalam proses akuisisi data.	•	•	•	•	•	•	KSP
	4.3.2 Pengembangan kerja sama dan partisipasi dengan stakeholders dalam proses akuisisi data.	•	•	•	•	•	•	
	4.3.3 Evaluasi efektivitas kerja sama dan data.	•	•	•	•	•	•	
5	Jaringan kerja sama yang efektif							
	5.1 Kerjasama dengan Pembina Jasa Konstruksi nasional dan daerah.							
	5.1.1 Evaluasi kerja sama antar tim Pembina jasa konstruksi nasional	•	•	•	•	•	•	KSP

No.	Penjabaran Strategi Pencapaian	Bagian Ditjen Bina Konstruksi yang Relevan						Koordinator
		KSDJK	PJK	II	KPK	KSP	SDJ	
	dan daerah							
	5.1.2 Pengembangan kerja sama antar tim Pembina jasa konstruksi nasional dan daerah.	•	•	•	•	•	•	
	5.1.3 Evaluasi efektivitas kerja sama.	•	•	•	•	•	•	

[illegible]



## Lampiran VI

### STRUKTUR SUB-OUTPUT PER UNIT KERJA DAN INDIKATOR

DIREKTORAT	Output/ Sub-Output	Indikator Output/ Sub-Output	Satuan	Target (1 thn)	Target (5 thn)
<b>DIREKTORAT BINA INVESTASI INFRASTRUKTUR</b>					
<b>Output:</b> Tersedianya Pengaturan Pembinaan Investasi Infrastruktur		Jumlah Draft NSPK pembinaan investasi infrastruktur	Draft NSPK	4	20
Subdit Penyiapan Kebijakan Investasi Infrastruktur	1 <b>Sub-Output</b> Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Pola Investasi dan Pola Pembiayaan Infrastruktur	Jumlah draft pola investasi dan pola pembiayaan infrastruktur	Draft NSPK	2	10
Subdit Sinkronisasi Dan Evaluasi Investasi Infrastruktur	2 <b>Sub-Output</b> Tersusunnya NSPK Penyelenggaraan Investasi Infrastruktur	Jumlah draft NSPK penyelenggaraan investasi infrastruktur	Draft NSPK	2	10
<b>Output:</b> Terlaksananya pemantauan dan evaluasi investasi infrastruktur dan Pengelolaan Risiko		Jumlah profil pembinaan investasi infrastruktur dan pengelolaan risiko	Profil	4	20

Subdit Fasilitas Dan Mitigasi Risiko Investasi Infrastruktur	1 <b>Sub-Output</b> Terselenggaranya fasilitas investasi infrastruktur dan pengelolaan risiko	Jumlah fasilitas infrastruktur dan pengelolaan resiko	Profil	2	10
Subdit Pasar Infrastruktur	2 <b>Sub-Output</b> Tersusunnya Profil Pasar Konstruksi Nasional dan Internasional	Jumlah Profil Pasar Konstruksi Nasional dan Internasional	Profil	2	10
<b>Output:</b> Pelaksanaan urusan tata usaha		Layanan Perkantoran	Laporan Bulan Layanan	13	65
Subbag Tata Usaha					
<b>DIREKTORAT BINA PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI</b>					
<b>Output:</b> Tersedianya pengaturan pembinaan penyelenggaraan konstruksi		Jumlah draft NSPK pembinaan penyelenggaraan konstruksi	Draft NSPK	7	35
Subdit Sistem Penyelenggaraan	1 <b>Sub-Output</b> Tersusunnya Standar dan Pedoman Sistem Penyelenggaraan Konstruksi	Jumlah draft NSPK Sistem Penyelenggaraan Konstruksi	Draft NSPK	2	10



Subdit Kontrak Konstruksi	2 <b>Sub-Output</b> Tersusunnya Standar dan Pedoman Kontrak Konstruksi	Jumlah draft NSPK Kontrak Konstruksi	Draft NSPK	1	5
Subdit Konstruksi Berkelanjutan	3 <b>Sub-Output</b> Tersusunnya Standar dan Pedoman Konstruksi Berkelanjutan	Jumlah draft NSPK Konstruksi Berkelanjutan	Draft NSPK	2	10
Subdit Manajemen Mutu	4 <b>Sub-Output</b> Tersusunnya Standar dan Pedoman Manajemen Mutu	Jumlah draft NSPK Manajemen Mutu	Draft NSPK	2	10
<b>Output:</b> Terlaksananya pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan konstruksi		Jumlah profil pembinaan penyelenggaraan konstruksi	Profil	5	25
Subdit Sistem Penyelenggaraan	1 <b>Sub-Output</b> Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Penyelenggaraan Konstruksi	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Penyelenggaraan Konstruksi	Profil	2	10

Subdit Kontrak Konstruksi	2 <b>Sub-Output</b> Profil Pelaksanaan Kontrak Konstruksi	Jumlah Profil Pelaksanaan Kontrak Konstruksi	Profil	1	5
Subdit Konstruksi Berkelanjutan	3 <b>Sub-Output</b> Profil Pelaksanaan Konstruksi Berkelanjutan	Jumlah Profil Pelaksanaan Konstruksi Berkelanjutan	Profil	1	5
Subdit Manajemen Mutu	4 <b>Sub-Output</b> Profil Pelaksanaan Manajemen Mutu	Jumlah Profil Pelaksanaan Manajemen Mutu	Profil	1	5
<b>Output:</b> Pelaksanaan urusan tata usaha		Layanan Perkantoran	Laporan Bulan Layanan	13	65
Subbag Tata Usaha					
<b>DIREKTORAT BINA KELEMBAGAAN DAN SUMBERDAYA JASA KONSTRUKSI</b>					
<b>Output:</b> Tersedianya Pengaturan Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi		Jumlah Draft NSPK Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi	Draft NSPK	8	40

Subdit Kelembagaan	1	<b>Sub-Output</b> Tersusunnya Standar dan Pedoman Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat	Jumlah draft NSPK Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat	Draft NSPK	2	10
Subdit Usaha Jasa Konstruksi	2	<b>Sub-Output</b> Tersusunnya Standar dan Pedoman Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah draft NSPK usaha jasa konstruksi	Draft NSPK	2	10
Subdit Material dan Peralatan Konstruksi	3	<b>Sub-Output</b> Tersusunnya Standar dan Pedoman Material dan Peralatan Konstruksi	Jumlah draft NSPK Material dan Peralatan Konstruksi	Draft NSPK	2	10
Subdit Teknologi Konstruksi dan Produk Dalam Negeri	4	<b>Sub-Output</b> Tersusunnya Standar dan Pedoman Teknologi dan Produk Dalam Negeri	Jumlah draft NSPK teknologi dan produk dalam negeri	Draft NSPK	2	10
<b>Output:</b> Terlaksananya pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sumber daya jasa konstruksi			Jumlah profil pembinaan kelembagaan dan sumber daya jasa konstruksi	Profil	8	40
Subdit Kelembagaan	1	<b>Sub-Output</b> Tersusunnya Profil Kinerja Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat	Jumlah Profil Kinerja Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat	Profil	2	10

Subdit Usaha Jasa Konstruksi	2 <b>Sub-Output</b> Tersusunnya Profil Kinerja Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah profil kinerja Usaha Jasa Konstruksi	Profil	2	10
Subdit Material dan Peralatan Konstruksi	3 <b>Sub-Output</b> Tersusunnya Profil Kinerja Material dan Peralatan Konstruksi	Jumlah profil kinerja Material dan Peralatan Konstruksi	Profil	2	10
Subdit Teknologi Konstruksi dan Produk Dalam Negeri	4 <b>Sub-Output</b> Tersusunnya Profil Kinerja Teknologi dan Produk Dalam Negeri	Jumlah profil kinerja Teknologi dan Produk Dalam Negeri	Profil	2	10
<b>Output:</b> Pelaksanaan urusan tata usaha		Layanan Perkantoran	Laporan Bulan Layanan	13	65
Subbag Tata Usaha					
<b>DIREKTORAT BINA KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI</b>					
<b>Output :</b> Tersedianya Pengaturan Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Kerja Konstruksi		Jumlah draft NSPK pembinaan kompetensi dan produktivitas kerja konstruksi	Draft NSPK	26	155
Subdit Standar dan Materi Kompetensi	1 <b>Sub-Output</b> Tersusunnya Standar Kompetensi Kerja Konstruksi	Jumlah Draft NSPK Kompetensi Kerja Konstruksi	Draft NSPK	20	125

Subdit Penerapan Kompetensi	2 <b>Sub-Output</b> Tersusunnya Standar dan Pedoman Penerapan Peningkatan Kompetensi Kerja Konstruksi	Jumlah draft NSPK Penerapan Peningkatan Kompetensi Kerja Konstruksi	Draft NSPK	2	10
Subdit Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi	3 <b>Sub-Output</b> Tersusunnya Standar dan Pedoman pengembangan profesi jasa konstruksi	Jumlah draft NSPK pengembangan profesi jasa	Draft NSPK	2	10
Subdit Produktivitas	4 <b>Sub-Output</b> Tersusunnya Standar dan Pedoman Produktivitas Kerja Konstruksi	Jumlah draft NSPK Produktivitas Kerja Konstruksi	Draft NSPK	2	10
<b>Output :</b> Terlaksananya pemantauan dan evaluasi kompetensi dan produktivitas kerja konstruksi		Jumlah profil kompetensi dan produktivitas kerja konstruksi	Profil	3	15
Subdit Penerapan Kompetensi	1 <b>Sub-Output</b> Tersusunnya Profil Kinerja Penerapan Kompetensi Kerja Konstruksi	Jumlah Profil Fasilitator/ Instruktur/ Asesor/ Manajer Pemberdayaan (Manajer Perusahaan)	Profil	1	5
Subdit Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi	2 <b>Sub-Output</b> Tersusunnya profil kinerja pengembangan profesi jasa konstruksi	Jumlah profil kinerja pengembangan profesi jasa konstruksi	Profil	1	5

Subdit Produktivitas	3 <b>Sub-Output</b> Profil Kinerja Produktivitas Kerja Konstruksi	Jumlah Profil Kinerja Produktivitas Kerja Konstruksi	Profil	1	5
<b>Output:</b> Pelaksanaan urusan tata usaha		Layanan Perkantoran	Laporan Bulan Layanan	13	65
Subbag Tata Usaha					
<b>DIREKTORAT KERJA SAMA DAN PEMBERDAYAAN</b>					
<b>Output:</b> Terlaksananya Kerjasama dan pemberdayaan peningkatan kompetensi SDM konstruksi		Jumlah profil kerjasama dan pemberdayaan peningkatan kompetensi SDM konstruksi	Profil	1	5
Subdit Kerjasama	1 <b>Sub-Output</b> Tersusunnya Standar dan Pedoman Kerjasama dan Pemberdayaan	Jumlah Draft NSPK Kerjasama dan Pemberdayaan	Draft NSPK	2	10
	2 <b>Sub-Output</b> Terlaksananya Pengembangan kompetensi dan produktivitas konstruksi bersama lembaga pemerintah dan/atau masyarakat	Jumlah kerja sama penyelenggaraan pemberdayaan konstruksi	Kerja sama penyelenggara pemberdayaan Konstruksi	40	200

Subdit Pemberdayaan Wilayah I/II/III	3 <b>Sub-Output</b> Tersusunnya profil kinerja pelaksanaan pemberdayaan	Jumlah profil kinerja pelaksanaan pemberdayaan	Profil	3	15
	4 <b>Sub-Output</b> Terlaksananya fasilitasi pemberdayaan pengguna dan penyedia jasa konstruksi	Jumlah Supervisor/Mandor/Kepala Pekerja Konstruksi terlatih	Orang	10000	50000
	5 <b>Sub-Output</b> Terlaksananya penyiapan penerapan kompetensi konstruksi	Jumlah fasilitator/instruktur/asesor/ manajer pemberdayaan	Orang	2000	10000
	6 <b>Sub-Output</b> Terlaksananya Pemberdayaan tenaga kerja konstruksi mandiri	Jumlah pemberdayaan tenaga kerja mandiri	Angkatan	6000	30000
<b>Output:</b> Pelaksanaan urusan tata usaha		Layanan Perkantoran	Laporan Bulan Layanan	13	65
Subbag Tata Usaha					

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL					
Output: Layanan teknis dan administrasi pembinaan jasa konstruksi		Jumlah layanan teknis dan administrasi pembinaan jasa konstruksi	Dokumen/Laporan	5	25
Bagian Perencanaan dan Evaluasi	Dokumen perencanaan, program dan anggaran, dan laporan evaluasi kinerja	Jumlah dokumen perencanaan, program dan anggaran, dan laporan evaluasi kinerja	Dokumen	6	30
Bagian Kepegawaian dan Ortala	Layanan mutasi pegawai, pengembangan pegawai dan penyelenggaraan ortala	Jumlah Laporan layanan mutasi pegawai, pengembangan pegawai dan penyelenggaraan ortala	Laporan	3	15
Bagian Keuangan dan Umum	Akuntansi keuangan, pengelolaan BMN, dan layanan umum rumah tangga dan perlengkapan	Jumlah Laporan pengelolaan akuntansi keuangan, pengelolaan BMN, dan layanan umum rumah tangga dan perlengkapan	Laporan	3	15
Bagian Hukum dan Komunikasi Publik	Layanan informasi dan komunikasi publik	Jumlah layanan informasi dan komunikasi publik	Dokumen	14	70
	Pertimbangan/opini hukum serta pendampingan hukum dan penyusunan peraturan dan perundang-undangan	Jumlah laporan pelaksanaan Pertimbangan/opini hukum serta pendampingan hukum dan penyusunan peraturan dan perundang-undangan	Laporan	3	15
Pelaksanaan Urusan Tata Usaha	Terlaksananya urusan tata usaha	Layanan Perkantoran	Laporan Bulan	13	65



			Layanan		
	Terlaksananya Pembinaan oleh Provinsi	Jumlah Laporan Pembinaan Provinsi	Laporan	34	170

## Lampiran VII

### PETA ALIRAN PENCAPAIAN SASARAN

SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA		SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SUB-OUTPUT	SATUAN	PELAKSANA
Meningkatnya pengendalian dan pengawasan konstruksi nasional	Tingkat pengendalian pelaksanaan konstruksi nasional	Meningkatnya kapitalisasi konstruksi oleh investor nasional	Peningkatan rasio kapitalisasi konstruksi oleh investor nasional	%	Kebijakan dan Strategi kapitalisasi konstruksi dan pengusahaan infrastruktur oleh badan usaha nasional	Draft NSPK	Kebijakan dan Strategi Pola Investasi dan Pola Pembiayaan Infrastruktur	Dokumen	DIT BINA INVESTASI INFRASTRUKTUR
							NSPK Penyelenggaraan Investasi Infrastruktur	Draft NSPK	DIT BINA INVESTASI INFRASTRUKTUR
					Fasilitasi kapitalisasi dan pengusahaan infrastruktur oleh badan usaha nasional	Profil	Fasilitasi investasi infrastruktur dan pengelolaan resiko	Laporan	DIT BINA INVESTASI INFRASTRUKTUR
							Profil Pasar Konstruksi Nasional dan Internasional	Dokumen	DIT BINA INVESTASI INFRASTRUKTUR

## Lampiran VII

SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA		SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SUB-OUTPUT	SATUAN	PELAKSANA
Meningkatnya pengendalian dan pengawasan konstruksi nasional	Tingkat pengendalian pelaksanaan konstruksi nasional	Meningkatnya persentase BUJK yang berkualifikasi besar	Persentase kenaikan BUJK menjadi berkualifikasi B2	%	Kelembagaan pembinaan jasa konstruksi	Profil	Standar dan Pedoman Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat	Draft NSPK	DIT BINA KELEMBAGAAN DAN SUMBERDAYA JASA KONSTRUKSI
							Profil Kinerja Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat	Dokumen	DIT BINA KELEMBAGAAN DAN SUMBERDAYA JASA KONSTRUKSI
							Standar dan Pedoman bidang Usaha Jasa Konstruksi	Draft NSPK	DIT BINA KELEMBAGAAN DAN SUMBERDAYA JASA KONSTRUKSI
							Profil Kinerja bidang Usaha Jasa Konstruksi	Dokumen	DIT BINA KELEMBAGAAN DAN SUMBERDAYA JASA KONSTRUKSI

## Lampiran VII

SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA		SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SUB-OUTPUT	SATUAN	PELAKSANA
Meningkatnya pengendalian dan pengawasan konstruksi nasional	Tingkat pengendalian pelaksanaan konstruksi nasional	Meningkatnya tertib penyelenggaraan konstruksi	Meningkatnya SDM penyedia jasa konstruksi yang kompeten	%	Pembinaan manajemen mutu dan tertib penyelenggaraan konstruksi	Profil	Standar dan Pedoman bidang Sistem Penyelenggaraan Konstruksi	Draft NSPK	DIT BINA PENYELENGGAR AAN JASA KONSTRUKSI
							Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Penyelenggaraan Konstruksi	Laporan	DIT BINA PENYELENGGAR AAN JASA KONSTRUKSI
							Standar dan Pedoman bidang Kontrak Konstruksi	Draft NSPK	DIT BINA PENYELENGGAR AAN JASA KONSTRUKSI
							Profil Pelaksanaan Kontrak Konstruksi	Dokumen	DIT BINA PENYELENGGAR AAN JASA KONSTRUKSI

## Lampiran VII

SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA		SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SUB-OUTPUT	SATUAN	PELAKSANA
Meningkatnya pengendalian dan pengawasan konstruksi nasional	Tingkat pengendalian pelaksanaan konstruksi nasional	Meningkatnya tertib penyelenggaraan konstruksi	Meningkatnya SDM penyedia jasa konstruksi yang kompeten	%	Pembinaan manajemen mutu dan tertib penyelenggaraan konstruksi	Profil	Standar dan Pedoman bidang Konstruksi Berkelanjutan	Draft NSPK	DIT BINA PENYELENGGAR AAN JASA KONSTRUKSI
							Profil Pelaksanaan Konstruksi Berkelanjutan	Dokumen	DIT BINA PENYELENGGAR AAN JASA KONSTRUKSI
							Standar dan Pedoman bidang Manajemen Mutu	Draft NSPK	DIT BINA PENYELENGGAR AAN JASA KONSTRUKSI
							Profil Pelaksanaan Manajemen Mutu	Dokumen	DIT BINA PENYELENGGAR AAN JASA KONSTRUKSI

## Lampiran VII

SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA		SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SUB-OUTPUT	SATUAN	PELAKSANA
Meningkatnya pengendalian dan pengawasan konstruksi nasional	Tingkat pengendalian pelaksanaan konstruksi nasional	Meningkatnya SDM penyedia jasa konstruksi yang kompeten	Persentase kenaikan SDM penyedia jasa konstruksi yang kompeten	%	Standar dan Pedoman peningkatan kompetensi SDM konstruksi	Draft NSPK	Standar Kompetensi Kerja Konstruksi	Draft Standar Kompetensi Kerja Konstruksi	DIT KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI
							Modul Peningkatan Kompetensi	Modul	DIT KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI
							Standar dan Pedoman Penyelenggaraan Peningkatan Kompetensi Kerja Konstruksi	Draft NSPK	DIT KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI
							Profil Fasilitator/ Instruktur/ Asesor/ Manajer Pemberdayaan	Dokumen	DIT KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI

## Lampiran VII

SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA		SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SUB-OUTPUT	SATUAN	PELAKSANA
Meningkatnya pengendalian dan pengawasan konstruksi nasional	Tingkat pengendalian pelaksanaan konstruksi nasional	Meningkatnya SDM penyedia jasa konstruksi yang kompeten	Persentase kenaikan SDM penyedia jasa konstruksi yang kompeten	%	Standar dan Pedoman peningkatan kompetensi SDM konstruksi	Draft NSPK	Standar dan Pedoman pengembangan profesi jasa konstruksi	Draft NSPK	DIT KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI
							Penyetaraan kompetensi	Orang	DIT KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI
							Standar dan Pedoman Produktivitas Kerja Konstruksi	Draft NSPK	DIT KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI
							Profil Kinerja Peningkatan Produktivitas Kerja Konstruksi	Dokumen	DIT KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI

## Lampiran VII

SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA		SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SUB-OUTPUT	SATUAN	PELAKSANA
Meningkatnya pengendalian dan pengawasan konstruksi nasional	Tingkat pengendalian pelaksanaan konstruksi nasional	Meningkatnya SDM penyedia jasa konstruksi yang kompeten	Persentase kenaikan SDM penyedia jasa konstruksi yang kompeten	%	Kerjasama dan pemberdayaan peningkatan kompetensi SDM konstruksi	Profil	Standar dan pedoman kerjasama dan pemberdayaan	Draft NSPK	DIT KERJA SAMA DAN PEMBERDAYAAN
							Pengembangan kompetensi dan produktivitas konstruksi bersama lembaga pemerintah dan/atau masyarakat	Kerja sama penyelenggara pemberdayaan Konstruksi	DIT KERJA SAMA DAN PEMBERDAYAAN
							Profil kinerja pelaksanaan pemberdayaan	Dokumen	DIT KERJA SAMA DAN PEMBERDAYAAN
							Fasilitasi pemberdayaan pengguna dan penyedia jasa konstruksi	Orang	DIT KERJA SAMA DAN PEMBERDAYAAN
							Penyiapan penerapan kompetensi konstruksi	Orang	DIT KERJASAMA DAN PEMBERDAYAAN
							Pemberdayaan tenaga kerja konstruksi mandiri	Angkatan	DIT KERJASAMA DAN PEMBERDAYAAN



## Lampiran VII

SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA		SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SUB-OUTPUT	SATUAN	PELAKSANA
Meningkatnya pengendalian dan pengawasan konstruksi nasional	Tingkat pengendalian pelaksanaan konstruksi nasional	Meningkatnya utilitas produk unggulan	Persentase kenaikan tingkat utilitas produk unggulan	%	Pembinaan penerapan teknologi inovatif	Profil	Standar dan Pedoman bidang Teknologi dan Produk Dalam Negeri	Draft NSPK	DIT BINA KELEMBAGAAN DAN SUMBERDAYA JASA KONSTRUKSI
							Profil Kinerja bidang Teknologi dan Produk Dalam Negeri	Dokumen	DIT BINA KELEMBAGAAN DAN SUMBERDAYA JASA KONSTRUKSI
					Informasi rantai pasok konstruksi	Dokumen	Standar dan Pedoman bidang Material dan Peralatan Konstruksi	Draft NSPK	DIT BINA KELEMBAGAAN DAN SUMBERDAYA JASA KONSTRUKSI
							Profil Kinerja bidang Material dan Peralatan Konstruksi	Dokumen	DIT BINA KELEMBAGAAN DAN SUMBERDAYA JASA KONSTRUKSI

## Lampiran VIII

### Baseline dan Cara Pengukuran Pencapaian Sasaran

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2015-2019	Baseline	Cara Mengukur
1.	Meningkatnya kapitalisasi konstruksi oleh investor nasional	Peningkatan rasio kapitalisasi konstruksi oleh investor nasional	15 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>Baseline adalah 3% , berdasarkan data kontrak KPS 2009-2014 untuk sektor air minum dan jalan tol</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diukur dari data yang kontrak KPS yang ditandatangani untuk sektor air minum dan jalan tol</li> </ul>
2.	Meningkatnya persentase BUJK yang berkualifikasi besar	Persentase kenaikan BUJK menjadi berkualifikasi B2	90%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan data LPJK tahun 2014, terdapat 139 BUJK kualifikasi B2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah BUJK Kualifikasi B2 ditargetkan bertambah 125 BUJK, atau setara dengan kenaikan 90% (terhadap baseline 139 BUJK)</li> </ul>
3.	Meningkatnya tertib penyelenggaraan konstruksi	Persentase kenaikan tingkat tertib penyelenggaraan konstruksi	40 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indikator tertib penyelenggaraan adalah mutu konstruksi, K3, administrasi kontrak</li> <li>Baseline ditetapkan sebesar 10%, berdasarkan hasil monev PusbinPK,BP Konstruksi pada 2014 dengan mengambil nilai terendah dari 3 indikator tersebut.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diukur melalui capaian 3 indikator (mutu konstruksi, K3, administrasi kontrak) pada proyek kualifikasi besar, menengah, dan kecil (sampling)</li> </ul>

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2015-2019	Baseline	Cara Mengukur
4.	Meningkatnya SDM Penyedia Jasa konstruksi yang kompeten	Persentase kenaikan SDM Penyedia Jasa konstruksi yang kompeten	27 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>Data tahun 2014, jumlah SDM konstruksi adalah sebanyak 6,885,401 orang,</li> <li>Rasio yang diharapkan adalah 40% (2.754.160 orang) Skilled labour : 60% (4.131.241 orang) Unskilled labour</li> <li>Jumlah SDM Penyedia Jasa konstruksi yang kompeten (Skilled labour) pada tahun 2014 adalah sebanyak 166,247 orang (6,04% dari 2.754.160 orang)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pada 2019, jumlah SDM Penyedia Jasa konstruksi yang kompeten ditargetkan bertambah sebanyak 750.000 orang.</li> <li>Persentase capaian dihitung dari perbandingan capaian penambahan SDM Penyedia Jasa konstruksi yang kompeten terhadap 40% Skilled labour (2.754.160 orang)</li> </ul>
5.	Meningkatnya utilitas produk unggulan	Persentase kenaikan tingkat utilitas produk unggulan	15 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan Data AP3I pada 2014, volume penggunaan beton pracetak terhadap beton adalah sebesar 15%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pada 2019, ditargetkan volume penggunaan beton pracetak mencapai 30%.</li> <li>Diukur melalui perbandingan volume penggunaan beton pracetak terhadap volume konsumsi beton nasional</li> </ul>

## Lampiran IX

TABEL KEBUTUHAN PENDANAAN PROGRAM PEMBINAAN KONSTRUKSI 2015-2019

(dalam miliar Rupiah)

NO	UNIT ORGANISASI	2015	2016	2017	2018	2019	Total
1	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL	113,33	119,00	124,95	131,19	137,75	626,23
2	DIREKTORAT BINA INVESTASI INFRASTRUKTUR	47,55	49,92	52,42	55,04	57,79	262,74
3	DIREKTORAT BINA PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI	60,17	63,18	66,34	69,66	73,14	332,51
4	DIREKTORAT BINA KELEMBAGAAN DAN SUMBERDAYA JASA KONSTRUKSI	57,06	59,91	62,91	66,06	69,36	315,31
5	DIREKTORAT BINA KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI	76,81	80,65	84,68	88,91	93,36	424,43
6	DIREKTORAT KERJASAMA DAN PEMBERDAYAAN + BALAI	367,96	551,0	752,64	954,27	1.155,98	3.781,95
TOTAL		722,90	923,77	1.143,96	1.365,15	1.587,41	5.743,19